

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA : SOLUSI ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI DI PULAU BANGKA

Tim Peneliti :

- Rizal Sofyan G.
- Gusnelly
- Umi Karomah Yaumiddin
- Erlita Tantri
- Yose Hermana



Pusat Penelitian Sumberdaya Regional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2007

© 2007 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR)*

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pembangunan Industri Pariwisata: Solusi Alternatif Pembangunan
Ekonomi di Pulau Bangka/Rizal S. Gucci dkk. - Jakarta : LIP
Press, 2007.

xii + 199 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-226-2

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Pariwisata | 2. Wisata bahari |
| 3. Ekologi | 4. Daya saing ekonomi |

338.479.1

Penerbit : **LIPI Press, anggota Ikapi**



*Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. 1
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710
Telp.: 021-5265152
Fax. : 021-5265152

KATA PENGANTAR

Percepatan pembangunan dan penanganan persoalan kerusakan lingkungan alam di Provinsi Bangka Belitung perlu untuk mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah setempat. Selain itu hal lainnya yang juga penting untuk diperhatikan dalam percepatan pembangunan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung adalah pembangunan wilayah pesisir termasuk sumber daya laut. Wilayah kepulauan ini menjadi etalase kelautan wilayah barat karena memiliki kekayaan laut yang berlimpah dan beragam yang dapat dimanfaatkan sebagai komoditas unggulan. Posisi wilayah kepulauan yang strategis menguntungkan jika di provinsi baru ini dikembangkan industri pariwisata, terutama wisata bahari. Keunikan pantai dengan hamparan pasir putih dan dihiasi oleh tumpukan batu granit yang tersusun sangat khas menambah keindahannya.

Buku ini merupakan sebuah hasil studi atas keinginan untuk membantu percepatan pembangunan industri pariwisata terutama wisata bahari di Pulau Bangka. Buku ini diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi berupa data, informasi dan pemikiran kepada para penyusun kebijakan dan perencana pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung. Terlaksananya kegiatan penelitian sampai selesainya penulisan buku ini, berkat bantuan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka termasuk tim teknis penelitian serta pihak-pihak yang ikut membantu menyelesaikan buku ini.

Melalui kesempatan ini pula disampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Provinsi Bangka Belitung beserta staf, Bapak Bupati Kabupaten Bangka beserta staf, Bapak BAPPEDA Kabupaten Bangka, Bapak Camat Kecamatan Belinyu beserta staf, Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka beserta staf, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka beserta staf dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka beserta staf serta semua pihak pemerintah daerah yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran dan tenaga untuk kelangsungan penelitian ini. Tidak lupa ucapan terimakasih disampaikan pula kepada Aswin, Bapak Akli, Bapak Usman, Bapak Suryadi. Buat Bapak Hari dan Mas Nono yang selalu setia mengantar para peneliti keliling baik di darat maupun di laut. Terimakasih yang tidak terhingga juga ditujukan kepada para peneliti LIPI, Bapak Asikin Djamali, Bapak Safar Dodi, Ibu Juhana, Bapak Wijaya Adi, Ibu Chintia, dan Ibu Sri Lestari serta kelompok peneliti lainnya yang begitu banyak memberikan kontribusi pemikiran dan koordinasi kerja selama di lapangan hingga selesainya buku ini. Ucapan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Jakarta, Desember 2007
Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya
Regional-LIPI

Dr. Yekti Maunati, MA
NIP: 320004651

Abstrak

Pariwisata memang bukanlah sektor primer yang dapat diandalkan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai sektor tersier, pariwisata tentunya dapat memberikan kontribusi bagi penciptaan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkannya, dibutuhkan kerjasama yang saling terkait di antara pengusaha besar, pengusaha kecil dan masyarakat. Pengusaha besar yang sebelumnya beroperasi pada pertambangan timah memiliki kewajiban yang besar pada pembinaan masyarakat di sekitarnya yang biasa didengungkan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sementara itu, pengusaha skala kecil dan menengah diharapkan dapat menjadi mitra pengusaha besar tersebut, namun bukan dalam arti sebagai mitra langsung dalam proses produksi, tetapi sebagai mitra yang dapat menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Partisipasi masyarakat dengan *Community Based Development* (CBD) seyogyanya juga mendukung program-program yang dicanangkan oleh pengusaha besar dan kecil.

Dalam kasus pengembangan pariwisata di Tanjung Penyusuk yang jauh dari jangkauan sarana transportasi, karena letaknya tersembunyi (*remote area*) di Kecamatan Belinyu. Konsep yang ditawarkan di atas dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Bangka-Belitung pada umumnya dan Kecamatan Belinyu pada khususnya. Meskipun disadari bahwa penerapannya tidak mudah mengingat kultur masyarakat setempat dapat menjadi sandungan, sehingga perlu adanya jalinan kerjasama yang harmonis antara unsur-unsur tersebut. Dengan demikian juga dibutuhkan pihak-pihak lain yang dapat menjadi jembatan komunikasi bagi terselenggaranya harmonisasi di antara pengusaha skala besar, skala kecil dan menengah serta masyarakat.

Dilandasi dengan pemikiran ini, maka penelitian yang direncanakan berusaha untuk melihat persoalan kepariwisataan di kawasan Pantai Tanjung Penyusuk di kawasan perairan Teluk Klabat. Selain itu, penelitian ini ingin melihat sejauh mana kesiapan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka untuk mengembangkan pariwisata bahari dengan sumber daya alam yang sudah tersedia. Upaya-upaya pembenahan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana kesinambungan program pariwisata tersebut dengan aspek lingkungan terutama di daerah pantai dan pesisir pantai. Hasil penelitian

ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata dan sejauh mana sektor dapat membantu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan serta kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, penyebaran kuisioner, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pemerintah daerah, NGO, Masyarakat, Budayawan pelaku wisata serta melakukan riset kepustakaan.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi

BAB I : PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	9
I.3. Tujuan dan Sasaran	10
I.4. Metodologi Penelitian	11
I.4.1. Pendekatan dan Pengumpulan Data	11
I.4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	13
I.5. Kerangka Konseptual	13
I.6. Organisasi Penulisan	27

BAB II : GAMBARAN UMUM PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II.1. Pendahuluan	29
II.2. Topografi dan Demografi Bangka Belitung	29
II.3. Karakteristik Perekonomian Daerah	33
II.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Bangka	36
II.5. Sumber Daya Alam (SDA)	41
II.5.1 Pertambangan	41
II.5.2 Perikanan	43
II.5.3 Pertanian dan Perkebunan	44
II.2.4 Kehutanan	47

**BAB III : OTONOMI DAERAH, PEMEKARAN WILAYAH
DAN INDUSTRI PARIWISATA DI KABUPATEN
BANGKA**

III.1. Pendahuluan	49
III.2. Sekilas Tentang Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi	50
III.3. Persoalan Seputar Otonomi dan Pemekaran Wilayah di Pulau Bangka	54
III.4. Isu Pokok Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bangka Pasca Pemekaran	62
III.5. Pariwisata Pantai Penyusuk di Kecamatan Belinyu	64
III.6. Langkah Strategis Pengembangan vs Tantangan Budaya	66
III.7. Dampak Ekonomi Pembangunan Sektor Pariwisata ...	70
III.8. Pengembangan Pariwisata Pantai Penyusuk di Kecamatan Belinyu	76

**BAB IV : PENDUDUK DAN DAYA DUKUNG
LINGKUNGAN BAGI PENGEMBANGAN
PARIWISATA**

IV.1 Pendahuluan	81
IV.2 Potensi Penduduk Bagi Pengembangan Pariwisata	82
IV.2.1 Pendidikan dan Keterampilan Penduduk dalam Pengembangan Pariwisata	84
IV.2.2 Potensi Tenaga Kerja Terdidik	87
IV.2.3 Permasalahan Tenaga Kerja	88
IV.3.3 Daya Dukung Lingkungan untuk Pengembangan Pariwisata	90
IV.3.4 Ancaman Terhadap Potensi SDA/lingkungan..	93
IV.3.4.1 Degradasi Lingkungan: Kendala Bagi Pengembangan Pariwisata	95

IV.3.4.2 Usaha Pelestarian Lingkungan Sebagai
Pendorong Pengembangan Wisata..... 97

BAB V : PENGEMBANGAN PARIWISATA

SEBUAH ANALISIS EKONOMI MAKRO

V.1	Pendahuluan	101
V.2	Struktur Perekonomian	103
V.2.1	Gambaran tentang Keadaan Ekonomi Makro di Kabupaten Bangka	105
V.3	Potensi Ekonomi Masyarakat yang Dapat Dikembangkan dalam Merespon Pariwisata	107
V.4.	Peluang dan Tantangan Pariwisata di Kabupaten Bangka.	113
V.4.1	Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata.	113
V.4.1.1.	Bandar Udara.	115
V.4.1.2.	Kendaraan Umum dan Hotel/Tempat Penginapan.	115
V.4.1.3	Restoran dan Tempat Perbelanjaan.	116
V.4.1.4	Biro Perjalanan/wisata.	117
V.4.2	Profil Wisatawan yang Datang ke Kabupaten Bangka.	118
V.4.5	Analisis Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangka.....	122
V.5.1	Analisis TOWS (<i>Threat-Opportunity-Weakness- Strength</i>)	126
V.5.1.1	Matrik IFE (<i>Internal Factor Evaluation</i>)	128
V.5.1.2	Matrik EFE (<i>External Factor Evaluation</i>)	132
V.5.1.3	Matrik TOWS	134
V.6.	Langkah-langkah yang Perlu ditempuh untuk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangka.	136

BAB VI : SOLUSI ALTERNATIF PENDUKUNG	
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA	
Di TELUK KLABAT KECAMATAN BELINYU	
VI.1	Pendahuluan 139
VI.2	Pembangunan Maritim: Kesiapan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangka 143
VI.2.1	<i>Existing Condition</i> Lokasi Wisata Tanjung Penyusuk di Kecamatan Belinyu 144
VI.3.	Kecamatan Belinyu 149
VI.3.1.	Karakteristik Perekonomian Kecamatan Belinyu 153
VI.4.	Usaha-Usaha Produktif yang Dapat Dikembangkan di Kecamatan Belinyu dalam Mendukung Sektor Pariwisata 166
VI.4.1.	Makanan Hasil Olahan Laut 167
VI.4.2.	Kerajinan Khas Bangka 168
VI.4.3.	Sektor Jasa 170
VI.4.4.	Budidaya Biota Laut 171
VI.5.	Kontribusi PT. Timah terhadap Peningkatan Usaha Kecil 172
VI.6.	Pemberdayaan Masyarakat 175
VI.7.	Model Sinergi Pengusaha Besar, Pengusaha Kecil, Pemerintah dan Masyarakat 182
BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN	
VII.1	Kesimpulan..... 187
VII.2	Saran..... 191

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Angkatan Kerja di Bangka Menurut Pendidikan & Usia (Jiwa) Tahun 2004	4
Tabel II.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Tiap Kabupaten Pada Tahun 2004	31
Tabel II.2 Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan, di Kabupaten Bangka Tahun 2003	32
Tabel II.3 Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2004	36
Tabel II.4 Jumlah Sekolah Agama/Madrasah Tahun 2003 ..	38
Tabel II.5 Jumlah Murid di Kabupaten Bangka Tahun 2003	39
Tabel II.6 Jumlah Guru Kabupaten Bangka Tahun 2003	40
Tabel II.7 Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2004	40
Tabel II.8 Hasil Produksi Pangan Kepulauan Bangka Tahun 2001-2004 (Ton)	46
Tabel II.9 Hasil Tanaman Padi di Kepulauan Bangka	46
Tabel III.1 PDRB Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bangka Belitung (Atas Dasar Harga Konstan 1993, dalam milyar rupiah)	58
Tabel V.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	104
Tabel V.2 Proyeksi Perekonomian Daerah	106
Tabel V.3 Industri Kecil di Kabupaten Bangka Tahun 2005	109
Tabel V.4 Data Industri Formal dan Non Formal di Kab. Bangka Menurut Cabang Industri Tahun 2006 ...	110
Tabel V.6 <i>Internal Factor Evaluation</i> (IFE)	131

Tabel V.7	External Factor Evaluation (EFE).....	133
Tabel V.8	Matrik Internal External.....	134
Tabel V.9	Matrik TOWS	135
Tabel VI.1	Sarana & Prasarana Pendidikan Kecamatan Belinyu 2003	152
Tabel VI.2	Jumlah Perusahaan/Usaha Industri Menurut Kelurahan/Desa Di Kecamatan Belinyu Tahun 2005	154
Tabel VI.3	Data Industri Non Formal Cabang industri Sandang dan Kerajinan Umum	156
Tabel 6.4	Data Industri Non Formal Cabang industri Agro Non-Pangan dan hasil hutan	156
Tabel VI.5	Data Industri Non Formal Cabang industri Industri logam dan mineral	157
Tabel VI.6	Data Cross-Tabulation Pekerjaan dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Belinyu Tahun 2007	160
Tabel VI.7	Data Cross-Tabulation Pekerjaan dan Tingkat pendapatan Masyarakat Kecamatan Belinyu Tahun 2007	163
Tabel VI.8	Jumlah Penerimaan Bantuan Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Swadaya Masyarakat Menurut Kelurahan/Desa, Tahun 2005 (Juta Rupiah)	179
Tabel VI.9	Hasil Pelaksanaan Inpres Bantuan Desa dan Swadaya Serta Tenaga Kerja yang Terserap Menurut Kelurahan/Desa, Tahun 2005	179

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik II.1 Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 1999-2003	34
Grafik II.2 Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2004	37
Grafik III.1 Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 1999-2003	59
Grafik IV.1 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Bangka. ...	83
Grafik IV.2 Tingkat pendidikan Penduduk Kabupaten Bangka 2005	85
Grafik IV.3 Tingkat Pendidikan Pencari Kerja, Kabupaten Bangka	88
Grafik V.1 Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Bangka Tahun 2006	111
Grafik V.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pariwisata	112
Grafik V.3 Proporsi Tujuan Wisata di Kabupaten Bangka ...	119
Grafik V.4 Obyek Wisata yang Diminati Wisatawan di Kabupaten Bangka	121

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Diagram Daerah Pariwisata (Model Smith)	24
Gambar 6.1 Dampak CSR terhadap UMKM.	183
Gambar 6.2 Efek Keberadaan Proyek Pertambangan terhadap <i>Stakeholder</i>	184

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. Latar Belakang

Studi ini merupakan lanjutan (tahun ke-2) dari *Pariwisata Bahari, Tenaga Kerja dan Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan di Provinsi Bangka Belitung*. Pada tahun pertama, studi ini sudah melakukan identifikasi beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi industri pariwisata khususnya wisata bahari. Melalui hasil identifikasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Pulau Bangka sangat potensial untuk dikembangkan industri wisata. Jenis pariwisata yang potensial dikembangkan untuk provinsi baru ini pun beragam, antara lain industri wisata pantai (bahari), wisata sejarah, dan *ecowisata*. Karakteristik pantai dengan pasir putih dihiasi batu granit berbagai ukuran, menjadi menarik untuk dikembangkan sebagai obyek wisata pantai. Selain itu, pulau-pulau kecil yang banyak terdapat di sekeliling Pulau Bangka-Belitung, potensial untuk dijadikan dijadikan obyek *eco-wisata* dan wisata pulau. Pulau-pulau tersebut pada umumnya tidaklah terlalu jauh untuk ditempuh sehingga dapat mempergunakan jasa perahu nelayan setempat.

Beberapa kawasan pantai di Sungai Liat bahkan sudah ada yang dikelola oleh pihak swasta, seperti Pantai Parai dan Pantai Tanjung Pesona. Pada umumnya lokasi pantai (obyek wisata) berada di kawasan Laut Cina Selatan, yang pada bulan-bulan tertentu gelombang ombaknya menjadi besar. Oleh karena itu, pada bulan-bulan tersebut pantai-pantai ini jarang dikunjungi karena ombaknya yang besar. Jika dilihat dari sisi pengelolaan, maka sistem

pengelolaan dengan investasi besar agaknya akan menemui kesulitan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini terkait dengan daya dukung Pulau Bangka yang terbatas, terutama masalah kapasitas listrik, air, dan transportasi. Meskipun demikian, dari segi kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan sarana penunjang (infrastruktur), Pulau Bangka sudah lebih siap dibandingkan dengan Belitung, dengan Kabupaten Bangka sebagai wilayah yang paling siap dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya.

Melihat pada masalah budaya sebagai faktor penunjang wisata itu sendiri, berbagai peninggalan sejarah dan kebudayaan yang menarik tersebar di dua pulau tersebut. Apabila dikaitkan prospek pemasarannya ke depan, maka terlihat peluang pasar pun terbuka lebar, mengingat bahwa selama ini penetrasi pasar pariwisata Provinsi Bangka Belitung masih rendah dibanding potensi yang dimiliki. Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung sekitar 18.300 ribu (51,49%) di tahun 2004. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan wisatawan domestik yang datang ke Bali, yaitu 1.412.684 orang. Meskipun ada beberapa informasi yang diperoleh dari ahli kelautan yang mengatakan bahwa sumberdaya bahari seperti terumbu karang di Perairan Indonesia bagian Timur lebih indah. Namun demikian Pulau Bangka juga memiliki terumbu karang yang tidak kalah menarik dari Pulau Bali. Kekayaan ikan laut yang terdapat di perairan Bangka semakin variatif karena terdapatnya terdapat beberapa jenis ikan hias langka.¹

¹ Wawancara dengan bapak Sakinawa pada tanggal 23 Agustus 2006. Bapak Sakinawa adalah seorang penyelam dan pemerhati pariwisata bahari di Propinsi Bangka Belitung. Saat ini dia juga menjadi instruktur selam pada EMAS DIVING Club, yang berlokasi di Pulau Bangka dengan jumlah penyelam sekitar 120 orang yang terdapat di Pulau Bangka dan Belitung.

Dalam pengembangan industri pariwisata ternyata potensi SDA dan SDM belum cukup mampu menjadi mesin pendorong karena ada prersoalan lain yang tidak kalah penting yaitu arus wisatawananya. Selama ini arus wisatawan masih terkonsentrasi di beberapa pintu masuk terutama Bali dan Yogyakarta. Oleh karena itu, peluang menggarap daerah lain sebagai tujuan wisata masih sangat terbuka. Dari sisi transportasi, telah dikembangkannya jalur-jalur penerbangan dari dan ke Pulau Bangka membuka peluang semakin luasnya akses masuk wisatawan ke provinsi ini. Pemerintah provinsi harus mampu menarik wisatawan mampir dan singgah di Pulau Bangka. Namun hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat belum adanya situs informasi *up to date*, promosi dan pengemasan paket wisata yang mendukung. Selain itu produk wisata cenderung monoton dan kurang terurus, serta belum terintegrasinya antara produk, fasilitas pendukung, dan pemasaran/promosi sehingga makin mempersulit upaya pengembangan dan harus segera dibenahi (Kusumaning, 2006; 5-6). Demikian pentingnya industri pariwisata dan tingginya daya dukung yang dimiliki Provinsi Bangka Belitung, maka sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan optimal.

Terkait masalah penyerapan tenaga kerja di sektor ini menduduki tempat kedua setelah sektor perkebunan yaitu sebesar 9,7%.² Kemudian apabila dilihat kesiapan angkatan kerjanya memperlihatkan bahwa rata-rata angkatan kerja di Bangka setidaknya telah mempunyai pendidikan minimal SMU (lihat tabel). Angkatan kerja ini merupakan modal awal yang baik untuk pengembangan industri pariwisata di Bangka. Pada sisi lain, apabila

² Data diambil dari hasil sensus penduduk Bangka Belitung Tahun 2000 dalam Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Konteks Otonomi Daerah, Seri Penelitian PPK-LIPI No53/2004, hal 55

dilihat dari struktur penduduknya, Bangka memiliki komposisi penduduk usia produktif lebih dari 50%. Hal ini apabila mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah Bangka tentu saja akan menjadi sumber tenaga kerja yang mampu mendorong perekonomian daerah.

Tabel I.1:
Angkatan Kerja di Bangka
Menurut pendidikan & Usia (Jiwa) Tahun 2004

Umur	Pendidikan					
	SD	SMP	SMU	DIII	S1	S2
10-20	4	27	246	-	-	-
21-30	-	19	1574	145	292	-
31-40	-	-	1410	640	407	1
41-50	-	-	-	-	-	-
>50	-	-	-	-	-	-

Sumber : <http://www.bangka.go.id/ketenagakerjaan.php>

Berangkat dari temuan-temuan pada tahun pertama (2006), pariwisata berpotensi untuk dikembangkan akan tetapi tidak cukup signifikan dapat membantu percepatan pembangunan di Provinsi Bangka Belitung dalam waktu cepat, mengingat adanya hambatan keterbatasan daya dukung pulau. Beberapa hambatan yang diidentifikasi adalah sarana transportasi dan akomodasi yang belum memadai. Selain itu, krisis listrik menjadi hal sangat penting untuk dicarikan solusinya. Meskipun masalah listrik menjadi persoalan yang biasa di tingkat nasional namun bukanlah berarti pemerintah

Bangka tidak bisa mencari solusi. Perekonomian rakyat akan membaik jika terbuka lapangan kerja sehingga perhatian ke timah perlahan akan ditinggalkan. Akan tetapi, perkembangan dunia usaha apapun membutuhkan listrik sehingga pemerintah harus mengatasi persoalan ini secepatnya. Upaya yang harus dilakukan adalah mencari solusi alternatif dengan menciptakan industri kecil yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada terutama sumber daya laut. Pariwisata juga dapat dijadikan solusi alternatif perekonomian Bangka Belitung namun tidak dalam jangka waktu dekat, artinya membutuhkan proses yang lama. Sementara itu, masyarakat Bangka Belitung membutuhkan lapangan kerja untuk mengatasi masalah penambangan timah ilegal yang berdampak pada perusakan lingkungan yang semakin meluas. Persoalan tersebut dapat diatasi jika ada sektor-sektor lainnya yang berdampingan dengan sektor pariwisata untuk dikembangkan dalam upaya percepatan pembangunan provinsi baru ini. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi peluang dan tantangan serta strategi pemasaran dari pengembangan sektor-sektor tersebut.

Dari hasil identifikasi tim peneliti Oseonografi LIPI maka SDA laut yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai komoditas unggulan adalah perikanan laut (ikan karang). Terdapat sumber daya ikan karang (SDI karang) sebanyak 81 jenis dan 19 suku. Kekayaan hutan Mangrove yang sudah diidentifikasi adalah terdapat 11 jenis dan 6 suku dengan nilai penting *R. apiculata* 92,49%. Kepadatan pohon 416 batang/ha. Di kawasan Teluk Klabat terdapat siput gunggung, rajungan, dan berbagai jenis ikan laut

seperti ikan beronang, kakap putih, tembang, teri, dan kerapu serta udang.³

Potensi siput gunggung di Pulau Bangka sangat menjanjikan untuk dibudidayakan dan diolah sebagai makanan ringan sehingga dapat dikembangkan sebagai komoditas perdagangan. Siput gunggung menjadi makanan favorit para wisatawan/pengunjung Pulau Bangka. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, siput gunggung dapat menjadi menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Bangka Belitung sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain siput gunggung, Pulau Bangka juga memiliki potensi laut yaitu rajungan. Rajungan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai estimasi rajungan di Pulau Bangka. Dari informasi yang telah dikumpulkan maka diketahui bahwa produksi Rajungan di Teluk Klabat adalah 25 kg/hari ; 500 kg/bulan ; 5000 kg/tahun ; Rp. 125.000.000,-/tahun. Produksi minimal 1% = 80 ekor = 8 kg = Rp. 200.000,- /km²/ th. Sementara produksi maksimal 10 % = Rp 2.000.000,- /km²/. Luas Teluk Klabat Dalam \pm 150 km², estimasi nilai tambah hasil tangkap rajungan Rp. 30.000.000,- sampai Rp. 300.000.000,- / tahun (Juwana, 2006; 24).

³ Data mengenai beberapa sumberdaya laut seperti ikan, rajungan dan siput gunggung diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI. Studi ini direncanakan akan menjadi satu kesatuan dengan studi yang lain terutama yang berkaitan dengan pembudidayaan dan pengembangan sumber daya laut di Pulau Bangka, data lebih rinci dapat dilihat dalam Djamali, 2006, Potensi Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya di Perairan Kepulauan Bangka Belitung untuk Mendukung Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat, Jakarta, LIPI-Press.

Dari hasil wawancara dengan nelayan setempat, maka diketahui pula bahwa Teluk Klabat merupakan penghasil cumi-cumi cukup besar di Belinyu. Harga cumi-cumi juga cukup mahal di Belinyu. Setiap hari nelayan mendapatkan cumi-cumi sebagai hasil tangkapan. Minimal satu orang menangkap sekitar 2-3 kg sehari. Dalam hitungan 1 kg diperkirakan terdapat sekitar 15 ekor cumi-cumi ukuran sedang (dengan panjang badan sekitar 12 cm). Harga 1 kg cumi-cumi berkisar antara 20.000 s/d 25.000 /kg. Jika terdapat sekitar 30 orang melaut setiap hari dan menghasilkan minimal 2 kg cumi-cumi, maka dapat dihitung berapa kilo cumi-cumi di produksi oleh nelayan di kawasan perairan Teluk Klabat setiap hari dan bahkan dalam setahun. Dengan demikian industri kerupuk cumi-cumi tidak akan kehilangan pasokan di pasar ikan karena setiap hari selalu ada cumi-cumi yang ditangkap oleh nelayan.⁴

Dari hasil perkiraan di atas dan adanya keinginan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan di kawasan Teluk Klabat, pada akhirnya telah mendorong studi ini membuat kajian yang lebih kongkrit mengenai persoalan pembangunan pariwisata dan pembangunan perekonomian masyarakat di Kecamatan Belinyu. Kekayaan sumberdaya laut seperti rajungan, siput gunggung, cumi-cumi, dan hasil laut yang lain, dapat diolah menjadi berbagai macam industri makanan. Dalam hal ini, komoditas tersebut tidak hanya bermanfaat untuk diekspor tetapi juga diolah oleh masyarakat sebagai upaya memperluas kesempatan kerja untuk memberdayakan SDM di Pulau Bangka.

⁴ Wawancara dengan pak Akli pada tanggal 26 Juni 2007 di Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu. Pak Akli adalah seorang nelayan dan juga pengumpul hasil tangkapan nelayan di kawasan pantai Tanjung Penyusuk. Informasi yang sama juga kami dapatkan dari bapak Usman, yaitu seorang nelayan di kawasan pantai Tanjung Penyusuk.

Selain potensi perikanan yang akan mengangkat sektor pariwisata di masa yang akan datang, maka potensi lain yang juga dapat menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan terutama untuk pariwisata adalah potensi kolong bekas penambangan timah. Meskipun tidaklah semuanya dapat dimanfaatkan, akan tetapi ada beberapa kolong yang dapat memiliki nilai jual sebagai sebuah objek bagi wisata wisatawan mancanegara. Pemerintah daerah pada tahun 2002, atas kesepakatan bersama pemerintah dengan DPRD TK I, mengeluarkan *Perda No. 10 tahun 2002* tentang “Pengelolaan dan Pemamfaatan Kolong”.

Berdasarkan hasil kajian dari Puslit Limnologi, ada beberapa manfaat dari kolong secara ekonomi dan sosial, yaitu sebagai air baku PDAM, perikanan darat (ikan patin, lele untuk kolong dengan kedalaman 4 m; ikan nila untuk yang lebih dalam), Rekreasi (ikan hias – koi dan emas) dan tempat pemancingan, dan keperluan sehari-hari (mandi dan cuci). Guna mencapai keberhasilan dari program pemanfaatan kolong, maka pemerintah daerah diharapkan memilih salah satu lokasi sebagai wilayah percontohan dengan memanfaatkan kolong pasca timah sebagai solusi alternatif perekonomian masyarakat. Tipologi masyarakat Bangka yang cenderung suka meniru dapat dimanfaatkan jika ada sebuah pilot projek yang berhasil.⁵ Maka dapat diduga akan muncul

⁵ Tipologi yang sama biasa terjadi pada masa berkebun lada dahulu. Tradisi masyarakat yang suka meniru terlihat dari bentuk rumah dan furniture yang mereka miliki. Rumah dengan model yang sama dapat diketahui kapan rumah tersebut dibangun. Jika tetangga mereka menanam lada, akan bermunculan petani-petani lada berikutnya. Tipologi meniru juga terjadi pada minat menikahkan anak-anak. Pada masa lada, seringkali terjadi perkawinan massal karena orang tua merasa malu jika ada anaknya yang belum menikah. Pernikahan tersebut seringkali dipaksakan sehingga tidak jarang usia perkawinan mereka hanya sebentar. Wawancara dengan bapak Suhaimi tanggal 20 Agustus 2006.

pula pengelola kolong yang baru dan minat terhadap timah secara perlahan akan mulai berkurang. Dalam penertiban dan pemanfaatan kolong di masa yang akan datang maka selain dijadikan solusi alternatif perekonomian, pemerintah harus menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

I.2. Perumusan Masalah

Pulau Bangka memiliki sumber daya alam yang sangat bervariasi dan potensial untuk dikembangkan. Namun pengembangan yang dilakukan selama ini belum optimal sehingga diperlukan upaya pengelolaan yang tepat agar sumber daya tersebut mempunyai nilai ekonomi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bangka. Pengelolaan sumber daya (baik alam maupun manusia) di Bangka memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun para pelaku ekonomi yang terlibat. Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi dan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi komoditas dalam pembangunan ekonomi di Pulau Bangka dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Bagaimana kesiapan *hardware* (sumber daya manusia, sarana dan prasarana infrastruktur pendukung) dan *software* yang mendorong berkembangnya pembangunan ekonomi di Pulau Bangka?
3. Bagaimana menjadikan potensi-potensi sumber daya yang ada sebagai solusi alternatif dalam masalah pembangunan sosial-ekonomi di Pulau Bangka ?
4. Bagaimana cara pemanfaatan dan mekanisasi pemasaran produk industri kecil dapat dilakukan sehingga menjadi sebuah solusi alternatif perekonomian bagi masyarakat setempat?

I.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan:

1. Mengkaji prospek pariwisata yang berbasis masyarakat sebagai bagian dari solusi alternatif pembangunan ekonomi di Pulau Bangka.
2. Mengkaji peluang, kendala dan prospek perekonomian masyarakat di masa yang akan datang dalam rangka pengembangan industri pariwisata yang berbasis masyarakat sehingga dapat menjadi bagian dari solusi alternatif pembangunan ekonomi di Pulau Bangka.
3. Membuat estimasi dan menganalisa mekanisme pemasaran dari potensi-potensi yang akan dijadikan sebagai solusi alternatif pembangunan ekonomi di Pulau Bangka.
4. Menemukan dan menganalisa tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perairan Teluk Klabat setelah berkembangnya sektor industri perikanan dan pariwisata.

Sasaran :

1. Melihat dan mengkaji lebih dalam prospek pemanfaatan siput gunggung, rajungan, dan ikan laut.
2. Memahami mekanisme pemasaran produk industri kecil SDA kelautan dan pariwisata dan menemukan faktor apa yang akan mempengaruhi keberhasilannya.
3. Melihat prospek industri pariwisata sebagai sebuah solusi alternatif, menerapkan konsep wisata berbasis masyarakat serta menjelaskan kesiapan sumber daya manusia, prasarana dan sarana infrastruktur yang mendorong perkembangannya di Kabupaten Bangka.

4. Mempelajari dampak pariwisata bahari terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.
5. Saran strategis untuk menyeimbangkan antara pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
6. Melihat prospek industri pariwisata sebagai sebuah solusi alternatif, menerapkan konsep wisata berbasis masyarakat serta menjelaskan kesiapan sumber daya manusia, prasarana dan sarana infrastruktur yang mendorong perkembangannya di Kabupaten Bangka.

I.4. Metodologi Penelitian

I.4.1. Pendekatan dan Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang sifatnya interdisipliner dengan menggunakan metode analisa kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*). Pendekatan kuantitatif diharapkan dapat memprediksi dan membuat estimasi sejauh mana pemanfaatan dan pembangunan industri SDA laut serta industri pariwisata dapat diharapkan sebagai solusi alternatif bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara pendekatan kualitatif diharapkan makin memperkaya informasi yang diperoleh sehingga analisa sosial ekonomi tidak hanya pada tataran wacana. Selanjutnya, guna memperoleh hasil yang baik maka studi ini juga mempergunakan pendekatan interdisipliner mengingat fenomena yang muncul dalam persoalan

pembangunan yang sangat beragam. Ahli ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelautan yang dapat menunjang keberhasilan dari studi ini. Studi ini juga akan lebih fokus pada persoalan ekonomi sehingga sangat diperlukan keterlibatan ahli ekonomi untuk mendapatkan gambaran mengenai prospek pengembangan sumberdaya laut (ikan, siput gunggung, rajungan dan sebagainya). Analisis sosial dapat membantu melihat seberapa jauh produk-produk yang dihasilkan tersebut membantu kesejahteraan masyarakat dan bermamfaat secara akurat di dalam membantu percepatan pembangunan. Analisis lingkungan akan membantu memprediksi keberlanjutan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat terus dimanfaatkan secara optimal.

Pengumpulan data dilakukan dengan dengan dua cara yaitu menggunakan data-data kepustakaan dan kedua dengan riset lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data sekunder dan studi-studi yang telah dihasilkan mengenai pariwisata umumnya dan pariwisata bahari khususnya. Penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dalam 2 cara yaitu, melakukan wawancara dengan mempergunakan kuesioner (daftar pertanyaan terstruktur). Pemilihan sampel akan dilakukan secara *purposive sampling*. Selanjutnya untuk memperkuat analisis kualitatif maka dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group discussion (FGD)* yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut yang menjadi komoditas andalan perekonomian Provinsi Bangka Belitung. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, budayawan dan juga pihak swasta.

1.4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini sudah dilakukan selama 2 tahun (2006-2007) di Pulau Bangka khususnya Kabupaten Bangka. Pemilihan lokasi Pulau Bangka mengingat akan pentingnya Pulau Bangka bagi Provinsi Bangka Belitung. Hal ini dilakukan mengingat potensi SDA untuk pengembangan industri wisata lebih banyak terdapat di Pulau Bangka dan SDM yang tersedia juga lebih siap dibandingkan dengan Pulau Belitung. Tahun *pertama* penelitian ini melakukan identifikasi potensi SDA dan SDM yang ada dan kemudian mengkaji prospek pengembangannya (khususnya wisata bahari) ke depan. Walaupun pariwisata dapat dijadikan solusi alternatif perekonomian masyarakat namun ada sektor lain yang lebih dahulu dapat dimamfaatkan. Kesiapan pemerintah daerah dan juga masyarakatnya sangat penting untuk diketahui. Oleh karena itu lokasi pada tahun kedua ini lebih diperkecil yaitu wilayah Kabupaten Bangka. Pada tahun kedua penelitian ini lebih menitikberatkan pada pencarian lokasi dan memetakan wilayah mana yang memungkinkan untuk berkembangnya industri pengolahan potensi sumberdaya laut yang memiliki prospek untuk pembangunan sosial-ekonomi sebagai solusi alternatif perekonomian masyarakat di Pulau Bangka. Studi ini akan memanfaatkan hasil studi yang sudah dilakukan oleh tim peneliti LIPI lainnya (yang kompeten dalam bidangnya) agar hasil yang diperoleh menjadi lebih baik.

1.5. Kerangka Konseptual

Beranjak dari beberapa studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, studi ini pada tahun pertama mencoba melakukan studi tentang pariwisata dan lingkungan yang berkelanjutan. Sumber

Daya Alam Laut (SDA kelautan) atau lingkungan dalam pengembangan wisata bahari merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk menarik para wisatawan untuk mengunjungi daerah pengembangan wisata. Pengelolaan aset wisata secara optimal akan dapat meningkatkan ekonomi baik untuk daerah maupun masyarakatnya. Karena pengembangan pariwisata mempunyai *multiplier effects* berupa tumbuhnya sektor lain seperti sektor perhotelan, transportasi dan komunikasi serta jasa dan restoran yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Pada prinsipnya tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis sejauh mana sektor pariwisata dapat diandalkan sebagai solusi alternatif ekonomi di provinsi baru ini. Kesimpulan awal dari studi tersebut kemudian menyimpulkan bahwa pariwisata dapat dijadikan solusi alternatif perekonomian masyarakat namun tidaklah dalam jangka waktu yang cepat. Ada sektor lain yang lebih mampu dijadikan solusi alternatif yaitu industri kecil di bidang pengolahan dan pemanfaatan SDA laut (siput gunggung, ikan dan rajungan). Percepatan pembangunan provinsi ini dapat terjadi jika industri kecil dapat berkembang dan pariwisata menjadi salah satu alat untuk membuka jaringannya (*networking*). Dalam hal ini maka perlu adanya pemahaman yang mendalam akan pentingnya memahami masalah modal sosial (*social capital*).

Modal sosial, pada waktu pertama kali dicetuskan oleh Coleman dan Bourdieu penggunaannya lebih terbatas dan hanya menjadi sebuah konsep akademis. Namun dalam perkembangannya menjadi konsep sosiologis yang dapat dipergunakan dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi. Sebagaimana akan halnya modal ekonomi, seperti SDA, SDM dan Teknologi, modal sosial juga merupakan modal yang dapat memberikan manfaat kepada yang memilikinya (Zaenuddin, 2005: 11-13).

Menurut Peter Evans⁶ ada beberapa variabel yang dapat dipakai untuk mengukur modal sosial yaitu, kepercayaan (*trust*), keanggotaan dalam kelompok formal dan informal dan penerimaan terhadap aturan maupun norma. Menurutny, semakin banyak orang-orang yang menjadi anggota dalam sebuah kelompok usaha akan semakin banyak yang akan aktif dalam komuniti, membuat kerjasama serta mampu mempergunakan teknologi maka pendapatan pun akan meningkat. Jika kelompok nelayan berhasil memanfaatkan SDA laut secara bersama-sama dalam kelompok, kemudian mengatur mereka dalam norma dan saling mempercayai maka jaringan dapat dibangun. Hal inilah yang sangat membantu dalam perbaikan perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah yang kaya dengan SDA tetapi miskin dalam SDM. Pada era otonomi saat ini, peran pemerintah adalah membantu penguatan kesejahteraan masyarakat lokal. Misalnya menjadi fasilitator dan membantu kelompok dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu pembentukan sumber daya manusia yang baik serta memiliki yang jiwa inventif dan inovatif dalam kelompok masyarakat menjadi sangat penting untuk selanjutnya membantu proses percepatan pembangunan di daerah.

Hal tersebut sesuai dengan teori pembangunan yang dikemukakan oleh *Shumpeter* yang menjelaskan pentingnya peranan pengusaha dalam pembangunan ekonomi itu sendiri (Sukirno, Sadono, 1985: 280). Dimulai dengan adanya inisiatif dari seseorang atau lebih yang dapat dikatakan memiliki jiwa

⁶ Peter Evans adalah salah seorang ahli yang diperbantukan dalam World Bank terutama karena pemikirannya tentang *social capital*. Dia banyak melakukan penelitian di kawasan Asia Timur/Selatan dan Amerika Latin terutama mengenai faktor sinergi dalam *social capital*. Lebih detail lihat dalam Evan, Peter, 1996, "Government Action, Social Capital and Development: Reviewing the Evidence on Synergy" World Development, hal 1119-1132.

enterpreanurship untuk melakukan pembaharuan, yang selanjutnya diikuti oleh banyak orang lain karena menyadari dengan adanya jiwa tersebut mendorong orang tersebut menjadi inventif dan inovatif yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan. Dengan demikian akan menciptakan banyak kegiatan penanaman modal yang mengakibatkan tingginya tingkat kegiatan ekonomi. Tingginya kegiatan ekonomi akan membawa roda perekonomian berjalan dengan cepat yang selanjutnya akan meningkatkan pembangunan ekonomi.

Tujuan pokok pembangunan ekonomi adalah untuk pembentukan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di segala bidang. Dengan kata lain hakikat pembangunan ekonomi adalah untuk penciptaan modal *overhead* sosial ekonomi. Menurut Nurkse, lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat diputuskan melalui pembentukan modal (Jhingan, M.L, 1990; 23). Pembentukan modal tersebut akan menghasilkan kenaikan besarnya *output* nasional yang kemudian membawa pada kenaikan pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja. Dengan demikian masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, inflasi dan neraca pembayaran dapat diatasi.

Pembangunan sosial ekonomi sangat diperlukan demi terciptanya kesejahteraan secara keseluruhan dan merata, oleh karena itu pembangunan tersebut harus dimulai dari bawah. Menurut Todaro, seiring dengan hal tersebut kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan pengangguran merupakan masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara berkembang (Todaro, 1997; 65). Konsep pembangunan dengan teori yang konvensional telah gagal untuk diimplementasikan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut Walton (1996), gagalnya teori konvensional tersebut, terlihat dari argumentasi *Trickle down*

effect yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah pembangunan telah kehilangan kredibilitasnya. Oleh karena itu, pembangunan harus dimulai dari bawah ke atas (*bottom up*). Jadi penggalakkan industri kecil yang dilakoni oleh masyarakat dapat menjadi konsep yang dapat digunakan sebagai upaya menggerakkan perekonomian dari level *grass root*.

Dalam konteks studi ini juga akan menggunakan teori pariwisata yang berkelanjutan yang merupakan modifikasi dari teori pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Terdapat berbagai konsep tentang pembangunan yang berkelanjutan antara lain diungkapkan oleh Chamber (1988), memberikan definisi yang difokuskan pada kehidupan dan keamanan. Kehidupan yang berkelanjutan karena adanya pasokan bahan makanan dan kebutuhan primer lainnya sedangkan keamanan karena adanya akses untuk menyambung kehidupan seperti akses untuk memiliki sumber seperti pekerjaan dan lainnya. Barbier (1989) menyatakan bahwa terdapat 3 indikator yang saling berkaitan yaitu biologi, ekonomi dan sosial. Ketiganya harus berinteraksi secara optimal melalui proses yang dinamis dan adaptif. Namun pada dasarnya terdapat 3 prinsip utama yang dikembangkan dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, yaitu secara ekonomi menguntungkan (*economically valuable*), secara sosial dapat diterima (*socially acceptable*) dan sumberdaya alam yang digunakan/dikembangkan dapat berkelanjutan (*environmentally sustainable*) (Meneg LH, 1993).

Pariwisata bukanlah suatu industri yang berdiri sendiri tetapi serangkaian industri yang menghasilkan jasa pelayanan dan pengeluaran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini bukan saja dalam hal jasa pelayanan yang diberikan, tetapi juga berhubungan dengan besarnya industri itu sendiri,

tempat, lokasi, keadaan sekitarnya, fungsi organisasi yang mengelolanya dan cara-cara pemasarannya⁷. Menurut G.A. Schmoll dalam bukunya *Tourism Promotion* (sebagaimana dikutip Oka A. Yoeti, 1988, 1 dan Abdurrahman, Sukri, 2002,86) yang dimaksud dengan industri pariwisata *adalah suatu industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dalam ukuran, tempat, tugas, jenis organisasi, deretan jasa pelayanan yang diberikan dan cara yang digunakan untuk memasarkan dan menjualnya*⁸. Sementara UU No 9 tahun 1990, menyatakan bahwa pariwisata *adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut*⁹.

Pariwisata yang layak untuk dikembangkan adalah industri pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata yang berkelanjutan merupakan modifikasi dari teori pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Terdapat 3 indikator yang saling berkaitan dalam pembangunan yang berkelanjutan yaitu biologi, ekonomi dan sosial. Ketiganya harus berinteraksi secara optimal melalui proses yang dinamis dan adaptif. Namun pada dasarnya terdapat 3 prinsip utama yang dikembangkan dalam konsep

⁷ Studi-studi tentang pariwisata dan permasalahannya, sudah banyak dilakukan termasuk oleh tim peneliti PSDR-LIPI. Tim peneliti PSDR melakukan studi tentang perkembangan pariwisata pada beberapa negara di Asia Tenggara. Pariwisata ternyata tidak mungkin dapat berkembang jika tidak ada dorongan dari sektor lain. Lihat dalam Maunati, 2002, *Pariwisata Etnik/Budaya dan Identitas Komunitas Lokal di Malaysia*, Jakarta, PSDR-LIPI: hal 86.

⁸ *Ibid*: hal 86

⁹ Definisi penting lainnya tentang hal yang terkait dengan sektor pariwisata juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan lainnya. Apa saja yang menjadi syarat penting pariwisata dapat dibangun juga menjadi hal yang diatur oleh undang-undang. Setia, Tunggal, 1999, *Peraturan Perundang-Undangan Kepariwisataaan di Indonesia*, Jakarta, Harvarindo, hal 2.

pembangunan yang berkelanjutan, yaitu secara ekonomi menguntungkan (*economically valuable*), secara sosial dapat diterima (*socially acceptable*) dan sumberdaya alam yang digunakan/dikembangkan dapat berkelanjutan (*environmentally sustainable*).

Merujuk pendapat Yakin (1997: 25) diketahui bahwa pembangunan yang berkelanjutan mempunyai ciri-ciri, *pertama*, pertumbuhan ekonomi dan distribusinya harus berjalan selaras. *Kedua*, pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan tersebut harus diikuti dengan upaya pelestarian lingkungan dan atau mempertahankan kemampuan sumberdaya. *Ketiga*, distribusi hasil pembangunan tersebut harus berlangsung secara adil baik dalam dimensi ruang lingkup (wilayah yang kecil, regional maupun global) maupun dalam dimensi waktu (bermanfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang). Terakhir adalah pembangunan harus menjamin tersedianya kondisi sosial ekonomi, budaya, keamanan, bagi masyarakat serta terjaganya kualitas lingkungan dalam dimensi ruang dan waktu.

Selain itu pembangunan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk pembentukan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di segala bidang. Dengan kata lain hakikat pembangunan ekonomi adalah untuk penciptaan modal *overhead* sosial ekonomi. Menurut *Nurkse*, lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat diputuskan melalui pembentukan modal (Todaro, 1977; 16). Pembentukan modal tersebut akan menghasilkan kenaikan besarnya *output* nasional yang kemudian membawa pada kenaikan pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja. Dengan demikian masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, inflasi dan neraca pembayaran dapat diatasi.

Pembangunan sosial ekonomi sangat diperlukan demi terciptanya kesejahteraan secara keseluruhan dan merata, oleh karena itu pembangunan tersebut harus dimulai dari bawah. Menurut Todaro, seiring dengan hal tersebut kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan pengangguran merupakan masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara berkembang. Konsep pembangunan dengan teori yang konvensional telah gagal untuk diimplementasikan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut Walton (1996), kegagalan teori konvensional tersebut, terlihat dari argumentasi *Trickle down effect* yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah pembangunan telah kehilangan kredibilitasnya (Walton, J, 1996; 23). Oleh karena itu, pembangunan harus dimulai dari bawah ke atas (*bottom up*). Jadi penggalakan industri kecil yang dilakoni oleh masyarakat dapat menjadi konsep yang dapat digunakan sebagai upaya menggerakkan perekonomian dari level *grass root*.

Dengan menggalakan pariwisata akan memberikan *multiplier effect* terutama dalam konteks kesejahteraan masyarakat. Semakin majunya pariwisata di suatu daerah akan semakin tinggi intensitas munculnya perusahaan-perusahaan yang membentuk industri yang mendukung pariwisata tersebut. Industri ini yang kemudian dikatakan sebagai industri pariwisata yang selanjutnya akan memberikan dampak ekonomi. Hal ini sejalan dengan Bennet, Roe dan Ashley (1994), yang menjelaskan dampak tak langsung yang diberikan oleh industri pariwisata seperti pengurangan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja tak langsung (seperti tenaga kerah biru, pembuat souvenir dan lain-lain), memiliki hubungan dengan industri-industri kecil. Jadi jelas bahwa industri pariwisata memberikan *multiplier effect* pada sektor-sektor lain yang bertujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat.

Apabila secara ekonomi telah menguntungkan dan secara sosial sudah dapat diterima maka selanjutnya harus memperhatikan isu-isu negatif baik di lingkup politik, sosial budaya dan ekonomi yang juga muncul dari industri pariwisata. Menurut Sunaryo (2000), interaksi dan perubahan sosial pariwisata secara sosiologis terdiri atas tiga interaksi yaitu interaksi bisnis, interaksi politik dan interaksi kultural. Interaksi bisnis adalah interaksi di mana kegiatan ekonomi yang menjadi basis materialnya dan ukuran-ukuran yang digunakannya adalah ukuran-ukuran yang bersifat ekonomi. Interaksi politik adalah interaksi di mana hubungan budaya dapat membuat ketergantungan dari satu budaya terhadap budaya lain atau dengan kata lain dapat menimbulkan ketergantungan suatu bangsa terhadap bangsa lain yang dipicu oleh kegiatan persentuhan aktivitas pariwisata dengan aktivitas eksistensial sebuah negara. Sedangkan interaksi kultural adalah suatu bentuk hubungan di mana basis sosial budaya yang menjadi modalnya. Dalam dimensi interaksi kultural dimungkinkan adanya pertemuan antara dua atau lebih warga dari pendukung unsur kebudayaan yang berbeda. Pertemuan ini mengakibatkan saling sentuh, saling pengaruh dan saling memperkuat sehingga bisa terbentuk suatu kebudayaan baru, tanpa mengabaikan keberadaan interaksi bisnis dan interaksi politik.

Untuk itu maka perlu memperhatikan pendekatan manajemen pariwisata berkelanjutan. Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, haruslah didasarkan pula pada prinsip-prinsip global dari pembangunan berkelanjutan. Semua kegiatan pengaturan suatu daerah tujuan seharusnya mempertimbangkan (merupakan) bagian dari nilai pembangunan berkelanjutan. *National Geographic Online* dalam *The Global Development Research Center* (2002) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai berikut:

1. Pariwisata yang memberikan penerangan. Wisatawan tidak hanya belajar tentang kunjungan (negara/daerah yang dikunjungi) tetapi juga belajar bagaimana menyokong kelangsungan karakter (negara/daerah yang dikunjungi) selama dalam perjalanan mereka. Sehingga masyarakat yang dikunjungi dapat belajar (mengetahui) bahwa kebiasaan dan sesuatu yang sudah biasa dapat menarik dan dihargai oleh wisatawan;
2. Pariwisata yang mendukung keutuhan (integritas) dari tempat tujuan. Pengunjung memahami dan mencari usaha yang dapat menegaskan karakter tempat tujuan wisata mengenai hal arsitektur, masakan, warisan, estetika dan ekologi;
3. Pariwisata yang menguntungkan masyarakat setempat. Pengusaha pariwisata melakukan kegiatan yang terbaik untuk mempekerjakan dan melatih masyarakat lokal, membeli persediaan-persediaan lokal, dan menggunakan jasa-jasa yang dihasilkan dari masyarakat lokal;
4. Pariwisata yang melindungi sumber daya alam. Dalam pariwisata ini wisatawan menyadari dan berusaha untuk meminimalisasi polusi, konsumsi energi, penggunaan air, bahan kimia dan penerangan di malam hari;
5. Pariwisata yang menghormati budaya dan tradisi. Wisatawan belajar dan melihat tata cara lokal termasuk menggunakan sedikit kata-kata sopan dari bahasa lokal. Masyarakat lokal belajar bagaimana memperlakukan/menghadapi harapan wisatawan yang mungkin berbeda dari harapan yang mereka punya;
6. Pariwisata ini tidak menyalahgunakan produk. *Stakeholder* mengantisipasi tekanan pembangunan (pariwisata) dan mengaplikasikan batas-batas dan teknik-teknik manajemen

untuk mencegah sindrom kehancuran (*loved to death*) dari lokasi wisata. *Stakeholder* bekerjasama untuk menjaga habitat alami dari tempattempat warisan budaya, pemandangan yang menarik dan budaya lokal;

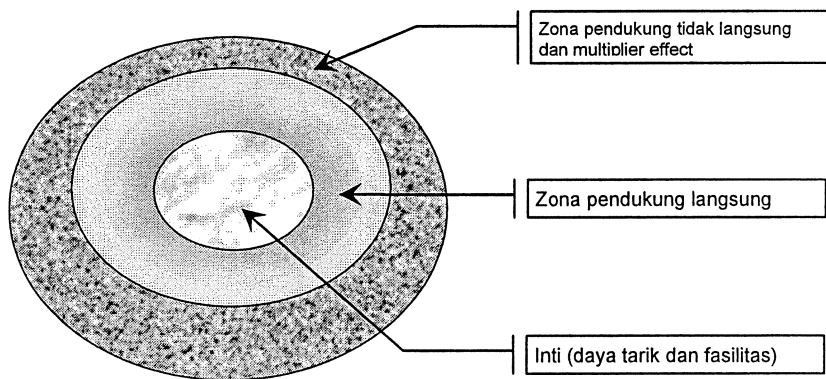
7. Pariwisata ini menekankan pada kualitas, bukan kuantitas (jumlah). Masyarakat menilai kesuksesan sektor pariwisata ini tidak dari jumlah kunjungan belaka tetapi dari lama tinggal, jumlah uang yang dibelanjakan, dan kualitas pengalaman yang diperoleh wisatawan;
8. Pariwisata ini merupakan perjalanan yang mengesankan. Kepuasan, kegembiraan pengunjung dibawa pulang (ke daerahnya) untuk kemudian disampaikan kepada teman-teman dan kerabatnya, sehingga mereka tertarik untuk memperoleh hal yang sama- hal ini secara terus menerus akan menyediakan kegiatan di lokasi tujuan wisata.

Sedangkan *Jamieson dan Noble* (2000) menuliskan beberapa prinsip penting dari pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu: (1) Pariwisata tersebut mempunyai prakarsa untuk membantu masyarakat agar dapat mempertahankan kontrol/pengawasan terhadap perkembangan pariwisata tersebut; (2) Pariwisata ini mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas kepada dan dari masyarakat setempat dan terdapat pertalian yang erat (yang harus dijaga) antara usaha lokal dan pariwisata; (3) Terdapat peraturan tentang perilaku yang disusun untuk wisatawan pada semua tingkatan (nasional, regional dan setempat) yang didasarkan pada standar kesepakatan internasional. Pedoman tentang operasi pariwisata, taksiran penilaian dampak pariwisata, pengawasan dari dampak komulatif pariwisata, dan ambang bata perubahan yang dapat diterima merupakan contoh peraturan yang harus disusun; (4) Terdapat program-program pendidikan dan

pelatihan untuk meningkatkan serta menjaga warisan budaya dan sumber daya alam yang ada.

Pandangan lain disampaikan oleh Murphy, dalam Tunjung (2004), bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi bentuk sikap masyarakat terhadap pariwisata:

- Hubungan penduduk dengan wisatawan
- Kepentingan industri terhadap kemakmuran individual dan masyarakat
- Toleransi masyarakat dalam menerima pembanguana pariwisata.



Gambar 1.1. Diagram Daerah Pariwisata (Model Smith)

Sumber: Tunjung (2004)

- ▶ Inti, mengandung daya tarik dan fasilitas yang membuat suatu wilayah menjadi daerah tujuan wisatawan.
- ▶ Zona pendukung langsung, menempatkan penduduk lokal dan berbagai fungsi yang dibutuhkan masyarakat. Terdiri dari

pertokoan, kantor-kantor pemerintahan dan rekreasi yang melayani penduduk ditambah jasa pendukung untuk industri pariwisata.

- ▶ Zona pendukung tidak langsung dari daerah pedalaman, dimana menyatukan daerah yang terkena dampak dan melibatkan investasi serta aktivitas yang berhubungan terhadap daerah setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar d atas.

Dalam pembangunan daerah Provinsi Bangka-Belitung yang karakteristik perekonomiannya lebih didominasi oleh keberadaan komoditas timah, menyisakan sederet persoalan yang saling kait-mengkait antara sektor bisnis, masyarakat dan pemerintah. Kasus pengrusakan kantor gubernur Provinsi Bangka Belitung misalnya, berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat atas penghentian tambang inkonvensional. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten menimbulkan ketidakpastian regulasi dan mendorong konflik antar instansi pemerintah (Zulkarnaen et.al., 2006). Kebijakan yang menetapkan pasir timah sebagai komoditi bebas menyebabkan pesatnya pertumbuhan tambang rakyat dan ekspor pasir timah berskala menengah dan kecil tanpa reklamasi lingkungan.

Namun dengan model penambangan ini masyarakat dan pemerintah lokal memperoleh pendapatan cukup besar dibandingkan jika hanya dikelola perusahaan besar seperti Kobatin dan PT. Timah, dan bahkan perusahaan besar mendapat pasokan pasir timah dari tambang kecil dan menengah ini. Saat harga timah membaik dan ada peningkatan ekspor saat itu pula datang kebijakan pelarangan tambang timah sehingga terjadi gerakan protes. Pengrusakan kantor gubernur oleh sejumlah orang lokal hanya merupakan ungkapan dan simbol resistensi masyarakat dan

pemerintah lokal terhadap pemerintah pusat atas ketimpangan pendapatan antara pusat dengan daerah dari hasil tambang timah (Prayogo, 2006).

Dampak dari resistensi lokal bukan hanya menghambat masuknya arus investasi asing melainkan juga ketimpangan sosial sehingga menjadi tanggung jawab korporasi untuk menanggulangi masalah ini melalui program CSRnya. Korporasi harus lebih beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat lokal, menghilangkan atau mengurangi dampak negatif (lingkungan dan sosial), dan lebih penting lagi menempatkan masyarakat lokal sebagai salah satu *primary stakeholdernya*.

Selanjutnya secara sosial pengembangan industri pariwisata ini, harus dapat diterima masyarakat. Dengan demikian konsep wisata bahari yang berbasis masyarakat sangat tepat untuk diterapkan di provinsi ini. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wisata bahari berbasis masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya wisata secara terpadu dengan memanfaatkan pendekatan dari bawah (*bottom-up*), sehingga aspirasi dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Dengan kata lain, bentuk dari penerimaan tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat terhadap perkembangan pariwisata di daerah. Bagaimana keterlibatan masyarakat mulai perencanaan sampai dengan partisipasi dalam berjalannya industri wisata serta evaluasi dan monitoringnya. Keberlangsungan dari aktifitas wisata ini pada akhirnya akan memberikan devisa bagi pemerintah dan mendorong pembangunan di daerah.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengembangan industri pariwisata ini harus memperhatikan lingkungan agar

berkelanjutan artinya dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan sumberdaya alam tidak lagi dinikmati oleh generasi selanjutnya harus dihindari. Selain merupakan *resources*, lingkungan sekaligus juga merupakan tempat kembalinya limbah, seperti sampah dan limbah lainnya. Untuk kasus wisata keindahan alam yang telah tersedia harus dipelihara. Kerusakan lingkungan dapat terjadi oleh kegiatan wisata itu sendiri maupun oleh kegiatan lain yang dapat mengganggu keberlanjutan lingkungan wisata.

I.6. Organisasi Penulisan

Buku ini disusun berdasarkan atas studi yang dilakukan di Provinsi Bangka Belitung dan memilih Pantai Tanjung Penyusuk di Perairan Teluk Klabat, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka sebagai objek pengamatan dari studi ini. Pemilihan Kabupaten Bangka sebagai lokasi penelitian adalah karena dari aspek kesiapan pemerintah daerah dalam pembangunan industri pariwisata, daerah ini dianggap paling siap dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan industri pariwisata dalam waktu dekat. Namun tidaklah tertutup kemungkinan daerah kabupaten lainnya untuk mengembangkan industri pariwisata, hanya saja diperlukan persiapan yang lebih lama karena belum masih minimnya berbagai sarana dan prasarana yang ada.

Buku ini terdiri dari tujuh bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang permasalahan, pendekatan analisis yang dipakai dalam penelitian ini dan organisasi penulisan. Pada bagian kedua, buku ini menjelaskan secara umum tentang gambaran umum Provinsi Bangka Belitung, baik secara geografi, demografi dan perekonomian. Namun titik sentral kajian

mengarah kepada wilayah Kabupaten Bangka. Kemudian di bagian ketiga, dibahas tentang persoalan pariwisata di era otonomi daerah. Persoalan apa yang akan menjadi kendala bagi pengembangan pariwisata jika dilihat dari sudut SDM dan perekonomian daerah. Pada bagian ke empat membahas persoalan yang terkait dengan kerusakan lingkungan akibat penambangan timah. Sejauh mana ini berdampak bagi pembangunan dan pengembangan industri pariwisata. Hal ini penting karena pariwisata memerlukan kelestarian lingkungan agar dapat menjaga kelestarian SDA yang sangat bermanfaat untuk pembangunan daerah. Di bagian kelima akan dibahas tentang persoalan ekonomi Provinsi Bangka Belitung umumnya dan Kabupaten Bangka khususnya. Bagian keenam, akan dibahas tentang industri apa saja yang dapat berkembang di Kabupaten Bangka terutama Kecamatan Belinyu. Hal ini penting mengingat pariwisata tidak akan berkembang jika tidak ada sektor industri yang mendorong pertumbuhannya. Pada bagian terakhir (bab ketujuh) menjadi bagian penutup dari buku ini yang berisi beberapa kesimpulan, rekomendasi dan saran dari tim penulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG

11.1. Pendahuluan

Kepulauan Bangka Belitung selain terkenal dengan kekayaan timah, juga dengan keindahan alam dan keragaman budayanya. Keindahan alam laut dilengkapi dengan keanekaragaman budaya masyarakat Bangka Belitung, jika dikemas dengan baik dan menarik, dapat dijadikan modal utama dalam pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata bahari berbasis masyarakat, yaitu pariwisata kelautan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat di dalamnya. Bangka merupakan kabupaten yang terus bergeliat, berusaha untuk membangun segi-segi kelemahan dengan mencari dan memperdayakan semua potensi yang dimiliki, baik di darat maupun di laut.

11.2. Topografi dan Demografi Bangka Belitung

Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Sumatra. Awalnya, Bangka Belitung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 pada tanggal 4 Desember 2000, Bangka Belitung resmi menjadi provinsi sendiri pada tanggal 9 Februari 2002 dan beribukota di Pangkal Pinang.

Provinsi Bangka Belitung dibatasi oleh Laut Natuna di sebelah utara yang terbentang pula Laut Cina Selatan. Selat

Karimata berada di sebelah timur; yang memisahkan Pulau Belitung dengan Pulau Kalimantan. Pulau Jawa berada di sebelah selatan dan Selat Bangka di sebelah barat. Selat Bangka ini memisahkan Pulau Bangka dengan Pulau Sumatra. Pulau Bangka dan Pulau Belitung sendiri dipisahkan oleh Selat Gempar.

Dengan posisi geografis pada $1^{\circ}50'$ - $3^{\circ}10'$ LS dan 105° - 108° BT dan luas wilayah sebesar $81.724,74$ Km², Provinsi Bangka Belitung dibagi dalam beberapa daerah administrasi yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang. Luas perairannya 65.301 Km², dengan panjang pantai 1.200 Km juga memiliki potensial tersendiri, salah satunya adalah terbukanya sektor-sektor industri di pinggir pantai termasuk industri pariwisata.

Dari beberapa kabupaten, maka Kabupaten Bangka merupakan wilayah yang sudah lebih berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kabupaten Bangka memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih $2.950,68$ Km² dan dibagi dalam 8 kecamatan yaitu: Mendo Barat, Merawang, Puding Besar, Sungailiat, Pemali, Bakam, Belinyu, dan Riau Silip. Jumlah penduduknya pada tahun 2003 adalah 217.545 jiwa. Wilayah kabupaten ini berbatasan dengan Laut Natuna di bagian utara dan di sebelah Selatan berbatasan dengan kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian di sebelah Timur berbatasan pula dengan Laut Natuna dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat, Selat Bangka, dan Teluk Klabat.

Bangka memiliki lima Kabupaten dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tertentu. Menurut sensus 2004, jumlah penduduk Bangka tiap kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel I1.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Tiap Kabupaten
pada Tahun 2004

Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Kec.	Desa	Kel.	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk (jiwa)
Bangka	Sungailiat	2.950,68	8	60	9	53.901	231.793
Bangka Barat	Mentok	2.890,61	5	53	4	32.832	140.323
Bangka Tengah	Koba	2.155,77	4	39	1	29.996	129.469
Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	5	45	3	34.775	147.039
Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	89,40	5	-	35	34.656	141.185
Total		11.693,54	27	197	52	186.160	789.809

Sumber: *Data BPS Provinsi Bangka-Belitung 2004*, dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bangka

Total penduduk di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2004 sebesar 1.012.655 jiwa. Sementara jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2004 menjadi sebesar 789.809 jiwa. Pada tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Bangka meliputi 245.012 orang terdiri dari 118.457 perempuan dan 126.855 laki-laki. Jumlah ini merupakan pasar lokal untuk bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka. Jumlah penduduk terbesar di Bangka adalah di daerah Kabupaten Bangka dengan jumlah keluarga sebanyak 53.901 rumah tangga. Sedangkan wilayah yang terpadat adalah Kotamadya Pangkal Pinang dengan 1.579 penduduk/Km². Pada tahun 2003, sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Sungailiat yaitu 379,13 jiwa/Km² dan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bakam, sebesar 30,81 jiwa/Km². Untuk perbandingan jumlah penduduk pria dan wanita di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 2

Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan,
di Kabupaten Bangka Tahun 2003

Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/Km ²)
Sungailiat	146,38	28.780	26.710	55.490	379,13
Bakam	488,10	7.117	7.921	15.038	134,18
Pemali	127,87	8.520	8.637	17.157	134,18
Merawang	164,40	12.017	12.967	24.984	151,97
Puding Besar	383,29	6.811	6.506	13.317	34,74
Mendo Barat	570,46	14.575	18.958	33.533	58,78
Belinyu	546,50	19.678	19.003	38.681	70,78
Riau Silip	523,68	9.715	9.630	19.345	36,94
Jumlah	2.950,68	107.213	110.332	217.545	74

Sumber: *Demografi Kabupaten Bangka*, <http://www.bangka.go.id/kependudukan.php>

Jika dilihat dari fasilitas dan infrastruktur, maka Kecamatan Sungailiat memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dan menarik dibandingkan kota lainnya. Kegiatan ekonomi dan sosial termasuk pemerintah juga banyak bergerak di Kecamatan Sungailiat dibandingkan Kota Pangkal Pinang sendiri, sehingga konsentrasi penduduk cukup besar di Kota Sungailiat. Sedangkan Kecamatan Belinyu berada pada posisi kedua dalam jumlah penduduk, namun luas wilayah yang cukup besar menyebabkan Kecamatan Belinyu tidak terlalu padat.

Dalam usaha mengembangkan ekonomi Kabupaten Bangka, maka Pemerintah Daerah Bangka berusaha menjalankan pembangunan pada enam sektor unggulan, yaitu pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata dan perindustrian. Enam sektor ini cukup berpotensi dalam pengembangan Pulau Bangka dan diharapkan dapat pula menarik investasi dalam dan

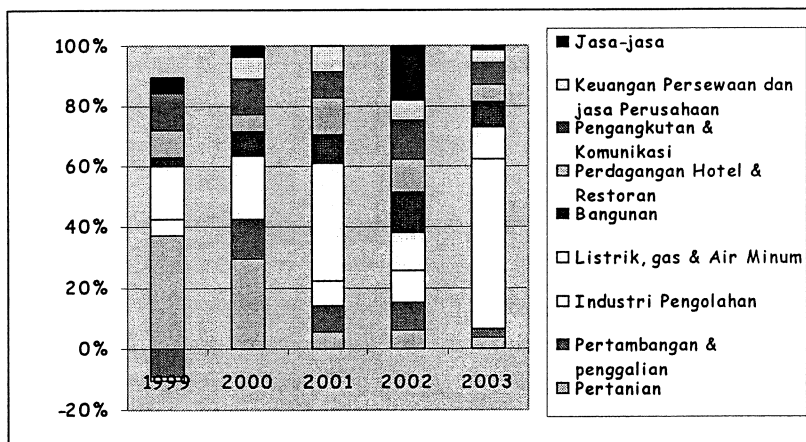
luar negeri. Pemerintah kabupaten Bangka pun telah berusaha memberikan dukungan berupa pemberian fasilitas informasi yang terbuka dan proses perizinan yang mudah dan efisien didukung pula dengan pembangunan infrastruktur yang memadai seperti perhubungan darat, laut, udara, ditambah fasilitas komunikasi, listrik, dan sebagainya (DKP, 2003).

II.3. Karakteristik Perekonomian Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi terbentuk pada tanggal 21 November 2000 dengan ibukota Pangkalpinang. Kabupaten Bangka merupakan kabupaten terluas kedua (2.950,68 km²) setelah Kabupaten Bangka Selatan (3.607,08 km²). Kabupaten ini memiliki 8 kecamatan dan 60 desa. Menurut data PDRB Kabupaten Bangka, sektor pertanian di kabupaten Bangka menjadi sektor utama penyumbang pendapatan terbesar di kabupaten Bangka ini. Terlihat bahwa sektor ini memberikan kontribusi rata-rata 31% antara periode 1999-2003. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian (18%) merupakan sektor penyumbang kedua setelah pertanian. Sektor perdagangan, Hotel dan Restourant juga menjadi salah satu kontributor yang cukup signifikan dalam struktur pendapatan regional di kabupaten ini dengan kontribusi 16% pada periode yang sama. Hal lain yang cukup menarik adalah kenaikan *trend* kontribusi sektor industri yang membaik sejak 4 tahun terakhir. Pada tahun 1999 sektor industri hanya menyumbang sekitar 8,5% akan tetapi naik menjadi 12,6% pada tahun 2004. Apabila sektor industri pengolahan ini diperkecil lagi tingkat cakupannya dalam struktur PDRB, terlihat jelas bahwa industri pengolahan logamlah yang mempunyai kontribusi paling besar dari sektor ini.

Akan tetapi apabila dilihat pertumbuhan ekonomi riil berdasarkan sektor, pada tahun 2003 justru industri pengolahan mempunyai pertumbuhan paling tinggi (62,81%). Nilainya mengalami kenaikan 11 kali lipat apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sektor lain seperti listrik, gas dan air minum, bangunan, transportasi dan komunikasi serta perdagangan Hotel dan restoran mengalami trend kenaikan. Pada sisi lain pertumbuhan sektor pertanian nilainya terus mengalami penurunan. Pada tahun 1999, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 20% akan tetapi anjlog menjadi 4,54% pada tahun 2003. Nasib yang sama juga dialami oleh sektor pertambangan. Hal ini terlihat jelas pada Gambar 1 di bawah ini.

Grafik II.1
Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi
Kabupaten Bangka tahun 1999-2003



Sumber: Bangka dalam Angka 2004

Berdasarkan paparan data di atas adalah secara agregat sektor pertanian dan pertambangan merupakan penyumbang terbesar bagi aliran modal daerah. Akan tetapi, keterbatasan dari sektor pertambangan sebagai *unrenewable resources* sudah menuai keterbatasannya. Hal ini secara tidak langsung membawa konsekuensi bagi para pelaku ekonomi untuk mencari alternatif sumber ekonomi baru atau mendiversifikasikan kegiatan ekonominya pada sektor potensial lainnya. Ini terlihat pada pertumbuhan industri pengolahan yang mengalami kenaikan pada beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain kabupaten ini mengalami masa transisi pergeseran industri primer ke industri sekunder. Masa ini apabila mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah tentunya akan membawa pengaruh yang positif pada pengembangan sektor ekonomi potensial lainnya. Hal ini tentunya membutuhkan kesiapan dan kualitas ketenagakerjaan dalam menghadapi pergeseran sektor ekonomi ini.

Selanjutnya dalam usaha mengembangkan ekonomi Kabupaten Bangka, maka Pemerintah Daerah Bangka berusaha menjalankan pembangunan pada enam sektor unggulan, yaitu pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata dan perindustrian. Enam sektor ini cukup berpotensi dalam pengembangan Pulau Bangka dan diharapkan dapat pula menarik investasi dalam dan luar negeri. Pemerintah Kabupaten Bangka pun telah berusaha memberikan dukungan berupa pemberian fasilitas informasi yang terbuka dan proses perizinan yang mudah dan efisien didukung pula dengan pembangunan infrastruktur yang memadai seperti perhubungan darat, laut, udara, ditambah fasilitas komunikasi, listrik, dan sebagainya (DKP, 2003).

II.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Bangka

Dalam bidang pendidikan, Kabupaten Bangka telah membangun prasarana pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di seluruh Kabupaten Bangka. Diharapkan usaha perbaikan kualitas manusia melalui pendidikan ini dapat membentuk SDM yang berkualitas dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka. Untuk jumlah sarana pendidikan dan status sekolah pada tahun 2004 dapat dilihat dari tabel berikut:

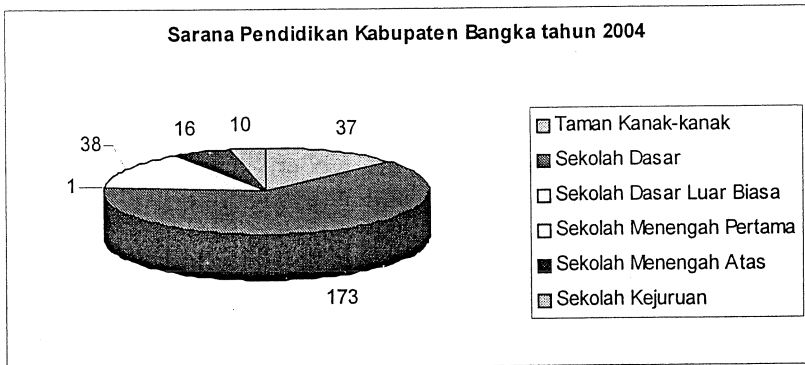
Tabel II.3
Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2004

<i>Tingkat Pendidikan</i>	<i>Negeri</i>	<i>Swasta</i>	<i>Jumlah</i>
Taman Kanak-kanak	1	36	37
Sekolah Dasar	162	11	173
Sekolah Dasar Luar Biasa	1	-	1
Sekolah Menengah Pertama	19	19	38
Sekolah Menengah Atas	6	10	16
Sekolah Kejuruan	3	7	10
Jumlah	192	83	275

Sumber: http://www.bangka.go.id/jml_pengajar_murid.htm

Grafik II.2

Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2004



Sumber: http://www.bangka.go.id/jml_pengajar_murid.htm

Dari tabel dan gambar di atas terlihat, bahwa sarana pendidikan untuk tingkat dasar telah cukup banyak tersedia di wilayah Kabupaten Bangka, sedangkan untuk sekolah kejuruan sangat terbatas yaitu berjumlah 10 buah untuk seluruh Kabupaten Bangka. Kebutuhan akan perguruan tinggi pun di Kabupaten Bangka juga mulai mendapat perhatian, yang sebelumnya, banyak pelajar Bangka yang menuntut ilmu di perguruan-perguruan tinggi di luar Kepulauan Bangka seperti ke Sumatera (Lampung, Palembang, Medan, dan sebagainya), Pulau Jawa dan lainnya. Hingga tahun 2003, Kabupaten Bangka memiliki empat lembaga Perguruan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Politeknik Manufaktur (Polman) Timah, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) dan Universitas Pahlawan Dua Belas (UNIPALAS).

Namun, pada tahun 2006, berdirilah Universitas Bangka Belitung (UBB) di Kota Pangkal Pinang. Universitas ini merupakan penggabungan dari tiga perguruan tinggi di atas, yang terkemuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Politeknik Manufaktur Timah (Polman), STIPER (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian) Bangka, dan STTP 12 (Sekolah Tinggi Teknik Pahlawan Dua Belas (UNIPALAS). Saat ini Universitas Bangka Belitung dalam proses untuk berstatus negeri. Keberadaan UBB di Provinsi Bangka Belitung merupakan suatu kebutuhan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan motto “Unggul Membangun Peradaban” UBB memiliki komitmen untuk menjadikan lembaga pendidikan unggulan baik intelektual, mental, dan moral untuk membangun peradaban lokal dan global.

Untuk sekolah khusus agama Islam atau Madrasah, Kabupaten Bangka telah menyediakan sarana pendidikan sekolah khusus agama ini dari tingkat dasar hingga menengah atau dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah untuk menengah atas yang seluruhnya berjumlah 27 buah. Jumlah sarana pendidikan agama pada tahun 2003 di Kabupaten Bangka, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Jumlah Sekolah Agama/Madrasah Tahun 2003

Madrasah	Negeri	Swasta	Jumlah
Madrasah Ibtidaiyah	1	7	8
Madrasah Tsanawiyah	2	12	14
Madrasah Aliyah	1	4	5

Sumber: http://www.bangka.go.id/jml_pengajar_murid.htm

Untuk jumlah murid yang sedang mengenyam pendidikan di Kabupaten Bangka menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka pada Tahun 2003 adalah sejumlah 45.816 siswa yang meliputi pendidikan dasar hingga menengah dan kejuruan yang meliputi sekolah berstatus negeri dan swasta.

Tabel II.5
Jumlah Murid di Kabupaten Bangka Tahun 2003

Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
Sekolah Dasar	27.450	1.867	29.407
Sekolah Menengah Pertama	6.819	1.923	8.742
Sekolah Menengah Atas	1.999	2.366	4.365
Sekolah Kejuruan			
Sekolah Teknik Mesin (STM)	-	315	315
Sekolah Menengah Ekonomi (SMEA)	815	2.172	2.987
Total			45.816

Sumber: *Ibid.*

Jumlah siswa yang besar tentunya harus diikuti oleh jumlah guru yang berimbang dan berkualitas untuk mencetak siswa-siswi yang handal dan berkualitas pula. Jumlah Guru yang tersedia di Kabupaten Bangka pada tahun 2003 adalah berjumlah 2.588 guru yang terdiri dari guru-guru tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas dan kejuruan baik sekolah negeri maupun swasta yang dapat dilihat pada tabel di bawah. Sedangkan jumlah dosen atau pengajar untuk kalangan perguruan tinggi pada tahun 2001 sebanyak 149 orang terdiri dari 105 dosen tidak tetap dan 44 orang dosen tetap.

Tabel II.6
Jumlah Guru Kabupaten Bangka Tahun 2003

Guru			
Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
Taman Kanak-kanak	-	-	117
Sekolah Dasar	1.465	83	1.548
Sekolah Dasar Luar Biasa	12	-	12
Sekolah Menengah Pertama	289	152	441
Sekolah Menengah Atas	97	147	224
Sekolah Kejuruan			
Sekolah Teknik Mesin (STM)	-	42	42
Sekolah Menengah Ekonomi (SMEA)	43	161	204
Jumlah Guru			2.588

Sumber: *Ibid.*

Dalam bidang pendidikan, saat ini Kabupaten Bangka telah berupaya membangun prasarana pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di seluruh Kabupaten Bangka. Untuk jumlah sarana pendidikan dan status sekolah pada tahun 2004 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.7
Sarana Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2004

Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
Taman Kanak-kanak	1	36	37
Sekolah Dasar	162	11	173
Sekolah Dasar Luar Biasa	1	-	1
Sekolah Menengah Pertama	19	19	38
Sekolah Menengah Atas	6	10	16
Sekolah Kejuruan	3	7	10
Jumlah	192	83	275

Sumber: http://www.bangka.go.id/jml_pengajar_murid.htm

Pada tahun 2006, berdirilah Universitas Bangka Belitung (UBB) di Kota Pangkal Pinang. Universitas ini merupakan penggabungan dari tiga perguruan tinggi di atas, yang terkemuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Politeknik Manufaktur Timah (Polman), STIPER (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian) Bangka, dan STTP 12 (Sekolah Tinggi Teknik Pahlawan Dua Belas (UNIPALAS)). Saat ini Universitas Bangka Belitung dalam proses untuk berstatus negeri. Keberadaan UBB di Provinsi Bangka Belitung merupakan suatu kebutuhan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan motto “Unggul Membangun Peradaban” UBB memiliki komitmen untuk menjadikan lembaga pendidikan unggulan baik intelektual, mental, dan moral untuk membangun peradaban lokal dan global.

II.5. Sumber Daya Alam (SDA)

II.5.1. Pertambangan

Bangka memiliki potensi sumber daya alam mineral yang besar. Sejak 1710, Bangka dikenal sebagai penghasil timah di dunia. Sejak tahun 1803, terjadi eksplotasi timah secara besar-besaran oleh Penjajah Belanda dan Inggris tanpa mengikutsertakan penduduk pribumi. Saat itu, telah terjadi pengurusan, pengangkutan, dan pengiriman timah secara masive ke luar Bangka dan Belitung oleh Belanda untuk kebutuhan negara-negara Eropa.

Dalam pertambangan, Bangka memiliki sumber-sumber mineral berupa timah dan galian golongan C lainnya seperti: Kaolin, Pasir Kuarsa, Pasir Bangunan, Batu Granit, Tanah Liat, dan Tanah Urug. Di mana Kaolin, banyak terdapat di Kecamatan Belinyu, Sungailiat, dan beberapa kecamatan lainnya. Kemudian Pasir

Kuarsa, banyak terdapat Belinyu, Riau Silip dan sekitar Kecamatan Sungailiat. Pasir Bangunan, terdapat hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka. Batu Granit, terdapat di Kecamatan Merawang dan Sungailiat; dan Tanah Liat, terdapat di Kecamatan Sungailiat dan Merawang Sedangkan luas daerah pertambangan untuk bahan galian Golongan C seluas adalah:

1. Kaolin 5.000 hektar.
2. Pasir Kuarsa 75.000 hektar
3. Pasir Bangunan 1.500 hektar
4. Batu Granit 1.500 hektar
5. Tanah Liat 5.000 hektar

Industri pertambangan yang berskala besar adalah seperti yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk. PT. Timah memiliki pengolahan dan pemurnian timah yang dikenal dengan sebutan smelter yang berada di Kecamatan Mentok. Bahan baku PT. Timah ini berasal dari Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat. Namun, usaha penambangan ini tidak bisa menjadi andalan dalam jangka waktu yang lama, meskipun sektor ini memberikan sumbangan yang cukup besar kedua (13,66 persen untuk total kegiatan ekonomi), karena dampaknya yang besar bagi lingkungan dan alam Bangka, terutama penambangan-penambangan yang dilakukan oleh penambang illegal.

Untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan Bangka dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka berupaya untuk memperdayakan semua potensi sumber daya alam yang ada dan cukup besar serta potensial yang tersedia di bumi Bangka ini. Potensi-potensi yang akan terus diupayakan pengembangannya adalah seperti usaha perikanan laut, pertanian, perkebunan sawit, kelapa, karet, jagung dan sebagainya, serta pertambangan di luar timah seperti granit dan pasir kuarsa.

II.5.2. Perikanan

Bangka disebut pula sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh pantai-pantai berpemandangan indah dan berair jernih serta landai, ditambah isi baharinya yang kaya akan biota laut. Hal ini menjadikan wilayah Bangka sangat potensial sebagai sumber perikanan. Terdapat beberapa wilayah sebagai tempat pendaratan ikan, seperti Sungailiat, Riau Silip, dan Belinyu. Sebagian besar nelayan masih menggunakan perahu kecil dengan PK yang rendah, sehingga jangkauan penangkapan ikan terbatas. Aktivitas penambangan timah, menyebabkan hasil perikanan nelayan di daerah ini cukup rendah, khususnya Kecamatan Belinyu.

Sistem penangkapan ikan juga dilakukan dengan cara yang tradisional. Namun begitu, sudah ada usaha-usaha peningkatan untuk mendukung usaha penangkapan ikan ini, seperti penggunaan perahu bermesin dan penggunaan lampu celup bawah. Pengembangan teknologi jaring apung dan keramba juga sudah mulai dikembangkan. Di samping terdapat pula industri pendukung perikanan seperti pabrik es, *cold storage*, industri pembekuan udang, dan cumi-cumi kualitas ekspor. Pada tahun 2003, terdapat 1.158 usaha penangkapan ikan di Pulau Bangka.

Bangka juga terus menggalakkan perikanan dengan budidaya air payau (tambak), seperti terdapat di daerah pesisir Merawang dan Belinyu. Ada pula usaha-usaha pendayagunaan bekas kolong-kolong untuk budidaya ikan hias yang masih terus dipelajari oleh sejumlah ahli. Ditambah industri rumah tangga yang berbahan baku hasil laut seperti siput gonggong, gentas, rusip, belacan, kerupuk, otak-otak, mpek-mpek, dan terasi. Di samping penangkapan ikan, pada tahun 2003 juga tercatat 163 usaha budidaya ikan air payau, 81 usaha pengolahan, dan 101 pengumpul.

Kabupaten Bangka melalui Dinas Perikananannya sedang berusaha mengembangkan jenis perikanan ikan kerapu dan udang yang berkualitas ekspor, ditambah pula dengan usaha rumput laut dan tepung ikan. Usaha budidaya ikan jenis kerapu ini cukup mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Bangka yang memiliki 2.165,5 hektar lahan untuk budidaya ikan kerapu dengan pembagian: perairan Pulau Burung (300 hektar), kawasan perairan Pulau Lepar (700 hektar), Kawasan perairan Pulau Panjang dan Pulau Semujur (112,5 hektar), Kawasan perairan Belinyu/Teluk Kelabat (750 hektar), dan Kawasan perairan Pulau Ketawai/Babuar (300 hektar).

Sedangkan untuk usaha budidaya udang, Kabupaten Bangka menyediakan lahan seluas 107.900 hektar yang meliputi wilayah: Sungailiat, Merawang, Pangkalan Baru dan Belinyu dan 200 hektarnya diusahakan oleh sebuah perusahaan tambak udang, PT. Lola Mina Merawang, yang menghasilkan produksi sebesar 167 ton per tahun. Untuk usaha budidaya rumput laut, Kabupaten Bangka memiliki 100 hektar area budidaya yang meliputi wilayah Sungailiat, Pulau Panjang, Pulau Babuar, dan lainnya.

II.5.3. Pertanian dan Perkebunan

Bangka juga terkenal dengan hasil perkebunannya seperti lada, karet, dan kelapa sawit. Hasil produk pangan di Bangka ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terutama setelah adanya penduduk lokal yang beralih dari penambang timah ke usaha pertanian dan perkebunan, walaupun masih sedikit yang konsisten dalam menggeluti usaha ini. Khusus Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, 75 persen penduduknya memperoleh pendapatan dari sektor perkebunan.

Untuk perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Bangka memiliki 1.320 hektar area perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh penduduk dan 43.100 hektar dikelola oleh swasta. Kelapa sawit merupakan salah satu jenis komoditi unggulan bagi perkebunan di Kabupaten Bangka dan Pemerintah Bangka telah mencadangkan area seluas 20.000 hektar bagi perkebunan perkebunan kelapa sawit ini yang tersebar di lima kecamatan. Usaha perkebunan karet, Kabupaten Bangka memiliki 13.000 hektar perkebunan rakyat. Sedangkan perkebunan lada, Bangka terkenal dengan lada putihnya. Perkebunan lada putih ini tersebar di lima kecamatan, seperti Kecamatan Tempilang dan Kelapa. Hasil lada putih ini dikirim ke Kota Pangkal Pinang untuk selanjutnya diekspor ke Eropa.

Selain lada, karet, kelapa sawit, Kabupaten Bangka sedang berupaya mengembangkan budidaya tanaman perkebunan lainnya yaitu jagung. Terdapat 140 hektar tanaman jagung yang usaha perkebunan ini bekerja sama dengan investor dari Korea. Perkebunan ini tersebar di Kecamatan Toboali, Payung, dan Air Gegas. Kabupaten Bangka juga akan mengusahakan penanaman tanaman jarak. Diharapkan buah jarak ini akan menjadi bahan dasar bagi energi penerangan dalam usaha memenuhi kebutuhan energi penerangan yang terbatas di Kepulauan Bangka.

Tabel II.8:
Hasil Produksi Pangan Kepulauan Bangka Tahun 2001-2004
(Ton)

Kabupaten	2001	2002	2003	2004
Bangka	16.430	10.317	12.173	18.764
Bangka Barat	5.231	3.615	5.556	10.456
Bangka Tengah	11.199	6.702	6.617	8.308
Bangka Selatan	1.112	931	2.053	3.199
Pangkal Pinang	313	286	312	702

Sumber: *BPS Kepulauan Bangka Belitung*, http://babel.bps.go.id/content/st_b01_01.htm

Kabupaten Bangka dengan delapan kecamatannya telah menghasilkan produk pangan terbesar bagi Provinsi Bangka. Produksi pangan yang dihasilkan oleh Kabupaten Bangka mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2004 sebesar 18.764 ton. Tahun 2002 cenderung menurun dari tahun sebelumnya, hal ini terutama setelah Pulau Bangka melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan hasil panen untuk tanaman padi sendiri pada tahun 2004 adalah:

Tabel II.9:
Hasil Tanaman Padi di Kepulauan Bangka

Kabupaten	Area Pertanian (Ha)	Hasil Rata-rata (Kuintal/Ha)	Produksi (Ton)
Bangka	2.213	19,82	4.387
Bangka Barat	275	18,51	509
Bangka Tengah	187	18,82	352
Bangka Selatan	4.087	29,02	11.860
Pangkal Pinang	-	-	-

Sumber: *BPS Kepulauan Bangka Belitung*

Hasil panen terbesar diperoleh oleh Kabupaten Bangka Selatan sebesar 11.860 ton, dengan luas daerah pertanian sebesar 4.087 hektar atau rata-rata sebesar 29,02 kuintal/hektar. Sedangkan rata-rata hasil pertanian yang lebih kecil adalah dari Kabupaten Bangka Barat 18,51 kuintal/hektar.

II.2.4. Kehutanan

Bangka juga memiliki kekayaan hutan yang potensial. Luas kawasan hutan yang dimiliki Bangka adalah 361.930 hektar atau 31,38 persen dari luas daratan Pulau Bangka. Jenis tanaman kayu yang berkembang di hutan Pulau Bangka adalah Kayu Nyato, Meranti, Medang, Perupuk, Terentang, Ketiau, Mengeris, Gerunggang, Jelutung, Bintanggor, Bunut, Rotan, Nipoli dan Rumbia. Kabupaten Bangka sendiri terus melakukan pembangunan kehutanan yang antara lain: (<http://www.infobangka.com/>)

- a. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan
- b. Menyiapkan perangkat lunak bidang kehutanan seperti Perda dan Keputusan Bupati
- c. Rehabilitasi, reboisasi, dan penghijauan hutan
- d. Pengaturan dan pemantauan kegiatan pemanfaatan hutan

BAB III

OTONOMI DAERAH, PEMEKARAN WILAYAH DAN INDUSTRI PARIWISATA DI KABUPATEN BANGKA

III. 1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi sudah berjalan selama lebih kurang 6 tahun yang menghasilkan berbagai perkembangan cukup signifikan. Namun, berbagai masalah masih harus segera dituntaskan khususnya dalam pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pada prinsipnya merupakan upaya terencana guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Di samping itu, otonomi daerah merupakan upaya memberdayakan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan, termasuk melakukan pemekaran wilayah administratif di daerah. Perbincangan diseputar wacana pemekaran wilayah (kabupaten/kota dan provinsi), akhir-

akhir ini merupakan salah satu tema politik yang mengemuka di masyarakat terutama pada masyarakat di provinsi-provinsi baru. Pergolakan seputar diskursus tentang pemekaran wilayah bahkan sudah sangat mengkristal dan mewacana dengan cepat, tajam, dan menimbulkan friksi politik yang keras. Harus kita akui, bahwa ramainya perbincangan meyangkut tentang pemekaran wilayah ini, sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan kuat dari masyarakat lokal untuk mengadakan perubahan.

Kemudian timbul pertanyaan, apakah pemekaran wilayah adalah langkah yang tidak terpisahkan atau setidaknya didasarkan kepada keinginan untuk mensejahterakan rakyat? Atau apakah ini justru isu yang hanya permainan politik dari elit politik yang berkicau pada saat kampanye politik pada pemilu yang lalu. Namun, setidaknya menurut persoalan dan wacana tentang pemekaran wilayah ini memang patut dikritisi meskipun isu tentang kesejahteraan rakyat mulai dilekatkan cukup kuat di dalamnya. Apakah dengan otonomi daerah dan pemekaran wilayah mampu membantu berkembangnya industri pariwisata di Provinsi Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka? Analisis tentang otonomi daerah dan pemekaran wilayah ini akan menjadi pondasi dasar bagi mendalamnya kajian tentang kepariwisataan sebagai salah satu program unggulan pemerintah di daerah ini.

III.2. Sekilas Tentang Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Di Era reformasi atau tepatnya setelah kejatuhan presiden Soeharto, kemudian memunculkan Habibie sebagai penggantinya, ada banyak perubahan penting yang terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu hal yang penting untuk di catat

adalah lahirnya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan baru ini, pada mulanya disambut dan diterima baik oleh warga masyarakat. Otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah untuk lebih berkuasa dan berwenang mengatur tata pemerintahan dan keuangan dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang dikehendaki.

Kebijakan baru tentang Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam UU 22/1999 diharapkan mampu memberikan bentuk baru bagi pola hubungan pusat-daerah. Selain itu diharapkan UU ini juga menghapuskan hierarki administrasi pemerintahan dan meletakkan pemerintahan provinsi sejajar dengan pemerintahan kabupaten/kota. Namun demikian pada kenyataannya, perubahan terhadap pola hubungan baru terlaksana setelah direvisinya UU 22/1999 dengan UU 32/2004. Dalam UU 22/1999, terlihat kecenderungan pola hubungan yang tidak seimbang antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah kabupaten/kota cenderung berhubungan langsung dengan pemerintah pusat, sehingga seringkali menjadi terabaikannya posisi dan peran pemerintah provinsi. Sementara dalam UU 32/2004, pola hubungan pusat-daerah cenderung lebih hierarkis karena menempatkan pemerintah provinsi tidak hanya sebagai daerah otonom, tetapi juga berperan sebagai pembina dan pengawas kabupaten/kota di wilayahnya, sehingga terlihat bahwa pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat atau *dekonsentrasi* yang kemudian diganti dengan istilah *desentralisasi*.

Definisi tentang desentralisasi ini beragam dan bervariasi, tidak ada yang tunggal. Namun pada prinsipnya konsep desentralisasi ini lebih mengarah pada persoalan administratif

pemerintahan dan politik. Berdasarkan perspektif administratif, *“desentralisation is the transfers of administrative responsibility from central to local government”*.. Menurut Parson, konsep desentralisasi ini lebih sering disebut sebagai *“sharing of power between members of the same ruling group having authority respectively in different areas of the state”*. Dalam perspektif politik, desentralisasi lebih sering dianggap sebagai pembagian kekuasaan antara pusat kepada daerah. *Decentralisation is the transfers of power, from top level to lower level in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a large organization* (Lili Romli, 2007; 4-5).

Menurut Niklas Luhman, desentralisasi adalah sebagai bagian dari teori sistem modern yang mengatur mekanisme kerja sistem menjadi lebih sederhana dan terarah. Dasar syarat fungsional dalam analisis Luhman adalah kebutuhan untuk mengurangi kompleksitas lingkungan dalam hubungannya dengan sebuah sistem tindakan yang saling berhubungan. Semua proses sosial dianalisis dengan menghargai fungsi-fungsinya untuk mengurangi kompleksitas dalam hubungan dan interaksi. Dengan kata lain, dengan desentralisasi maka masyarakat dan pemerintah di daerah mendapatkan kemudahan dalam memperoleh akses politik, ekonomi dan sebagainya. Penyederhanaan yang dibuat oleh sistem pemerintah melalui desentralisasi diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja pemerintah di daerah terutama dalam pelayanan publik. Esensi desentralisasi berdampak positif jika dilihat berdasarkan hubungan antara Pemerintah-Masyarakat. Tujuannya adalah untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan berdampak positif terhadap

peningkatan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu terus disempurnakan dengan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan tata pemerintahan. Bukan berarti memberikan kewenangan kepada daerah untuk melepaskan diri dari struktur pemerintahan pusat.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, adanya latar belakang demografi, geografi, infrastruktur dan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumberdaya yang berbeda, maka salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah keberagaman dalam hal kinerja pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Perbedaan kinerja selanjutnya akan menyebabkan kesenjangan antardaerah, timbulnya konflik dan kemungkinan disintegrasi bangsa.

Keinginan untuk daerah melepaskan diri dari pemerintah pusat (disintegrasi) bisa saja terjadi mengingat fenomena sosial ekonomi yang dialami oleh daerah ketika pada masa Orde Baru. Pemerintah daerah, yang sering disebut pemda Tingkat I dan Tingkat II, hanyalah agen pemerintah pusat tanpa kewenangan untuk mengatur kebijakan tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah sendiri. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah yang berdasar pada Undang-Undang No.25/1999, tidak ada pendapatan dari minyak dan gas bumi yang masuk kas pemerintah daerah. Ketidakpuasan daerah, misalnya Bangka Belitung semakin meningkat karena sumberdaya alam (timah dan lada) yang berada di dirampas pemerintah pusat, dan daerah itu sendiri ditinggalkan dalam keadaan miskin dan terbelakang. Untuk mengatasi ketidakpuasan daerah, Jakarta menyetujui pembentukan provinsi baru dan pelaksanaan otonomi daerah.

III.3. Persoalan Seputar Otonomi dan Pemekaran Wilayah di Pulau Bangka

Secara eksplisit didalam UU Otonomi Daerah Tahun 1999, memang telah dengan jelas diamanatkan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah adalah media untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. Pertama, otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. *Kedua*, melalui otonomi daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik. *Ketiga*, bagaimana otonomi daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan *responsiveness*, di mana publik berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Hal lain yang tidak kalah penting yang terkandung di dalam UU Otonomi Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang terdapat dalam pasal 2 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Oleh karena itu, agar pembentukan daerah otonom baru sesuai tujuan, harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.¹⁰

Seiring dengan pelaksanaan dan penerapan UU 22/1999 dan UU 25/1999, muncul fenomena yang menarik yaitu keinginan beberapa daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memisahkan diri dari daerah induk (pemekaran). Pertimbangan pemekaran ini pun bermacam-macam, antara lain disebabkan pertimbangan geografis dan jumlah kepadatan penduduk. Tidak

¹⁰ Waspada Online <http://www.waspada.co.id> akses 8 Oktober , 2007, 14:34

hanya itu saja, pada kenyataannya, persoalan pemekaran wilayah ini lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik para aparat pemerintah daerah. Jabatan-jabatan baru dan strategis sebagai efek dari pemekaran menjadi incaran banyak pihak. Bagi mereka yang memiliki ambisi ingin berkuasa, maka kesempatan mendapatkan jabatan baru itu terbuka lebar.

Bangka Belitung merupakan provinsi ke 31 dari Indonesia yang berdiri pada tanggal 21 November 2001 dalam UU No 27 tahun 2000.¹¹ Sejak melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi provinsi sendiri, wilayah kepulauan ini dibagi atas tiga wilayah pemerintahan yaitu Kabupaten Bangka Induk, Kabupaten Belitung dan Kotamadya Pangkal Pinang. Kemudian atas kesepakatan bersama, pada tahun 2004, dilakukan pemekaran wilayah. Wilayah Provinsi Bangka Belitung dipecah menjadi 7 wilayah, yaitu:

1. Wilayah Kabupaten Bangka dengan Ibukota Sungailiat.
2. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dengan Ibukota Koba
3. Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan Ibukota Toboali
4. Wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan Ibukota Muntok

¹¹ Dalam sejarah pembentukan Provinsi Bangka Belitung, aspirasi tahun 2000 bukanlah aspirasi yang pertama kali disampaikan kepada pemerintah pusat. Keinginan masyarakat Bangka untuk melepaskan diri dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan sudah dimulai pada tahun 1956, 1966, 1970 dan awal tahun 2000. Aspirasi tersebut disampaikan oleh semua lapisan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan pendapat para tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, cendekiawan, mahasiswa dan LSM. Melalui DPRD aspirasi tersebut dikukuhkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang serta DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Lihat dalam penjelasan umum UU No 27 Tahun 2001, yaitu undang-undang tentang pembentukan Provinsi Bangka Belitung.

5. Wilayah Kabupaten Belitung Induk dengan Ibukota Tanjung Pandan
6. Wilayah Kabupaten Belitung Timur dengan Ibukota Manggar
7. Wilayah Kotamadya Pangkal Pinang

Setelah pemekaran wilayah, maka wilayah kekuasaan pemerintah Kabupaten Bangka (biasa disebut Bangka Induk) berkurang. Data terakhir menyebutkan, Kabupaten Bangka mempunyai luas wilayah $\pm 2.950,68 \text{ Km}^2$, dengan jumlah penduduk tahun 2003 sebanyak 217.545 jiwa. Daerah ini memiliki tujuh kecamatan, dengan Kecamatan Mendo Barat sebagai kecamatan paling luas ($570,46 \text{ Km}^2$) dan Kecamatan Sungailiat sebagai kecamatan paling padat penduduknya (379,13 juta jiwa/ km^2).¹²

Pemekaran wilayah sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dengan demikian pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Sangat disayangkan kalau pemekaran wilayah diikuti oleh penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, baik untuk daerah yang baru terbentuk maupun daerah yang lama. Jangan sampai pemekaran wilayah menambah dan menciptakan beban baru bagi pemerintah daerah.

Pada kenyataannya, dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kajian yang sudah dilakukan oleh Wijaya Adi (2006) tentang dampak ekonomi pemekaran wilayah Provinsi Bangka Belitung memperlihatkan suatu kondisi yang memprihatinkan. Struktur perekonomian setelah 4 tahun

¹² <http://www.bangka.go.id/kependudukan.htm> diakses tanggal 8 Maret 2006

pemekaran, ternyata di sektor primer Provinsi Sumatera Selatan masih mampu menyumbang sebesar 48 % untuk PDRB daerah, sedangkan Provinsi Bangka Belitung hanya menyumbang sekitar 41 % untuk daerah. Persentase ini sebenarnya mengalami penurunan dari periode sebelum terjadi pemekaran. Sebelum pemekaran dan menjadi provinsi sendiri, Bangka Belitung menyumbang sekitar 42 % dan Sumatera Selatan menyumbang sebesar 50 % untuk PDRB daerah. Di sektor sekunder, perubahan juga terjadi. Pada tahun 2000, peran sektor sekunder adalah 27,1%, kemudian menurun menjadi 26,4 % di tahun 2004. Di sektor manufaktur Babel di awal tahun 2000 memberikan kontribusi sekitar 27 % dan menjadi 26% di tahun 2006. Sementara Sumsel tidak mengalami perubahan yaitu tetap 18 %, baik sebelum pemekaran maupun setelah pemekaran.¹³ Perubahan struktur perekonomian ini pada akhirnya juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga memperlihatkan bahwa ternyata sektor sekunder tidak cukup kuat untuk tumbuh di daerah yang baru. Padahal seharusnya jika sektor primer mengalami penurunan maka biasanya sektor sekunder harus mengalami kenaikan. Apa yang terjadi di Babel sangat berbeda, kedua sektor ini malah mengalami penurunan.¹⁴

Dari segi pendapatan per kapita, maka Bangka Belitung mengalami penurunan. Padahal pendapatan per kapita merupakan awal dari berbagai implikasi. Hasil perkiraan dari tim peneliti P2E-LIPI, menyebutkan bahwa PDRB Sumatera Selatan akan meningkat jika tidak terjadi pemekaran. Namun karena keduanya sudah berpisah, maka kecenderungannya adalah PDRB kedua provinsi

¹³ Lihat dalam Adi, Wijaya (2006), Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Propinsi di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Jakarta, P2E-LIPI, 123-125.

¹⁴ Wawancara dengan Wijaya Adi pada tanggal 1 Oktober 2007 di Jakarta.

ini menurun. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pendapatan per kapita masyarakat ikut mengalami penurunan. Menurunnya PDRB ini disebabkan karena terjadinya penurunan produksi daerah. Hal inilah yang menyebabkan atau memperlemah peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (lihat tabel III.1).¹⁵

Tabel: III.1

**PDRB Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung
(Atas Dasar Harga Konstan 1993, dalam Milyar Rupiah)**

Propinsi	2000	2001	2002	2003	2004
Sumatera Selatan	14.725	15.217	15.709	16.201	16.693
SumSel + Babel	13.893	14.219	14.768	14.451	16.119

Sumber: Hasil perhitungan Tim peneliti P2E-LIPI¹⁶

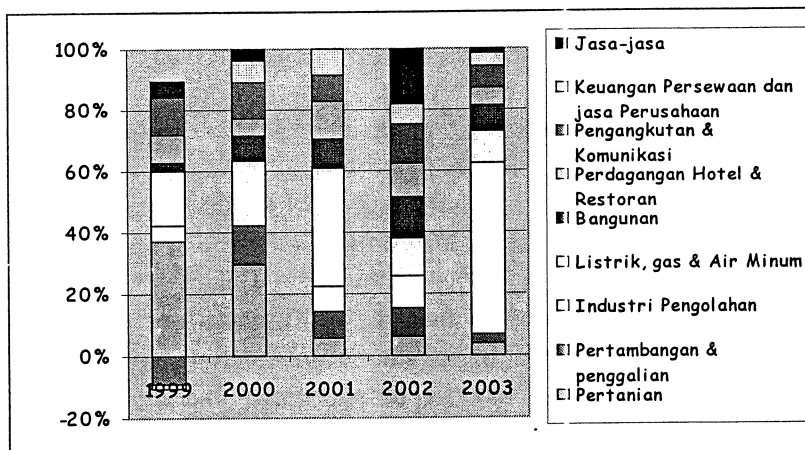
Pada sisi lain pertumbuhan sektor pertanian nilainya terus mengalami penurunan. Pada tahun 1999, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 20% akan tetapi anjlok menjadi 4,54% pada tahun 2003. Nasib yang sama juga dialami oleh sektor pertambangan. Berdasarkan data (lihat gambar di bawah) secara agregat sektor pertanian dan pertambangan merupakan

¹⁵ Menurut Wijaya, PDRB dalam batas-batas tertentu dapat dipandang sebagai pendapatan karena dapat dipandang sebagai akumulasi dari kekayaan dari masyarakat. Pendapatan per kapita di dapat dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Ketika pendapatan per kapita dibagi rata oleh penduduk maka pendapatan per kapita adalah cermin dari individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Adi, Wijaya (2006), Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Propinsi di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Jakarta, P2E-LIPI, 128-129.

¹⁶ Lihat dalam Adi, Wijaya (2006), Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Propinsi di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Jakarta, P2E-LIPI, 123-125

penyumbang terbesar bagi aliran modal daerah. Akan tetapi, keterbatasan dari sektor pertambangan sebagai *unrenewable resources* sudah menuai keterbatasannya.¹⁷ Hal ini secara tidak langsung membawa konsekuensi bagi para pelaku ekonomi untuk mencari alternatif sumber ekonomi baru atau mendiversifikasikan kegiatan ekonominya pada sektor potensial lainnya.

Grafik: III.1
Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi
Kabupaten Bangka Tahun 1999-2003



Sumber: Bangka dalam Angka 2004

Secara eksplisit, ternyata pemerintah Provinsi Bangka Belitung belum dapat mengambil manfaat secara ekonomi, dengan kata lain kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan. Hal ini bisa saja mengakibatkan ketidakmampuan daerah baru ini untuk mengambil manfaat dari keterlibatan dalam ekonomi global yaitu daya saing, produktivitas dan efisiensi. Oleh sebab itu, sasaran

¹⁷ Tim Pariwisata Bangka, PSDR-LIPI, 40.

strategis yang perlu dicapai secara simultan adalah meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, adanya intervensi kebijakan yang berpihak kepada kearifan lokal yang berbasis kewilayahan, serta strategi pembangunan yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektoral. Strategi ini diperlukan agar setiap wilayah dapat berkembang mencapai tingkat yang diinginkan melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya alam secara harmonis dengan pendekatan komprehensif yang memperhatikan keseimbangan fisik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.¹⁸

Kemudian yang juga harus segera dibenahi adalah persoalan di sektor pelayanan publik. Seharusnya pemerintah daerah menjadi petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat namun pada kenyataannya pemerintah melalui birokrasinya malah dilayani oleh masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena seorang birokrat di daerah memiliki status terhormat di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, berurusan dengan birokrasi di daerah sangat menyita waktu, tenaga dan uang, layanan yang berbelit-belit, dan lamban, terkadang cenderung terkesan dipersulit dalam prosesnya.¹⁹ Sementara itu kontrol terhadap birokrasi tidak

¹⁸ Laporan Hasil Kajian Direktorat Kewilayahan I, Bappenas Penyusunan Model Perencanaan Lintas Wilayah dan Lintas Sektor tahun 2004.

¹⁹ Barangkali tidak hanya birokrasi di daerah yang cenderung lama, mahal dan berbelit-belit, secara nasional, birokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang sama. Hal ini sangat mengganggu lalu lintas investasi di Indonesia, termasuk di daerah. Sekalipun beberapa daerah sudah memberikan pelayanan *one-stop-service*, namun secara agregat hasilnya belum tampak. Lihat dalam Jusmaliani, 2006, "Birokrasi dan Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi, dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol XIV (2), Jakarta, P2E-LIPI, hal 204.

ada karena lembaga yaitu Bawasda, dibentuk oleh pejabat di daerah dan berada dalam struktur pemerintahan daerah. Hal ini menyebabkan peranan Bawasda tidak signifikan (Lili Romli, 2007; iv). Dengan adanya otonomi daerah, desentralisasi, transisi demokrasi, maka perubahan seperti ini dapat menjadi momentum dalam melakukan perubahan di bidang birokrasi.

Selain itu kekacauan dalam birokrasi dikhawatirkan akan muncul mengingat terbatasnya jumlah SDM yang profesional di bidang ilmu pemerintahan. Selama bertahun-tahun Bangka Belitung berada di bawah bimbingan Sumatera Selatan dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan akan tenaga ahli di bidang ilmu pemerintahan semakin terasa setelah menjadi provinsi. Rasa sentimen dan tidak suka terhadap Palembang mendorong munculnya sikap menolak masuknya birokrat dari Sumatera Selatan. Santernya isu “putera daerah” malah makin memperparah kondisi kekurangan SDM di Bangka Belitung, terutama pasca pemekaran. SDM yang ada harus dibagi ke wilayah lain, bahkan posisi yang seharusnya dipegang oleh seorang tenaga ahli dalam ilmu pemerintahan atau yang kompeten di bidang yang dibawahinya sulit sekali ditemukan. Misalnya, saat ini, seorang kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, dipegang oleh seorang lulusan sarjana teknik sipil. Jabatan kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bangka masih saja kosong sampai bulan September 2007.

Persoalan demi persoalan tidak kunjung selesai, malah makin menambah beban pemerintah daerah baru ini. Apakah semua persoalan yang muncul mampu mendorong pemerintah daerah dan masyarakat Bangka Belitung untuk belajar dari kesalahan atau malah makin mempertajam rasa sentiment terhadap Sumatera Selatan? Keinginan untuk kembali menjadi satu dengan Sumatera

Selatan sudah tidak mungkin, maka jalan yang sebaiknya dilakukan adalah meminta tenaga bantuan dari pemerintah pusat (Jakarta) atau Sumatera Selatan untuk melakukan pembinaan dalam tata ilmu pemerintahan dan perekonomian.

III.4. Isu Pokok Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bangka Pasca Pemekaran

Sebagaimana diketahui dengan keluarnya paket kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas untuk mengurus kepada daerah kota dan kabupaten. Otonomi daerah juga merupakan upaya untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik dan maju. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bangka. Saat ini terdapat berbagai isu pokok dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka yaitu :

1. Masih minimnya kinerja dan orientasi pemerintah dan para birokratnya pada persoalan kesejahteraan masyarakat. Orientasi Pemda selama ini lebih cenderung kepada kepentingan mereka pribadi terutama pasca turunnya Perda N0.6 tahun 2001, tentang pengelolaan pertambangan timah. Perda memberikan kesempatan kepada penguasa daerah untuk turut serta ambil bagian dalam eksplorasi dan eksploitasi timah. Setelah pemekaran, banyak pihak berambisi untuk memiliki jabatan penting dalam pemerintahan, salah satu tujuannya agar mendapatkan kemudahan untuk akses langsung pada eksplorasi dan eksploitasi timah. Selain itu upaya untuk menguasai hasil sumber daya alam juga ditujukan untuk meningkatkan anggaran daerah semata, bukan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Masih memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap pusat.

Hal ini terlihat dari semakin tingginya nilai transfer dana bantuan dari pusat kepada daerah karena pendapatan asli daerah (PAD) masih belum mampu membantu percepatan pembangunan provinsi baru ini. Jika dilihat dari jumlah PAD yang dihasilkan, pada tahun 2003 PAD Kabupaten Bangka mencapai 43 milyar (kontribusi terbesar berasal dari timah). Bahkan untuk tahun 2002-2003, pemerintah Kabupaten Bangka memiliki tabungan sebesar 10 milyar.²⁰ Dana tabungan ini lebih banyak digunakan untuk membangun sekolah-sekolah dan perbaikan kantor pemerintahan. Sementara dana pembangunan jalan umum, pelayanan kesehatan publik masih mengharapkan dana bantuan dari pemerintah pusat. Berbagai alternatif sumber pembiayaan yang ada seperti pinjaman daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Pembentukan Provinsi Bangka Belitung juga memunculkan identitas Melayu Bangka dan kemungkinan terjadinya konflik kelompok etnis di Kabupaten Bangka. Pelaksanaan otonomi daerah memperkuat identitas 'putra daerah' yang mampu mencetuskan konflik di antara kelompok etnis yang satu dengan kelompok etnis yang lain di wilayah setempat. Penguatan identitas putra daerah itu terjadi akibat pelaksanaan otonomi daerah di berbagai wilayah di Indonesia.
4. Program-program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah mengalami stagnasi karena munculnya konflik kepentingan dalam struktur pemerintahan. Dualisme kepemimpinan ikut mempersulit situasi ini karena semua pihak tidak mau bertanggung jawab jika terjadi kegagalan. Bahkan

²⁰ Ibid, hal 109

ada beberapa posisi penting dalam pemerintahan yang belum terisi sehingga pelaksanaan program pembangunan belum terkoordinasi dengan baik, masih belum terlaksananya pembagian kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan, lemahnya manajemen kepegawaian, dan fungsi kontrol.

5. Pelayanan publik yang dilakukan selama ini oleh setiap tingkat pemerintahan belum efisien. Sistem pelayanan pemerintah daerah masih belum mendukung peningkatan mutu dan jangkauan layanan publik. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari berbagai permasalahan yang ada seperti belum berjalannya tugas pokok dan fungsi pelayanan secara optimal.²¹
6. Kearifan lokal (masyarakat) yang diharapkan menjadi penggerak dalam pengembangan industri pariwisata sangat kurang. Selain itu pengetahuan masyarakat tentang pariwisata masih terbatas sehingga minat mereka untuk bekerja di sektor ini masih kurang. Bahkan ada beberapa kawasan yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata ternyata dirusak oleh masyarakat dengan menjadikannya lahan tambang.

III.5. Pariwisata Pantai Penyusuk di Kabupaten Bangka

Hasil identifikasi potensi yang dilakukan beberapa pantai di kawasan, ternyata Kabupaten Bangka sudah lebih siap untuk mulai mengembangkan industri wisata pantai namun bukan wisata bahari secara utuh. Salah satu daerah kecamatan yang akan menjadi target pengembangan wisata bahari pemerintah lokal adalah Kecamatan Belinyu. Luas wilayah Belinyu adalah 105.558 ha

²¹ Laporan Hasil Kajian Direktorat Kewilayahan I, Bappenas Penyusunan Model Perencanaan Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Tahun 2004.

dengan jumlah penduduk di tahun 1999 sekitar 57.327 jiwa²² dan tahun 2004 berjumlah 37.468. Dari sisi kekayaan laut, perikanan laut di kawasan belinyu cukup beragam dan banyak jumlahnya. Melihat potensi yang cukup besar dimiliki oleh daerah ini, kemudian pemerintah berencana akan menjadikan wilayah ini sebagai kawasan industri perikanan, pelabuhan dan pariwisata. Kawasan Belinyu juga dijadikan sebagai kawasan tumbuh cepat dan berarti percepatan pembangunan antara lain dengan membuka jalur penyeberangan laut antar provinsi. Hal ini berarti akses untuk masuknya wisatawan sudah akan dibuka. Selain itu jarak tempuh menuju Sungai Liat (ibukota kabupaten) dan Pangkal Pinang juga relatif dekat yaitu sekitar 70 km. Salah satu pantai yang akan dikembangkan sebagai primadona pariwisata dan sebagai pendukung program perikanan terpadu adalah Pantai Tanjung Penyusuk yang terletak di Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Pantai ini berjarak kurang lebih 77 km dari Kota Sungailiat.

Dalam masa transisi sekarang ini, pemerintahan Kabupaten Bangka melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sudah mendelegasikan pelaksanaan pengelolaan pantai Tanjung Penyusuk kepada masyarakat setempat dalam wadah karang taruna. Ada sekitar 6 orang tokoh pemuda yang sudah ditunjuk menjadi tim pengelola bersama-sama dengan masyarakat setempat mengembangkan pariwisata Tanjung Penyusuk. Upah yang mereka terima diperoleh dari hasil retribusi wisatawan dan pedagang keliling. Penghasilan yang mereka dapatkan paling sedikit Rp.50.000 untuk satu orang setiap minggu. Hal ini cukup membantu

²² Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Kabupaten Bangka.

perekonomian meskipun tidak terlalu signifikan. Hasil yang agak besar bisa mereka peroleh ketika ada event-event tertentu di pantai, seperti acara kesenian (dangdut atau panggung hiburan) ataupun upacara Taber Laut (sembahyang laut oleh orang Cina).²³

III.6. Langkah Strategis Pengembangan Industri pariwisata vs Tantangan Budaya

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka hendaknya tidak terlepas dari arah pengembangan kebudayaan nasional maupun lokal. Dengan kata lain, dalam kebudayaan nasional dan daerah hendaknya menjadi landasan bagi kebijakan pengembangan pariwisata. Selanjutnya pengembangan pariwisata daerah harus didahului dengan pemahaman mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam perencanaannya. Tantangan yang harus diwaspadai, *Pertama*, dunia pariwisata masih selalu menghadapi tantangan berupa tuntutan dan selera wisatawan dan investor asing di bidang pariwisata yang tidak seiring dengan tujuan menjaga kelestarian unsur-unsur budaya masyarakat setempat. Untuk itu dituntut kewaspadaan dari Pemda dalam memadukan antara kemampuan daerah dan kebutuhan wisatawan. Kepentingan wisatawan tidak boleh terabaikan, namun sebaliknya, tuntutan dan minat pariwisata mereka pun tidak boleh merusak daya tarik utama daerah wisata, baik yang berupa ekologi, obyek-obyek wisata (termasuk peninggalan sejarah), adat istiadat serta kesenian setempat yang khas.²⁴

²³ Wawancara dengan bapak Suryadi, salah seorang pengelola Pantai Tanjung Penyusuk, pada tanggal 24 Juli 2007 di Belinyu.

²⁴ Hatta, Meutia Swasono, 2001, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Menjelang AFTA 2003, disampaikan dalam Seminar Pariwisata Indonesia “, Program D III Pariwisata FISIP UI, Jakarta 7 Maret 2001, hal 3.

Kedua, masih adanya kenyataan bahwa nilai tambah ekonomi dari pengembangan pariwisata lebih besar jatuhnya ke tangan investor asing daripada kepada rakyat setempat. Hal ini menuntut penanganan oleh Pemda agar pengembangan sarana dan prasarana pariwisata tidak mengakibatkan tergusurnya (marginalisasi atau *disempowerment*) terhadap kepentingan masyarakat setempat, serta mengabaikan pendapatan pariwisata lebih banyak dinikmati oleh investor asing ataupun investor luar daerah (non lokal) daripada oleh masyarakat. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja.²⁵

Ketiga, masih adanya pola pikir “searah” yang melandasi hubungan antara pihak “tuan rumah” (Pemda dan penduduk) dan pihak “tamu” (wisatawan dan investor), padahal yang seharusnya adalah yang bersifat “timbang balik”. Pada kasus seperti ini, maka yang perlu ditangani adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya mengenai landasan pola pikir dalam melihat kegiatan pariwisata oleh masyarakat setempat. Masyarakat masih banyak yang belum memahami bahwa dengan menerima kunjungan wisatawan di daerahnya, Pemda dan masyarakat setempat pun bertanggungjawab untuk memberikan kemudahan dan rasa aman bagi wisatawan.²⁶ Hal inilah yang harus mendapatkan perhatian serius dari aparat pemerintah Kabupaten Bangka, khususnya Kecamatan Belinyu.

Kisah-kisah pengembangan industri pariwisata di wilayah nusantara ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari peran para wisatawan. Hal yang sama juga berlaku pada pertama kali

²⁵ Ibid, hal 4

²⁶ Ibid hal 3-4

pariwisata di Bali dikenal dunia internasional. Para wisatawan yang datang dan menetap di Bali pada masa Perang Dunia, yaitu para seniman, cendekiawan, dan pengusaha. Para pengusaha pada masa itu membuat lukisan dan memperkenalkan Bali melalui karya seni dan diperjual belikan di pasar pariwisata. Tidak hanya budaya dan seni yang berperan dalam pencitraan pariwisata Bali. Pencitraan Bali sebagai “Sorga Terakhir” dunia pariwisata dikonstruksi bersama oleh pemerintah kolonial, antropolog dan badan promosi pariwisata. Upaya pencitraan ini sengaja dilakukan karena orang Bali terkenal sebagai bangsa biadab yang harus segera ditentramkan (Picard, Michel, 2006; 35).

Belajar dari kisah perjalanan industri pariwisata Bali, maka Kabupaten Bangka sedikit lebih beruntung karena tidak memiliki sejarah kekejaman seperti halnya orang Bali. Pulau Bangka hanya memiliki catatan sebagai wilayah yang kaya timah dan asal-usulnya yang banyak berasal dari Cina. Kuli-kuli kontrak dari Cina menetap beratus-ratus tahun di pulau ini dan inilah yang kemudian memberikan corak perpaduan budaya Melayu dan Cina membaaur membentuk kebudayaan masyarakat yang unik.

Keunikan budaya tersebut bisa memiliki nilai jual jika promosi budaya dan pariwisata dilakukan secara kontinyu. Lebih lanjut, bahkan terdapat beberapa jenis kebudayaan yang dilakukan bersama antara etnis Melayu dan Cina. Layaknya saudara, kedua etnis ini hidup berdampingan dengan damai menciptakan harmoni kebudayaan lokal yang menarik dan berpotensi untuk mendatangkan wisatawan, seperti masyarakat melayu yang turut berpartisipasi dalam perayaan upacara tradisional Sembahyang Kubur etnis Cina atau *Ceng Beng* dan berbagai tarian kreasi yang

memadukan unsur Melayu-Cina yang dipentaskan dalam berbagai perayaan hari-hari nasional.²⁷

Terkait dengan pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata bahari di Bangka Belitung, maka kebudayaan yang beragam di wilayah ini pun memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai daya dukungnya. Hal ini jika dikemas dengan baik akan mampu menjadi atraksi budaya yang menarik untuk mengundang para wisatawan. Melalui para pengusaha Cina yang datang setiap tahun ke Bangka untuk melakukan ziarah kubur, promosi dapat dilakukan.

Pembenahan infrastruktur dan transportasi perlu dilakukan secepat mungkin. Perencanaan penambahan jumlah armada menuju lokasi wisata pada event-event tertentu maupun pada hari-hari libur penting untuk dilakukan. Pihak travel agen dan dinas perhubungan daerah seharusnya saling bekerjasama dalam memfasilitasi sarana transportasi pariwisata. Informasi dari Dinas Perhubungan dalam hal ini DLLAJ kabupaten Bangka mencatat bahwa saat ini terdapat sekitar 30 bus pariwisata yang tersebar pada beberapa lokasi travel agent di kabupaten Bangka. Pemerintah juga mulai membuka jalur-jalur khusus pada hari-hari libur menuju lokasi wisata agar masyarakat dapat berwisata. Namun untuk menuju lokasi Pantai Tanjung Penyusuk, pemerintah kabupaten Bangka dalam hal ini DLLAJ belum menetapkan adanya armada reguler menuju kesana.

²⁷ Saat ini di Bangka banyak muncul tarian kreasi yang memadukan unsur Melayu dan Cina. Biasanya, tarian ini di pentaskan untuk menyambut tamu yang datang ke Bangka dan pada perayaan-perayaan nasional di provinsi ini. Informasi ini didapat dari wawancara dengan budayawan setempat, seperti pada saat acara seminar yang bertemakan mencari idenditas budaya Bangka melalui Rumah Adat, pada tahun 2003. Informasi ini didapat berdasarkan wawancara dengan budayawan setempat, Bapak Suhaimi Sulaiman.

Hal ini disebabkan karena belum terlalu tingginya arus transportasi dan jumlah penduduk yang membutuhkan armada ke lokasi wisata yang berada di daerah Kuto Panji, Kecamatan Belinyu. Namun ada program pembangunan terminal di kota Belinyu memang ada, dan diharapkan akan terjadi juga penambahan jumlah armada. Dengan demikian lokasi-lokasi yang belum memiliki armada angkutan umum akan segera berkembang.²⁸

III.7. Dampak Ekonomi Pembangunan Sektor Pariwisata

Banyak kegiatan yang dapat ditimbulkan oleh adanya pariwisata pada suatu negara, salah satunya yaitu akan mendatangkan lebih banyak kesempatan kerja pada sektor ekonomi lainnya. Dengan kata lain kegiatan pariwisata di suatu negara akan menjadi stimulus bagi kegiatan di sektor ekonomi lainnya. Wahab (1996) menuliskan bahwa secara umum kegiatan ekonomi yang akan terstimulus meliputi industri penginapan (hotel, motel, home stay dan sarana akomodasi lainnya), industri katering (restoran, kedai kopi dan lainlain), usaha perjalanan (agen perjalanan, tour operator dan sejenisnya), industri transportasi (maskapai penerbangan, angkutan laut, angkutan bis, kereta api, penyewaan mobil dan lain- lain), pramuwisata, cendera mata, kerajinan tangan, sektor hiburan dan masih banyak lagi.

Dengan kata lain, secara sosiologis massifitas aktivitas dalam industri pariwisata akan mengakibatkan keterpengaruhannya pada perilaku, pola hidup dan budaya masyarakat setempat. Menurut Soekandar Wiraatmaja (1972) yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan proses-proses sosial atau

²⁸ Wawancara dengan salah seorang staf DLLAJ kabupaten Bangka pada tanggal 6 Agustus 2007 di Sungailiat.

mengenai susunan masyarakat. Sedangkan perubahan budaya lebih luas dan mencakup segala segi kebudayaan, seperti kepercayaan, pengetahuan, bahasa, teknologi, dsb. Perubahan dipermudah dengan adanya kontak dengan lain-lain kebudayaan yang akhirnya akan terjadi difusi (percampuran budaya). Kita lihat misalnya bagaimana terjadinya pergeseran kultur kehidupan masyarakat sekitar kawasan Candi Borobudur yang semula berbasis dengan aktivitas kehidupan agraris (bertani) bergeser menjadi masyarakat pedagang dan penjual jasa.

Dengan demikian pariwisata ditinjau dari dimensi kultural dapat menumbuhkan suatu interaksi antara masyarakat tradisional agraris dengan masyarakat modern industrial. Melalui proses interaksi itu maka memungkinkan adanya suatu pola saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan mempengaruhi struktur kehidupan atau pola budaya masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi tuan rumah. Dari dimensi struktural budaya, aktivitas industri pariwisata memungkinkan terjadinya suatu perubahan pola budaya masyarakat yang diakibatkan oleh penerimaan masyarakat akan pola-pola kebudayaan luar yang dibawa oleh para pelancong. Pola-pola kebudayaan luar ini terekspresikan melalui tingkah laku, cara berpakaian, penggunaan bahasa serta pola konsumsi yang diadopsi dari wisatawan yang datang berkunjung.

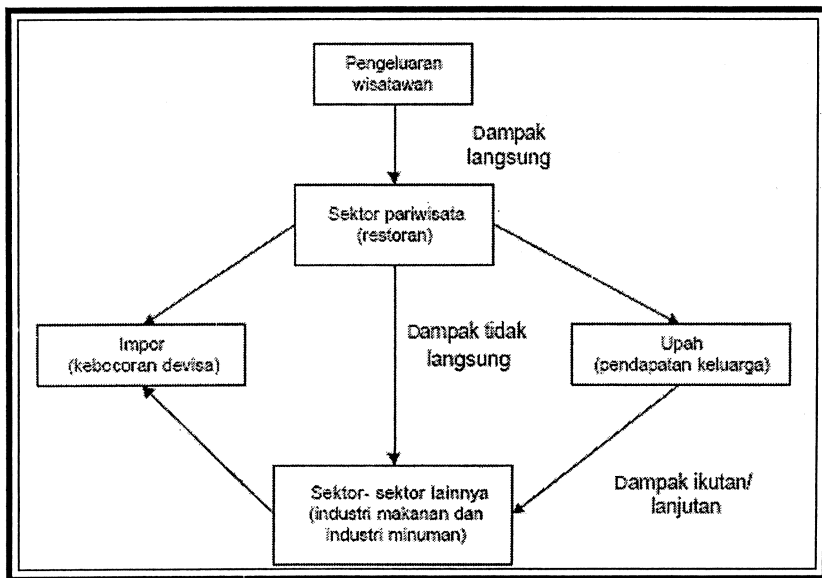
Apabila tingkat massifitas kedatangan turis ini cukup tinggi maka ada kemungkinan terjadi “perkawinan” antara dua unsur kebudayaan yang berbeda. Dari pertemuan atau komunikasi antar pendukung-pendukung kebudayaan yang berbeda tersebut, akan muncul peniru-peniru perilaku tertentu atau muncul pola perilaku tertentu. Meniru tindakan orang lain adalah kewajiban dari seorang manusia. Tindakan ini bisa lahir karena tujuan-tujuan tertentu, dan bisa jadi karena terdorong oleh aspek kesadaran ataupun karena

dorongan-dorongan yang sifatnya emosional. Artinya, seseorang individu bisa saja meniru perilaku orang lain hanya karena dia melihat bahwa perilaku yang ditampilkan oleh orang lain tersebut nampak indah atau nampak lebih modern. Tindakan meniru atau yang biasa disebut dengan tindakan imitasi bisa terjadi jika ada yang ditiru. Di sini faktor emosional dominan bermain karena seseorang tidak akan memikirkan apakah perilaku yang ditiru tersebut sesuai atau tidak dengan keadaan dirinya.

Kontak selanjutnya antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah adalah komunikasi verbal. Kontak antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan membutuhkan suatu perantara atau media atau alat yang mampu menjalin pengertian antara kedua belah pihak, perantara atau media tersebut adalah bahasa, bahasa menjadi faktor determinan. Akhirnya masyarakat kembali terdorong untuk bisa berbahasa asing. Dorongan itu muncul bukan semata-mata karena motif ingin berhubungan misalnya korespondensi atau yang lain, melainkan lebih disebabkan karena faktor ekonomi, untuk dapat komunikatif dalam memasarkan dagangannya (baik produk souvenir, jasa menjadi *guide*, dll). Ini berarti telah terjadi pola perubahan budaya masyarakat menuju ke arah yang positif yaitu memperkaya kemampuan masyarakat khususnya dalam bidang bahasa.

Demikian pula kemunculan hotel, cafe, maupun toko-toko cinderamata di sekitar kawasan wisata adalah variabel yang turut membantu menjelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat sekitar kawasan wisata. Dengan adanya berbagai sarana penunjang pariwisata itu masyarakat menjadi paham akan adanya pola / sistem penginapan yang bersifat komersial, dengan adanya cafe dan toko, logika pasar tradisional akan sedikit tergeser dari pola penjualan dengan model

tawar-menawar menjadi model harga pas. Dimensi ekonomi memandang bahwa dampak dari pariwisata terhadap perekonomian suatu daerah tidak hanya sebatas pada perolehan tingkat pendapatan yang lebih baik. Lindberg (1996) menyatakan bahwa dampak dari pariwisata, atau aktivitas ekonomi apapun, dapat digolongkan ke dalam 3 katagori, yaitu langsung (*direct*), tidak langsung (*indirect*) dan ikutan/lanjutan (*induced*). Secara grafis, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Pengeluaran pengunjung untuk makan-minum di sebuah restoran adalah contoh dari dampak positif secara langsung dari aktivitas pariwisata.



Restoran harus mampu menyiapkan hidangan dan minuman yang akan disantap oleh pengunjung membeli bahan dan jasa (*input*) dari sektor- sektor usaha lain di sekitar restoran, ini merupakan dampak tidak langsung dari pariwisata. Sebagai karyawan yang bekerja sebagai juru masak di restoran, seseorang

memperoleh upah. Sebagian dari upah tersebut dibelanjakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari (barang dan jasa) dari sekitar daerah tempat tinggalnya, ini yang disebut sebagai dampak lanjutan dari pariwisata. Jika restoran dan atau juru masak tadi selain membeli bahan dan jasa dari sekitar daerah tersebut juga membeli yang berasal dari luar daerah atau buatan luar negeri, maka terjadilah apa yang dinamakan kebocoran (*leakege*).

Pengukuran dampak pariwisata pada ekonomi lokal dapat pula didekati dengan pendekatan multiplier effect (efek pengganda). Donald E. Lunberg dalam bukunya yang berjudul "*The Tourism Business*" dalam (Yoeti, 1997) memberikan model penghitungan efek pengganda dari pariwisata, yaitu:

$$TEM = \frac{1 - TPI}{MPS + MPI}$$

dimana:

- TEM : *Tourist Expenditure Multiplier* (efek pengganda).
TPI : *Tourist Propensity to Import*, yaitu faktor yang menyebabkan pengeluaran wisatawan menjadi tidak berarti (bagi perekonomian setempat), sebagai akibat pembelian barang dan jasa impor untuk kepentingan investasi.
MPS : *Marginal Propensity to Save*, yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk tidak membelanjakan sebagian dari pendapatannya untuk menabung atau untuk berjaga-jaga.

MPI : *Marginal Propensity to Import*, yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membelanjakan sebagian dari pendapatannya untuk membeli barang dan jasa impor.

Penelitian yang dilakukan oleh Checchie Company pada tahun 1969 di kepulauan Bahama dalam Yoeti (1997) menemukan koefisien efek pengganda untuk kawasan itu sebesar 0,8944. Perhitungan ini berdasarkan bahwa setiap dollar yang dibelanjakan wisatawan di sana, 34 *cents* dibelanjakan untuk keperluan barang dan jasa yang diimpor (tidak memberikan pengaruh terhadap perekonomian setempat). Kemudian 46 *cents* dibelanjakan penduduk Bahama sendiri untuk keperluan impor barang dan jasa. Sedangkan sisanya sebesar 20 *cent* digunakan untuk tabungan dan investasi.

Angka efek pengganda sebesar 0,8944 ini menunjukkan bahwa setiap dolar yang dibelanjakan di Bahama pada periode tersebut, 89% daripadanya telah mendorong kegiatan ekonomi di negara tersebut. Bagaimana dengan efek pengganda di ekowisata? Dengan melihat rumus di atas, maka nilai TEM dari ekowisata akan lebih besar dibandingkan dengan TEM pariwisata massal. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai TPI akan sangat rendah. Hampir seluruh pengeluaran pengunjung ekowisata seperti penginapan, transportasi, makan dan minum di daerah pedalaman berasal dari daerah setempat (tidak ada yang diimpor dari luar, walaupun ada merupakan bekal yang dibawa oleh pengunjung).
2. Nilai MPS akan besar. Penduduk yang menerima upah baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan ekowisata akan membelanjakan sebagian besar dari upah tersebut. Dengan kata

lain pada umumnya masyarakat lokal setelah menerima uang yang didapat dari usahanya yang ditabung hanya sedikit, sebagian besar dibelanjakan kembali (Fandeli, 2002).

3. Nilai MPI pada pengembangan ekowisata, yaitu dana yang dipergunakan untuk investasi baik infra struktur maupun investasi lain adalah sangat kecil. Fandeli (2002) menyatakan pula bahwa pembangunan untuk fasilitas atau utilitas relatif sangat kecil karena semuanya disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang alami.

III.8. Pengembangan Pariwisata Pantai Penyusuk di Kecamatan Belinyu

Hasil identifikasi potensi wisata yang dilakukan beberapa pantai di kawasan, ternyata Kabupaten Bangka sudah lebih siap untuk mulai mengembangkan industri wisata pantai namun bukan wisata bahari secara utuh. Salah satu daerah kecamatan yang akan menjadi target pengembangan wisata bahari pemerintah lokal adalah Kecamatan Belinyu. Luas wilayah Belinyu adalah 105.558 ha dengan jumlah penduduk di tahun 1999 sekitar 57.327 jiwa²⁹ dan tahun 2004 berjumlah 37.468.

Dari sisi kekayaan laut, perikanan laut di kawasan Belinyu cukup beragam dan banyak jumlahnya. Melihat potensi yang cukup besar dimiliki oleh daerah ini, kemudian pemerintah berencana akan menjadikan wilayah ini sebagai kawasan industri perikanan, pelabuhan dan pariwisata. Kawasan Belinyu juga dijadikan sebagai kawasan tumbuh cepat dan berarti percepatan pembangunan antara lain dengan membuka jalur penyeberangan laut antar provinsi. Hal

²⁹ Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Kabupaten Bangka.

ini berarti akses untuk masuknya wisatawan sudah akan dibuka. Selain itu jarak tempuh menuju Sungai Liat (ibukota kabupaten) dan Pangkal Pinang juga relatif dekat yaitu sekitar 70 km. Salah satu pantai yang akan dikembangkan sebagai primadona pariwisata dan sebagai pendukung program perikanan terpadu adalah *Pantai Tanjung Penyusuk* yang terletak di Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Pantai ini berjarak kurang lebih 77 km dari Kota Sungailiat.

Kecamatan Belinyu memiliki potensi alam yang cukup potensial, selain perkebunan karet dan lada terdapat juga kekayaan laut yang berlimpah di wilayah ini. Bahkan industri perikanan laut yang berupa makanan olahan masyarakat Belinyu sudah sangat terkenal. Namun sangat disayangkan, dalam beberapa tahun terakhir karena pengaruh kapal keruk hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan. Akibatnya industri makanan yang bergantung pada hasil laut juga menanggung akibatnya. Misalnya, terjadinya kelangkaan siput gung-gung sehingga harga siput goreng melonjak tinggi. Daya beli masyarakat Bangka yang rendah, tidak memungkinkan pengusaha siput gung-gung mendapat untung lebih. Bahkan ada beberapa pengusaha yang menghentikan untuk sementara pengolahan siput sambil menunggu siput dari luar Belinyu. Sangat disayangkan jika siput ini tidak lagi dijual, padahal makanan siput gung-gung menjadi salah satu ciri khas Bangka yang dapat membantu promosi pariwisata daerah.

Terkait dengan masalah perekonomian, pemerintah menyadari bahwa dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat Belinyu mulai mengalami kesulitan ekonomi. Bermula, ketika pemerintah daerah memperlakukan peraturan penambangan timah inkonvensional secara ketat. Tidak semua orang dapat dengan mudah mengali timah jika tidak ada surat izin resmi dari pemerintah

daerah. Pada akhirnya nelayan, yang sebelumnya mengalihkan peruntungannya ke timah, kembali lagi ke laut. Namun hasil laut tidak lagi seperti dahulu, banyak dan berlimpah.

Pemerintah setempat sedang berupaya menghidupkan ekonomi kota dengan menggerakkan berbagai sektor yang mendorong perekonomian Belinyu. Salah satu usahanya adalah memperdayakan potensi-potensi pantai dan daerah tujuan wisata lainnya yang ada di Kota Belinyu. Diharapkan pula, industri pariwisata ini nantinya juga mendorong kegiatan ekonomi masyarakat lainnya. Objek-objek wisata yang dapat dijadikan penunjang wisata pantai Penyusuk juga banyak dan bahkan memungkinkan untuk dikemas dalam paket wisata. Saat ini, paket wisata merupakan salah satu jalan yang paling strategis untuk mempromosikan keindahan pulau ini. Ada beberapa potensi wisata yang ditemukan di kecamatan ini, yaitu:

1. Kampung China, yang terdapat di daerah Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, kurang lebih 54 km dari Kota Sungailiat. Ada pula di Kampung Gedong, Desa Lumut, kurang lebih 51 km dari Kota Sungailiat atau kurang lebih 14 km dari Kota Belinyu. Kehidupan mereka rata-rata adalah berdagang dan pembuat makanan khas Bangka seperti kerupuk, kemplang, getas, dsb. Di Kampung ini terdapat kurang lebih 50 kepala keluarga dari generasi pertama etnis Tionghoa.
2. Wisata Pantai, Pantai Romodong, pantai ini terletak di Desa Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Di pantai ini para wisatawan dapat menyaksikan saat matahari terbenam. Hal ini dikarenakan lokasi pantai yang menghadap ke mata angin sebelah barat. Panjang pantai kurang lebih 4 km, lautnya yang landai, berpasir putih dan halus serta berair bening. Pantainya sangat diminati karena memiliki terumbu

karang yang masih alami, air belum tercemar, bibir pantai yang bersih dan asri, dan terdapat aktivitas musiman seperti penyu bertelur.³⁰

3. Untuk wisata Sejarah, Kecamatan Belinyu terdapat Pha Khak Liang. Tempat ini berada di Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, kurang lebih 2 km dari Kota Belinyu atau kurang lebih 3 km dari Kota Sungailiat. Pha Kak Liang adalah sebuah kawasan wisata yang berciri China. Ia dibangun di daerah bekas tambang timah dengan luasnya yang mencapai 2 hektar. Wisatawan yang datang ke tempat ini seolah berada di daratan Hongkong atau Taiwan. Daya tarik lain adalah pengunjung dapat menyaksikan ikan air tawar yang besar-besar, yang bermunculan jika wisatawan memberikan makanan ikan yang telah disediakan oleh pengelola. Namun, ada kepercayaan bahwa ikan-ikan tersebut tidak boleh dipancing atau dimakan.
4. Wisata Kerajinan, seperti kerajinan tangan renda. Kerajinan ini merupakan hasil industri rumah tangga yang dikerjakan oleh masyarakat dan diprakarsai oleh Ibu Martina dengan label “Mart Bersaudara.” Hasilnya beranekaragam, dari renda untuk taplak meja, sarung bantal, hingga tirai dan sarung gelas. Kerajinan ini banyak diminati oleh wisatawan nusantara terutama para ibu.

Dalam masa transisi sekarang ini, pemerintahan Kabupaten Bangka melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sudah mendelegasikan pelaksanaan pengelolaan Pantai Tanjung Penyusuk kepada masyarakat setempat dalam wadah karang taruna. Ada sekitar 6 orang tokoh pemuda yang sudah ditunjuk menjadi tim pengelola bersama-sama dengan masyarakat setempat

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Asep Setiawan, Dinas Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, 17 Juli 2007.

mengembangkan pariwisata Tanjung Penyusuk. Upah yang mereka terima diperoleh dari hasil retribusi wisatawan dan pedagang keliling. Penghasilan yang mereka dapatkan paling sedikit Rp.50.000 untuk satu orang setiap minggu. Hal ini cukup membantu perekonomian meskipun tidak terlalu signifikan. Hasil yang agak besar bisa mereka peroleh ketika ada event-event tertentu di pantai, seperti acara kesenian(dangdut atau panggung hiburan) ataupun upacara Taber Laut (sembahyang laut oleh orang Cina).³¹

Pariwisata di kawasan Pantai Tanjung Penyusuk, Kecamatan Belinyu yang tersembunyi memang belum terjamah arus pembangunan yang pesat, perlu terobosan-terobosan yang sifatnya bukan sporadis melainkan bertahap dan terprogram. Jalinan harmonisasi hubungan antara berbagai elemen perlu dibina, kesamaan visi misi dan tujuan akhir yang ingin dicapai untuk memajukan sektor pariwisata di Kecamatan Belinyu perlu ditata ulang kembali. Komunikasi yang intens dan terarah antara ketiga elemen tersebut dengan mendudukan fungsi dan tanggung jawab masing-masing secara profesional mungkin sulit untuk diwujudkan, tetapi usaha kearah tersebut perlu diupayakan. Potensi yang dimiliki kawasan tanjung penyusuk seharusnya dapat memberikan nilai tambah baik secara ekonomis maupun sosial kemasyarakatan dan menjadi modal bagi pelestarian warisan budaya bangsa.

³¹ Wawancara dengan bapak Suryadi, salah seorang pengelola Pantai Tanjung Penyusuk, pada tanggal 24 Juli 2007 di Belinyu.

BAB IV

PENDUDUK DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN BAGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

IV.1. Pendahuluan

Uraian pada bagian ini difokuskan pada kondisi kependudukan dan lingkungan bagi pengembangan wisata maupun sektor-sektor yang terkait sumberdaya manusia dan lingkungan merupakan modal yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Hal tersebut karena penduduk dapat merupakan pasar yang potensial sekaligus merupakan aset sumber tenaga kerja yang akan menjadi pengelola pengembangan pariwisata. Demikian halnya dengan lingkungan, pengembangan wisata harus memperhatikan sumberdaya lingkungan yang dapat mendukung perkembangan pariwisata dan usaha-usaha lain yang dapat menjadi *multiflier effect* bagi perkembangan pariwisata.

Komposisi penduduk di suatu daerah dapat memberikan inspirasi pengembangan pariwisata yang akan dilakukan agar laku di jual sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Dalam pengembangan pariwisata komposisi penduduk baik menurut jenis kelamin maupun struktur umur sangat menentukan bagi jenis wisata yang akan dikembangkan. Karena pangsa pasar pengembangan pariwisata yang utama adalah penduduk dari wilayah sendiri, sehingga analisa kependudukan sebagai modal pengembangan wisata difokuskan pada penduduk Kabupaten Bangka.

Sementara itu pengembangan pariwisata perlu adanya daya dukung lingkungan yang memadai. Pengembangan wisata

memerlukan lahan yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur sebagai pendukung suatu kawasan wisata. Demikian pula ketersediaan air yang sangat diperlukan bagi kelangsungan kegiatan wisata yang melibatkan manusia sebagai pelaku baik penyedia jasa maupun sebagai pengunjung.

IV.2. Potensi Penduduk bagi Pengembangan Pariwisata

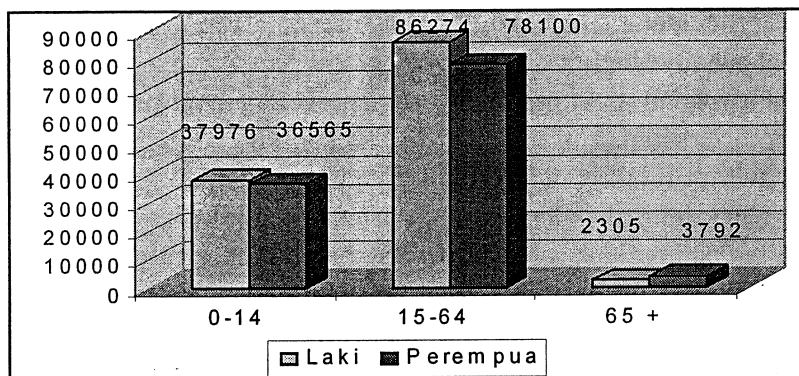
Jumlah penduduk Kabupaten Bangka meliputi 245.012 orang terdiri dari 118.457 perempuan dan 126.855 laki-laki. Jumlah ini merupakan pasar lokal bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka. Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka memerlukan kerja ekstra untuk menarik wisatawan dari kabupaten disekitar Kabupaten Bangka bahkan dari luar provinsi dan pasar luar negeri.

Pengembangan pariwisata terkait dengan struktur penduduk. Penduduk dengan struktur umur muda, pengembangan jenis wisata hendaknya mengembangkan kegiatan ataupun atraksi yang cocok untuk penduduk pada usia tersebut. Selain itu, souvenir-souvenir yang dijual ataupun makanan disesuaikan dengan struktur umur pengunjung. Pada Diagram 1 terlihat bahwa struktur umur penduduk di Kabupaten Bangka mengelompok pada usia produktif (15-64) yang meliputi 67 persen sedangkan penduduk pada usia muda (<15 persen) meliputi 30 persen. Penduduk pada usia tua relatif sedikit hanya sekitar 3 persen dari penduduk Kabupaten Bangka secara keseluruhan. Apabila diasumsikan struktur umur pengunjung pada tempat-tempat wisata di Kabupaten Bangka seperti struktur umur penduduk Bangka secara keseluruhan, maka proporsi kegiatan pariwisata yang akan dikembangkan dapat mengacu pada asumsi struktur umur pengunjung. Sehingga masing-

masing pengunjung dapat menikmati kegiatan yang sesuai dengan umurnya.

Struktur umur penduduk yang mengelompok pada usia produktif dapat merupakan modal untuk berlangsungnya kegiatan ekonomi (Diagram 1). Kebutuhan tenaga kerja untuk pengembangan sektor pariwisata dan usaha terkait yang akan dikembangkan dapat menggunakan tenaga setempat sesuai dengan pendidikan dan keahliannya. Kegiatan yang dikembangkan untuk pariwisata tidak semua memerlukan tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi tetapi ketrampilan yang dimiliki oleh individu juga diperlukan. Sebagai contoh potensi tenaga kerja di Kecamatan Belinyu untuk pengembangan wisata sesuai dengan ketrampilannya sebagai nelayan adalah membantu dalam pengadaan transportasi air.

Grafik IV.1 :
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Bangka.



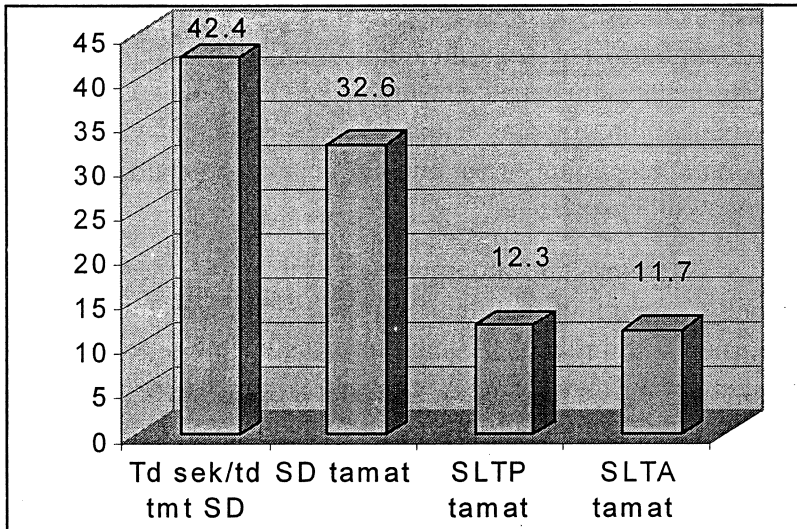
Sumber: BPS Kab. Bangka, 2006

IV.2.1. Pendidikan dan Ketrampilan Penduduk dalam Pengembangan Pariwisata

Kualitas penduduk merupakan potensi untuk pengembangan pariwisata dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata. Kualitas pendidikan penduduk sekaligus diharapkan akan dapat membantu untuk mengelola lingkungan agar keberlanjutan lingkungan baik lingkungan dalam kaitan dengan pariwisata maupun lingkungan secara luas. Kualitas penduduk biasanya dapat diukur melalui tingkat pendidikan dan tingkat keterampilannya. Pengaruh pendidikan terhadap individu sangat besar, karena dengan pendidikan akses untuk mendapatkan informasi lebih besar selain itu juga dapat lebih mudah dalam menyerap dan memahami informasi.

Kualitas penduduk berumur 6 tahun atau lebih di Kabupaten Bangka masih relatif rendah (Diagram 2). Data pada diagram 2 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen dari jumlah penduduk tidak sekolah atau belum menamatkan tingkat sekolah dasar. Sementara itu penduduk yang menamatkan SLTA tamat dan ke atas hanya meliputi sekitar 11 persen. Kualitas penduduk yang masih rendah akan mempengaruhi perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pengembangan pariwisata tidak hanya tertumpu pada masyarakat yang terlibat sebagai pekerja di bidang pariwisata tetapi seluruh masyarakat akan terlibat paling tidak sebagai 'penerima tamu' bagi masyarakat dari luar. Dalam usaha untuk meningkatkan pariwisata dan usaha pendukungnya, masyarakat diikutsertakan dengan memberikan informasi yang benar bagaimana penduduk menyikapi perkembangan pariwisata yang ada.

Grafik IV.2
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Bangka 2005



Sumber; BPS Kabupaten Bangka, 2006

Selain pendidikan pengembangan pariwisata di suatu wilayah perlu mengetahui potensi yang dimiliki penduduk berkaitan dengan ketrampilan. Potensi ini dapat merupakan pendukung pengembangan pariwisata dan sektor terkait lainnya. Ketrampilan penduduk sekitar lokasi wisata terutama kawasan Belinyu beragam. Hasil observasi dan wawancara terbuka dengan informan kunci mengungkapkan keterampilan penduduk yang terutama adalah pada bidang kenelayanan. Hal ini didukung oleh letak geografis wilayah yang sebagian besar merupakan perairan. Nelayan di kawasan wisata ini pada umumnya masih merupakan nelayan tradisional, yang melakukan penangkapan ikan secara harian. Armada yang digunakan relatif kecil, paling tinggi menggunakan motor berkekuatan 20-24 PK serat alat tangkap pancing dan jaring.

Sebagai nelayan tradisional, hasil tangkapan nelayan masih terbatas. Observasi yang pernah dilakukan menemukan bahwa satu kali melaut, nelayan menghasilkan 6 kg cumi dan 5 kg ikan tenggirri. Meskipun hasilnya relative rendah, namun potensi ini bisa dikembangkan jika kawasan telah menjadi pusat pariwisata. Nelayan-nelayan ini dapat mensuplai kebutuhan ikan untuk sajian paran pengunjung wisata. Selain itu, nelayan juga dapat menjadi guide para pengunjung wisata untuk mengitari pulau-pulau kecil yang ada di lokasi wisata.

Keetrampilan lain yang potensial untuk dikembangkan adalah keterampilan membuat kerupuk ikan. Keterampilan ini cukup banyak dimiliki oleh penduduk disekitar kawasan pariwisata Belinyu. Sepanjang jalan menuju kawasan Belinyu banyak warung-warung yang menjual kerupuk ikan maupun cumi hasil produksi rumah tangga setempat. Potensi ini dapat merupakan pendukung pengembangan wisata untuk memenuhi kebutuhan pengunjung membawa oleh-oleh khas dari Bangka terutama pengunjung dari luar kabupaten atau provinsi.

Kerajinan renda juga sudah dikembangkan oleh beberapa anggota masyarakat di sekitar lokasi wisata. Namun kerajinan ini masih terkesan *exclusive* karena harga yang relatif mahal. Kerajinan renda yang ditemukan di kawasan ini mempunyai motif yang khas, agak berbeda dengan kerajinan renda di lokasi lain. Kekhasan kerajinan renda di kawasan ini, perlu dijaga, karena dapat merupakan daya saing tersendiri. Saat ini, sebagian pengunjung wisata telah singgah, dan membeli hasil kerajinan renda untuk souvenir. Selain itu, mereka juga giat mengikuti pemeran-pameran untuk mempromosikan kerajinan renda khas Bangka.

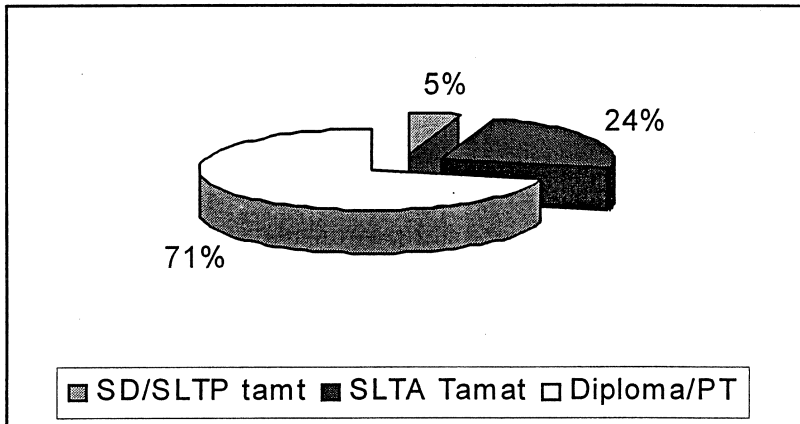
IV.2.2. Potensi Tenaga Kerja Terdidik

Potensi tenaga kerja terdidik di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari catatan pencari kerja di kantor tenaga kerja di Kabupaten Bangka. Pencari kerja yang terdaftar pada dinas Tenaga kerja Kabupaten Bangka sebanya 4.795 terdiri dari 2655 laki-laki atau lebih dari separuh pencari kerja dan 2140 adalah perempuan sekitar 45 persen. Pencari kerja tersebut semuanya adalah penduduk Kabupaten Bangka (mempunyai KTP Kabupaten Bangka). Hal ini merupakan pengaruh ortonomi daerah yang lebih mengedepankan penduduk lokal untuk mengisi lowongan kerja di daerah sendiri.

Banyaknya jumlah pencari kerja, yang mengalami peningkatan pada tahun terakhir ini, sedangkan kesempatan kerja terbatas menjadi dorongan pihak berwenang untuk bekerja lebih keras agar pencari kerja dapat tersalur. Dari wawancara terbuka dengan informan di dinas tenaga kerja terungkap bahwa pada umumnya pencari kerja tersebut menginginkan pekerjaan di sektor formal terutama menjadi pegawai negeri (PNS) atau di perusahaan-perusahaan swasta.

Tingkat pendidikan pencari kerja cukup bervariasi (Diagram 2) tetapi sebagian besar mempunyai pendidikan setingkat perguruan tinggi baik diploma maupun sarjana yang meliputi lebih dari 70 persen. Sedangkan pencari kerja yang mempunyai pendidikan dibawah SLTA tamat (SD dan SLTP) relatif sedikit hanya sekitar 5 persen dari seluruh pencari kerja. Potensi tenaga kerja terdidik ini merupakan modal yang sangat besar bagi perkembangan pariwisata dan usaha-usaha yang terkait.

Grafik IV.3
Tingkat Pendidikan Pencari Kerja, Kabupaten Bangka



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka

IV.2.3. Permasalahan Tenaga Kerja

Salah satu penyebab dari meningkatnya pencari kerja di Kabupaten Bangka antara lain adalah penutupan tambang 'illegal'. Penutupan tambang ilegal di satu sisi berdampak pada kondisi ketenaga kerjaan, karena penambangan timah baik dengan izin maupun tanpa izin melibatkan cukup banyak tenaga kerja. Namun demikian bila usaha tersebut terus berlanjut akan merusak lingkungan yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Bangka perlu membuat terobosan dalam penciptaan lapangan pekerjaan agar masyarakat tidak meneruskan penambangan yang kurang ramah lingkungan.

Dampak ditutupnya penambangan timah tidak hanya berpengaruh pada mereka yang terlibat dalam usaha penambangan tetapi juga penyedia kebutuhan yang diperlukan bagi para penambang. Menurut informan masyarakat yang kehilangan pekerjaan tidak hanya tenaga penambang tetapi juga pada sektor perdagangan karena pada lokasi penambangan biasanya muncul warung pedagang makanan. Sektor perdagangan lain yang terimbas adalah usaha penjualan alat-alat yang digunakan untuk menambang. Sedangkan sektor jasa yang ikut mengalami penurunan adalah usaha bengkel perbaikan alat-alat penambang.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara pencari kerja dan kebutuhan tenaga kerja pada umumnya perusahaan membutuhkan pekerja yang telah berpengalaman (mempunyai pengalaman kerja di bidang yang diminati). Hal tersebut sulit dipenuhi oleh calon tenaga kerja, karena pencari kerja biasanya merupakan tenaga yang baru masuk pasar kerja untuk pertama kali. Untuk memenuhi tenaga kerja yang berpengalaman perusahaan biasanya merekrut pekerja dari luar daerah. Sebagai contoh perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha dari Jawa akan membawa pekerja dari Jawa. Bahkan beberapa perusahaan yang ada di kabupaten Bangka menggunakan tenaga kerja asing meskipun jumlahnya tidak banyak.

Untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja dan pencari kerja menurut informan bisa diatasi dengan menggunakan pelatihan, tetapi kantor tenaga kerja Kabupaten Bangka pada saat ini belum mempunyai balai pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang diadakan biasanya melalui kerjasama dengan instansi lain baik swasta maupun pemerintah seperti dengan pemerintah provinsi, Pemda dan PT. Timah. Pelatihan yang diadakan pada umumnya adalah pelatihan bengkel, las dan manajemen, sedangkan keterampilan yang berkaitan dengan kepariwisataan belum pernah dilakukan.

IV.3.3. Daya Dukung Lingkungan Untuk Pengembangan Pariwisata.

Ketersediaan air merupakan salah satu daya dukung lingkungan yang dibutuhkan untuk pengembangan suatu wilayah termasuk dalam pengembangan pariwisata. Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia, tanpa ketersediaan air manusia tidak akan bertahan hidup dalam waktu lama. Karena itu pengembangan wisata yang melibatkan manusia sebagai pelakunya baik sebagai pengunjung maupun penyedia harus memperhatikan ketersediaan air di wilayah pengembangan pariwisata. Kebutuhan air per kapita perhari paling sedikit adalah 8 liter/hari.

Pengunjung wisata membutuhkan air baik untuk keperluan minum, dan MCK. Semakin berkembang daerah wisata kebutuhan akan air semakin meningkat. Sehinggaantisipasi ketersediaan air di wilayah pengembangan wisata harus diperhitungkan. Namun demikian, saat ini ketersediaan air bersih di kawasan pantai Belinyu sangat terbatas. Pada umumnya sumur penduduk yang ada disekitar pantai hanya dapat dipergunakan sebagai mandi dan cuci. Sedangkan ketersediaan air minum dari sumber disekitar lokasi pantai belum diesplorasi. Penyediaan air minum penduduk masih tergantung pada air kemasan atau air yang diambil dari lokasi yang jauh dengan pantai. Penduduk yang menggunakan air sumur dangkal dari lokasi setempat menjelaskan bahwa air tersebut kurang memenuhi syarat untuk kesehatan karena jika dimasak meninggalkan bekas kerak pada tempat masak. Belum terdapat penelitian yang pasti tentang kualitas air di sekitar pantai.

Selain ketersediaan air, hal yang sangat penting adalah ketersediaan listrik baik untuk keperluan penerangan maupun untuk

keperluan lainnya. Namun listrik yang merupakan kebutuhan vital tersebut belum tersedia di lokasi pengembangan wisata. Hal tersebut merupakan penghambat bagi kegiatan pengembangan wisata. Keterbatasan sumber yang sangat vital ini, mempengaruhi bentuk wisata yang akan dikembangkan. Pengembangan wisata pantai harus punya link dengan daerah terdekat yang mempunyai infrastruktur yang memadai seperti air dan listrik.

Lahan merupakan sumberdaya yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha pariwisata. Lahan diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti hotel, peristirahatan pengunjung, tempat bermain anak, parkir dan lainnya. Namun demikian, lahan yang terdapat di tepi pantai pada umumnya telah dimiliki oleh orang luar (para pengusaha dari luar). Sampai saat ini lahan tersebut masih dilerantarkan tidak kelihatan tanda-tanda dibangunnya suatu usaha di lahan tersebut. Saat ini, lahan-lahan tersebut sebagian di tempati oleh nelayan-nelayan untuk beristirahat karena lokasi rumah yang jauh dari terdapat usaha kenelayanan.

Keterbatasan lahan yang dikuasai oleh masyarakat banyak, akan berpengaruh pada usaha pariwisata yang akan dikembangkan. Usaha pariwisata akan berkembang bertumpu pada kekuatan pengusaha besar (pemilik lahan). Sedangkan untuk usaha pariwisata berbasis masyarakat akan tertinggal karena ketiadaan lahan untuk usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan bagaimana menempatkan masyarakat lokal dalam perkembangan wisata yang akan datang.

Daya dukung lain yang penting dan perlu diperhatikan adalah letak lokasi-lokasi pariwisata yang terisolir dari segi transportasi. Lokasi pengembangan pariwisata di Kabupaten

Bangka yang terisolir merupakan penghambat keberlangsungan usaha pariwisata yang telang dikembangkan. Pada umumnya, transportasi umum untuk mencapai lokasi wisata di Kabupaten Bangka, relatif sulit sehingga. Bagi pengunjung yang tidak menggunakan jasa pariwisata, melakukan kunjungan wisata di Pulau Bangka tidaklah mudah. Usaha untuk mengatasi hal tersebut sedang dilakukan oleh dinas perhubungan untuk menggerakkan pengusaha transport menyediakan kendaraan paling tidak pada hari minggu untuk route lokasi wisata.

Kabupaten Bangka yang terisolir karena keterbatasan transportasi merupakan kendala bagi berkembangnya transportasi. Upaya untuk mengatasi kendala transportasi tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan rencana kerjasama dengan perusahaan penerbangan asing (Asmara, Malaysia). Perusahaan tersebut akan membuka penerbanangan dengan route Kuala Lumpur, Batam, Palembang, Pangkal Pinang dan Jakarta. Upaya tersebut jika terrealisir akan dapat merupakan salah satu terobosan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka

Penengembangan infrastruktur untuk wisata sudah mulai dibangun tetapi terkesan kurang serius. Sebagai contoh dilokasi pantai penusuk di buat jembatan yang menghubungkan antara pulau-pulau kecil dengan daratan pantai. Jembatan yang dibangun tersebut kurang tinggi sehingga menghambat perahu nelayan yang lewat. Selain itu, pada waktu pasang jembatan tersebut tidak dapat difungsikan karena tergenang air. Fungsi dari jembatan untuk memudahkan wisatawan menuju pulau-pulau kecil kurang bermanfaat.

IV.3.4. Ancaman terhadap Potensi SDA/lingkungan

Potensi sumberdaya di Pulau Bangka tidak terlepas dari ancaman kerusakan. Ancaman tersebut dapat dikarenakan karena alam dan kegiatan manusia. Namun demikian dari observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan manusia merupakan ancaman yang lebih dominan dalam penurunan potensi sumberdaya alam/lingkungan. Kegiatan tersebut antara lain adalah Adanya penambangan timah yang dilakukan secara berlebihan dan penangkapan biota laut yang tidak ramah lingkungan.

Maraknya penambangan yang dilakukan sebelum tahun 2006 baik yang dilakukan secara inkonvensional maupun pertambangan yang diakui/resmi lambat laun akan merusak daya dukung lingkungan yang akan berakibat pada keberlangsungan pariwisata yang berkelanjutan. Apalagi beberapa kegiatan 'TI' tidak hanya dilakukan di darat tetapi juga di perairan sehingga akan berpengaruh terhadap keragaman hayati daerah perairan yang dijadikan sebagai modal pokok wisata bahari.

Penambangan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan baik di darat maupun wilayah perairan menimbulkan dampak yang relatif besar. Dampak yang kelihatan dari penambangan di daratan adalah adanya perubahan bentuk muka bumi dan menghilangkan keanekaragaman hayati terutama pada lokasi-lokasi penambangan. Hal tersebut juga terjadi di perairan, terlihat gundukan-gundukan tanah yang merusak pemandangan.

Dampak lain dari penambangan di darat adalah lumpur dari penambangan masuk ke aliran sungai yang akhirnya masuk kelaut yang menyebabkan sedimentasi/pendangkalan di laut. Kondisi ini selanjutnya berimbas pada tertutupnya terumbu karang oleh kotoran lumpur tersebut. Seperti diketahui terdapat beberapa

sungai yang bermuara di Teluk Klabat antara lain Sungai Antang, Tumbula, Pancor, Sepang, Simbubur, Layang, Rumpa, Kajur, Simpang dan masih ada beberapa sungai lainnya.

Lubang-lubang bekas penambangan juga menghambat pembangunan infrastruktur sebagai pendukung keberlangsungan pengembangan pariwisata terutama pembuatan jalan ke lokasi-lokasi wisata. Lobang-lobang bekas 'TI' yang tidak direklamasi membahayakan pengunjung. Berkembangnya penambangan juga menyebabkan areal tanah yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian semakin berkurang yang akan mengurangi daya dukung lingkungan untuk mensuplai bahan makanan (secara swadaya) kepada penduduknya.

Adapun penyebab kerusakan biota laut karena penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom. Hasil wawancara mendalam dengan nelayan baik di Bangka Selatan maupun di kawasan Belinyu masih terdapat penangkapan menggunakan bom meskipun secara kuantitas telah berkurang. Praktik penggunaan racun untuk penangkapan ikan masih dilakukan oleh sebagian nelayan. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa nelayan yang merasa terganggu akan adanya praktik-praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Racun yang digunakan dalam kegiatan penangkapan biasanya adalah sianida dan racun dari kar tuba. Di beberapa lokasi penggunaan racun sudah mulai berkurang sebagai contoh penggunaan racun berupa akar tuba yang dulu sering dilakukan di oleh beberapa nelayan pantai Penusuk sudah mulai berkurang sejak adanya usaha budidaya rajungan di sekitar pantai penusuk.

Penggunaan racun, penggunaan *trawl* oleh nelayan terutama nelayan skala besar masih sering terlihat. Menurut

informasi dari nelayan setempat biasanya *trawl* digunakan oleh nelayan dari luar daerah bahkan nelayan dari luar negeri. Penggunaan *trawl* ini akan menguras ikan dari ikan besar sampai ikan-ikan yang kecil sehingga keberlangsungan sumberdaya tersebut semakin menipis. Selain menguras ikan, jaring *trawl* juga sering menyangkut terumbu-terumbu karang sehingga mengalami kerusakan. Penggunaan lampu yang berkekuatan tinggi oleh armada penangkap ikan, yang berdampak ada matinya ikan yang berukuran besar maupun kecil.

Selain penambangan di darat, penambangan juga dilakukan di perairan baik oleh kapal keruk PT timah maupun oleh masyarakat dengan menggunakan mesin tailing. Penambangan di daerah perairan ini, meresahkan nelayan karena air menjadi keruh dan ikan menjadi berkurang. Beberapa desa nelayan melakukan penolakan terhadap penambang yang melakukan pengerukan di pantai dekat desa mereka. Dampak terhadap kegiatan wisata bahari adalah kekeruhan air ini akan menghalangi wisatawan yang akan mandi ataupun berenang dan membayakan penyelam.

Ditambah lagi dengan adanya pemburuan penyu beserta telurnya sampai saat ini (penelitian 2007) masih juga dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Pengambilan penyu yang dilakukan terus menerus dan tanpa batas akan berakibat pada punahnya penyu yang merupakan salah satu asset wisata.

IV.3.4.1. Degradasi Lingkungan: Kendala bagi Pengembangan Pariwisata.

Meskipun sebagian penambanangan telah berhenti setelah peristiwa yang terjadi bulan oktober 2006, tetapi kondisi sumber

daya alam/lingkungan di Kabupten Bangka pada saat ini masih sangat memprihatinkan keberlansungannya. Sumberdaya alam darat maupun perairan mengalami degradasi. Degradasi sumberdaya darat, ditandai dengan berkurangnya areal hutan, baik hutan yang berada di daratan maupun perairan (mangrove). Penurunan areal hutan ini, berarti juga mengancam ekosistem hutan dengan berkurangnya keragaman sumber daya hayati. Kondisi dapat ditemukan baik di daratan pulau-pulau relatif besar dan beberapa pulau kecil. meskipun tidak terdapat data yang pasti berapa hektar lahan hutan yang sudah mengalami kerusakan, tetapi secara visual dapat dilihat bahwa hampir disetiap wilayah di kabupaten Bangka terdapat areal terbuka dengan bentuk muka bumi yang telah mengalami perubahan dengan lubang-lubang besar maupun kecil yang berserakan dan mengalami penambahan setiap harinya.

Kerusakan perairan ditandai dengan kerusakan terumbu karang, beberapa terumbu karang telah tertutup lumpur hingga berwarna kecoklatan, selain itu terumbu karang di beberapa tempat terdapat terumbu karang yang mati. Kerusakan terumbu karang akan berpengaruh pada ekosistemnya seperti diketahui terumbu karang merupakan tempat berkembang biaknya ikan. Dengan rusaknya terumbu karang, akan berpengaruh pada kelangkaan ikan.

Kerusakan perairan juga ditandai erosi pantai, sedimentasi, kekeruhan air dan berubahnya permukaan dasar laut. Kerusakan ini akan berpengaruh baik pada keindahan pantai maupun pada kelangsungan biota laut baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu juga terjadi penurunan populasi penyu. Penyu banyak didapatkan di pulau lampu kawasan Pantai Penusuk. Penyu merupakan asset wisata yang unik karena biota ini sudah jarang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia.

IV.3.4.2. Usaha Pelestarian Lingkungan Sebagai Pendorong Pengembangan Wisata

Usaha memperbaiki kondisi lingkungan baik yang ditujukan untuk kegiatan pariwisata maupun secara tidak langsung akan berpengaruh pada kegiatan pariwisata telah dijalankan oleh instansi pemerintah, swasta maupun perseorangan. Usaha-usaha tersebut antara lain konservasi penyu, budidaya rajungan dan usaha untuk melindungi pantai dari abrasi, penimbunan lubang bekas pertambangan, pemanfaatan lubang bekas penambangan untuk budidaya ikan dan rekreasi.

Konservasi penyu juga dilakukan di pulau Pulau Lampu kecil dan besar, (20 menit naik perahu nelayan dari Pantai Penusuk) dengan cara membatasi pemanfaatan penyu dan telur penyu. Saat ini sering terjadi pemburuan penyu maupun telur penyu. Hal ini karena untuk mengikuti jejak penyu merupakan hal yang mudah bagi pemburu penyu. Untuk membatasi pemburuan penyu penjaga kawasan pulau akan memperingatkan pencari penyu untuk mengembalikan penyu yang telah ditangkap. Meskipun demikian masih terdapat pemburu-pemburu penyu yang lolos dari pengawasan penjaga.

Kegiatan konservasi penyu selain untuk tujuan konservasi, juga dapat dijadikan sebagai bagian dari atraksi wisata untuk tujuan konservasi. Pengunjung pariwisata diikutkan dalam program konservasi dengan ikut melepaskan tukik penyu dengan biaya tertentu. Selain itu pelepasan anak-anak rajungan juga dapat dilakukan sebagai salah satu kegiatan konservasi.

Sumberdaya laut yang sudah jarang dan diusahakan untuk kelestariannya adalah rajungan. Rajungan merupakan sumberdaya laut yang mempunyai nilai ekonomi tetapi sudah jarang

ditemukan di perairan Pulau Bangka. Oleh karena itu usaha membudidayakan rajungan merupakan hal yang akan memberikan kontribusi positif dalam usaha memperkaya keragaman hayati. Usaha Budidaya rajungan kini sedang dilakukan di pantai penusuk oleh peneliti dari Pusat Penelitian Oseonologi_ (P2.O-LIPI) bekerja sama dengan masyarakat nelayan setempat. Peneliti dari LIPI mengusahakan keramba yang digunakan untuk budidaya beserta bibit rajungan yang menggunakan bibit lokal. Sedangkan kegiatan nelayan setempat melakukan pemeliharaan sehari-hari.

Mengingat rajungan merupakan merupakan komoditi yang dapat dijual dalam bentuk segar maupun mengalami proses pengolahan, usaha budidaya rajungan jika berhasil akan membawa manfaat bagi penduduk setempat, dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pemasaran rajungan dapat dilakukan di wilayah domestik Sumatera selatan maupun untuk komoditi ekspor.

Kegiatan budidaya rajungan ini jika berhasil tidak hanya akan mendatangkan sumber pendapatan dan memperkaya sumber daya hayati tetapi juga mempunyai efek sampingan pemeliharaan lingkungan perairan secara luas. Karena setelah adanya keramba masyarakat berusaha untuk tidak menggunakan racun dalam menangkap biota laut. Selain itu masyarakat telah berusaha untuk memberi pengertian jika terdapat pendarang yang menggunakan cara-cara penangkapan biota laut tidak ramah lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi agar percobaan budidaya rajungan berhasil dengan baik.

Usaha perbaikan lingkungan juga dilakukan untuk mengatasi adanya lubang-lubang bekas galian tambang timah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka mempunyai rencana untuk menutup kembali bekas lubang galian terutama lubang yang ukurannya relatif kecil. Pada saat wawancara dilakukan instansi

ini baru melakukan penutupan sebuah lubang, pada tahun 2007 usaha ini belum kelihatan keberlanjutannya. Untuk menutup kolong-kolong/lubang lain yang masih banyak jumlahnya, LH akan bekerjasama dengan masyarakat, agar masyarakat mau melakukan penutupan kolong setelah mereka gali. Saat ini masih banyak lubang yang perlu ditutup kembali agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Adapun untuk lubang-lubang yang relatif luas direncanakan sebagai tempat budidaya ikan.

Berbagai usaha untuk memanfaatkan bekas lubang telah dilakukan dengan mencari bibit ikan yang cocok untuk dibudidayakan di bekas kolong. Dinas perikanan dan kelautan (DKP), saat penelitian dilakukan, sedang mengadakan percobaan pembibitan ikan yang cocok untuk dibudidayakan di bekas kolong. Dengan adanya budidaya ikan ini diharapkan kolong-kolong tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisat pancing yang bisa menarik pengunjung. Namun usaha tersebut sampai dengan penelitian tahun 2007 belum terealisasi.

Selain itu, ada rencana air di bekas kolong yang sudah lama juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber air PAM atau sumberdaya listrik dengan kapasitas yang sesuai dengan ketersediaan air. Kondisi ini bila terealisasi akan membantu wilayah-wilayah belum terjangkau oleh penyediaan air bersih dan listrik terutama pada daerah-daerah yang kan menjadi pusat pengembangan.

Salah satu kegiatan penduduk yang dapat merupakan andil kelestarian lingkungan adalah, kegiatan menanam lada kembali setelah sementara di tinggalkan karena tergiur adanya penambangan timah. Hasil observasi mengungkapkan bahwa di sepanjang jalan tanaman lada baru sudah mulai tumbuh dan bersemi. Tatapi di beberapa lokasi sudah tidak bisa ditanami lagi karena lahan sudah berlubang. Lahan untuk bertani mengalami penyempitan.

BAB V

PENGEMBANGAN PARIWISATA: SEBUAH ANALISIS EKONOMI MAKRO

V.1. Pendahuluan.

Kabupaten Bangka merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar untuk daerah pengembangan pariwisata. Selain itu di Kabupaten Bangka juga terdapat jenis-jenis usaha kecil yang unik yang potensial dalam mendukung pembangunan ekonomi di kabupaten tersebut pada khususnya dan Provinsi Bangka pada umumnya. Kabupaten Bangka juga adalah tempat yang tepat untuk pengembangan pertanian dan perkebunan mengingat masih banyaknya tanah yang belum terpakai secara ekonomis. Meskipun terdapat banyak bekas galian tambang timah inkonvensional yang telah merusak tanah hampir diseluruh Provinsi Bangka, tetapi masih terdapat optimisme dari pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut.

Upaya-upaya pengalihan pembangunan ekonomi dari semula yang sangat mengandalkan sektor tambang ke strategi alternatif terus digalakkan. Saat ini telah dilakukan upaya-upaya pengembangan berbagai sektor selain tambang untuk mendukung strategi tersebut, seperti pariwisata, industri, pertanian, perikanan dan perkebunan. Pariwisata sebagai salah satu sektor andalan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam pengembangannya. Dengan potensi sumber daya alam pantai yang indah serta atraksi kebudayaan yang menarik, pariwisata patut dikembangkan di kabupaten tersebut. dengan berkembangnya sektor pariwisata ini diharapkan dapat memberikan dampak mul-

tiplier pada sektor-sektor lainnya terutama usaha kecil yang pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan.

Pembangunan pariwisata tentunya dapat dilakukan dengan adanya investasi pada sektor tersebut baik dari pemerintah maupun swasta. Upaya-upaya debirokratisasi yang mempermudah perizinan untuk merangsang investor agar menanamkan modalnya tidak hanya pada sektor pariwisata tetapi juga pada sektor unggulan lainnya. Meskipun secara wacana hal tersebut dapat membantu Provinsi Bangka dalam melakukan strategi pembangunan alternatif, namun pada kenyataannya tidak semudah itu untuk melaksanakannya. Ada banyak hal yang menjadi faktor penghambat tersebut seperti kurang baiknya infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan, dan yang paling utama adalah tradisi masyarakat yang sangat mengandalkan timah. Dengan image Bangka sebagai daerah penghasil timah sebagian besar penduduknya sangat bergantung pada sektor tersebut dan berupaya untuk mendapatkan harta dari hal tersebut tanpa memperhatikan pendidikan serta kerusakan lingkungan.

Saat ini dibalik semua potensi dan keoptimisan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan melalui sektor alternatif tersebut masih banyak terdapat berbagai permasalahan yang kompleks yang melatarbelakanginya. Kondisi yang dialami oleh Kabupaten Bangka khususnya dan Provinsi Bangka umumnya adalah terjebak di dalam lingkaran setan yang serba sulit. Menurut Jhingan (1990) upaya pembentukan modal adalah hal yang tepat untuk memotong lingkaran tersebut dan memulai percepatan pembangunan di suatu daerah. Adapun upaya pembentukan modal tersebut adalah dengan adanya investasi. Dengan kondisi Kabupaten Bangka pada khususnya kurang memadainya infrastruktur menjadi disinsentif bagi investor untuk menanamkan uangnya di kabupaten tersebut.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat membuat kabupaten Bangka diminati oleh investor khususnya di bidang pariwisata serta peran serta pemerintah dalam membantu mewujudkan kondisi tersebut. Bagian ini akan memberikan gambaran tentang peluang, ancaman dan kendala yang dihadapi sektor pariwisata Kabupaten Bangka yang dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambatnya yang pada akhirnya dapat memberikan rumusan kebijakan pada tingkat makro.

V.2. Struktur Perekonomian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi terbentuk pada tanggal 21 November 2000 dengan ibukota Pangkalpinang. Provinsi ini terdiri dari 7 kabupaten, 5 kabupaten terletak di Pulau Bangka yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang. Sedangkan 2 kabupaten lainnya ada di Pulau Belitung yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Tabel V.1**Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Bangka	2.950,68	8	60	9
Bangka Barat	2.820,61	5	53	4
Bangka Tengah	2.155,77	4	39	1
Bangka Selatan	3.607,08	5	45	3
Belitung	2.293,69	5	40	2
Belitung Timur	2.506,91	4	30	-
Pangkalpinang	89,40	5	-	35
Kep. Bangka Belitung	16.424,14	36	267	54

Sumber : Indikator Penting Kep Bangka Belitung, BPS 2004

Provinsi ini mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi 4.5% pertahunnya dimana terdapat 3 sektor lapangan usaha utama untuk mendongkrak perekonomian daerahnya, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Pada tahun 2003 industri pengolahan menyumbang 26.37% dari total penerimaan daerah Provinsi Bangka Belitung. Nilai ini pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 26.47%. Sedangkan untuk pertanian serta pertambangan dan penggalian pada tahun 2003 memberikan sumbangan sebesar masing – masing 26.32% dan 15.20%. Untuk tahun 2004 kedua lapangan usaha ini mengalami penurunan menjadi masing- masing menjadi 26.25% dan 15.16%³².

³² Angka-angka ini didapatkan melalui perhitungan dari data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000, dimana pada tahun 2003, angka ini masih bersifat sangat sementara. Sedangkan untuk tahun 2004 masih bersifat sangat-sangat sementara.

Nilai perdagangan luar negeri provinsi ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2003, nilai eksportnya mencapai US\$ 424.037,6 ribu. Nilai ekspor ini masih didominasi oleh ekspor bahan galian tambang seperti timah logam dan pasir kwarsa. RRC, Singapura, Malaysia dan Hongkong menjadi negara tujuan ekspor utama dari provinsi ini. Sedangkan untuk nilai importnya, pada tahun 2003 tercatat sebesar US\$ 16.620,0. Angka ini mengalami kenaikan menjadi US\$ 18.085,9 pada tahun 2004.

Dari paparan data di atas terlihat bahwa kontribusi dari sektor jasa ataupun pariwisata masih relatif rendah, tidak termasuk dalam tiga besar penyumbang PDRB. Hal ini berarti bahwa pariwisata belum menjadi target utama pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung. Kontribusi sektor perdagangan hotel dan restoran yang menonjol hanya di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang.

5.2.1. Gambaran Tentang Keadaan Ekonomi Makro di Kabupaten Bangka.

Bangka pada tahun 2006 diproyeksi oleh BPK mengalami perbaikan hampir pada setiap bagian terutama PDRB dan PDRB perkapita, serta inflasi. Pada tahun 2006 inflasi mengalami penurunan dari 12,90 persen menjadi 11,43 persen. Kendati inflasi di kabupaten tersebut masih tinggi (di atas 2 digit) tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,47 point dari tahun sebelumnya. Sedangkan terjadi kenaikan baik pada PDRB harga berlaku dan harga konstan masing-masing 6,32 persen dan 5,98 persen. Pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0,4 poin.

Tabel V.2
Proyeksi Perekonomian Daerah

Indikator Perekonomian	2005	Proyeksi 2006
PDRB (juta Rupiah)		
Harga Berlaku	2,280,053	2,424,070
Harga Konstan	1,452,635	1,539,461
Distribusi PDRB Sisi Penggunaan (%)		
Konsumsi Masyarakat	59	60
Pengeluaran Pemerintah	13	13
Investasi	19	18
Ekspor Neto	9	8
Distribusi PDRB sisi produksi (%)		
Sektor Primer	47	45
Sektor Sekunder	22	23
Sektor Tersier	31	32
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.57	5.97
PDRB per kapita (Rp)	8,769,694	10,052,730
Tingkat inflasi (%)	12.90	11.43

Sumber : Perw akilan BPK RI di Palembang

Selain membaiknya kondisi perekonomian secara makro ini, kinerja pemerintah daerah juga mengalami peningkatan. Hal ini terbukti lagi dari kajian BPK bahwa pemerintah Kabupaten Bangka telah menetapkan beberapa sasaran yang akan mereka capai dalam pembuatan anggaran serta beberapa tolok ukur kinerja yang sederhana, meskipun pemerintah Kabupaten Bangka belum membuat Standar Pelayanan Minimal dan Standar Analisa Belanja yang menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja dalam membuat anggaran dengan basis kinerja dan menjadi pedoman tolok ukur prestasi dengan beban biaya dan kerja yang seharusnya. berdasarkan kajiannya tersebut pemerintah daerah dapat merealisasikan hampir semua targetnya 100 persen meskipun terdapat dua sasaran yang pencapaian hanya 60 persen, antara lain: sasaran penyakit endemi

malaria yang berkurang dan sasaran pengusaha bidang komunikasi yang meningkat pemahamannya tentang komunikasi (lihat lampiran yang dirujuk dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK).

Perbaikan sampai sejauh ini telah menunjukkan hal yang baik, namun hal tersebut belumlah cukup merangsang investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bangka apabila fasilitas yang bersifat teknis masih belum memadai. Selain itu kondisi inflasi yang masih sangat tinggi mengakibatkan biaya dari daerah tersebut akan tinggi, dibandingkan dengan target inflasi nasional tahun 2007 sebesar 6,5 persen. Tingginya inflasi di kabupaten ini lebih disebabkan oleh *pull factor* yang tidak dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia dalam kebijakannya. *Pull factor* tersebut adalah harga-harga barang secara umum tinggi yang disebabkan oleh tradisi masyarakat yang terbiasa dengan pendapatan yang tinggi akibat kesejahteraan masa lalu bersama timah.

V.3. Potensi Ekonomi Masyarakat yang Dapat Dikembangkan Dalam Merespon Pariwisata.

Selain memiliki potensi atraksi alam dan budaya yang indah dan unik, Kabupaten Bangka juga memiliki kerajinan khas antara lain Pewter timah, kerajinan renda, kerajinan kopian resam, kerajinan akar bahar dan lainnya. Di samping itu Kabupaten Bangka juga memiliki makanan khas seperti pempek, kerupuk kemplang ikan, dan aneka makanan dengan bahan dasar sari laut.

Potensi yang masih bersifat mini atau bahkan mikro ini dapat lebih dikembangkan seiring dengan perkembangan pariwisata di kabupaten tersebut. Sektor pariwisata merupakan sektor yang

mempunyai efek pengganda karena akan memberikan pengaruh pada sektor-sektor lain. Hal ini ditunjukkan oleh Secara ekonomi, sesuai dengan Jenkin yang dikutip oleh Doan dalam www.apo-tokyo.org, pariwisata, secara historis telah memberikan sumbangsih terhadap pembangunan ekonomi. Adapun menurutnya salah satu kontribusi pariwisata tersebut adalah menghasilkan devisa bagi negara, menciptakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung, mempercepat pembangunan ekonomi di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan baik individu maupun perusahaan, dan meningkatkan penerimaan pemerintah melalui pajak. Bennet, Roe, dan Ashley (1999) yang menyatakan bahwa pariwisata dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan, menambah lapangan kerja yang tidak bersinggungan langsung dengan pariwisata (seperti penjual teh, pembuat souvenir, ataupun tenaga kerja kerah biru lainnya), memiliki hubungan bisnis dengan industri kecil.

Maka dari itu pengembangan usaha kecil menengah berbasis masyarakat harus digalakkan guna menyerap sebesar-sebesarnya manfaat dari pariwisata. Usaha kecil atau pun bila dalam jumlah massal disebut menjadi industri kecil di kabupaten Bangka, secara umum dapat di rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel V.3

Industri Kecil di Kabupaten Bangka Tahun 2005

Industri kecil formal				Industri kecil non formal		
Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Rp.000)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
Sungailiat	198	1,574	5,003,860	1,151.00	3,330.00	2,117,432.00
Mendo Barat	5	20	86,450	404.00	1,114.00	692,485.00
Merawang	45	351	919,392	278.00	789.00	505,652.00
Riau Silip	11	48	185,760	298.00	796.00	472,490.00
Pemali	22	127	749,750	160.00	421.00	254,960.00
Bakam	2	11	17,650	96.00	224.00	132,140.00
Puding Besar	2	19	37,000	147.00	377.00	224,270.00
Belinyu	55	417	968,220	1,000.00	2,888.00	1,745,596.00
	340	2,567	7,968,082	3,534.00	9,939.00	6,145,025.00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2006

Sungailiat merupakan kecamatan terbesar di Kabupaten Bangka merupakan sentra industri kecil yang terbesar pertama yang diikuti Kecamatan Belinyu serta Merawang. Nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Sungai Liat memberikan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap nilai investasi total dan tenaga kerja di Kabupaten tersebut. Berdasarkan pengamatan memang tingkat perekonomian secara umum di Sungai Liat adalah yang terbesar di kabupaten tersebut. Dapat dilihat pula industri kecil nonformal dari jumlah usaha dan tenaga kerja lebih besar sedangkan dari nilai investasi lebih kecil dibandingkan dengan industri kecil formal.³³ Hal ini menunjukkan daya manfaat ekonomi pada tingkat mikro lebih terasa pada sektor informal yang

³³ Berdasarkan klasifikasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Industri Kabupaten Bangka dalam Angka definisi dari industri kecil nonformal adalah industri dengan investasi di bawah Rp.5 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) sedangkan industri kecil formal adalah industri dengan investasi dari Rp. 5 juta s/d Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan).

selanjutnya dapat memberikan manfaat tambahan apabila semakin berkembangnya sektor pariwisata dan jumlah wisatawan yang datang ke daerah tersebut. Data tersebut belum menjelaskan jenis-jenis industri mana yang berhubungan erat dengan pariwisata namun dapat dilihat potensi serta konsentrasi sentra industri kecil di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka.

Tabel : V.4

**Data Industri Formal dan Non Formal di Kab.Bangka
Menurut Cabang Industri Tahun 2006**

No	Jenis Industri	Industri Formal			Industri Non Formal		
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Rp 000)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi
1	Pangan	74	411	1,334,592	1,881	5,086	3,103,376
2	Agro Non Pangan dan hasil Hutan	37	339	1,182,090	820	2,357	1,475,871
3	ELMKA	202	1,679	5,342,400	452	1,059	819,103
4	Sandang dan Kerajinan	7	130	92,985	381	1,039	747,075
	Jumlah	320	2,559	7,952,067	3,534	9,541	6,145,425

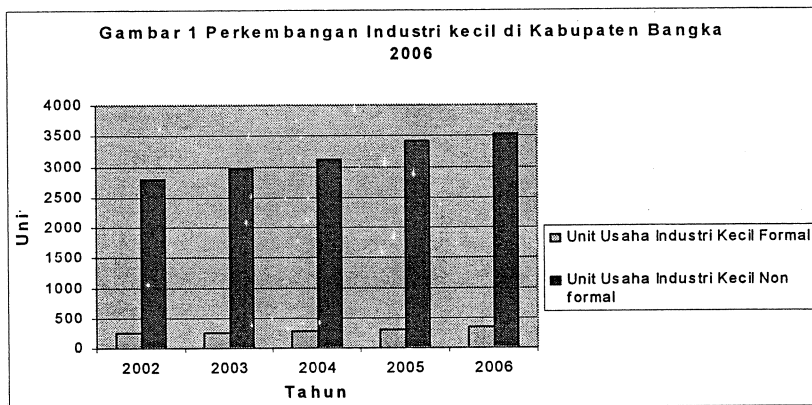
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2006

Untuk produk-produk ciri khas Kabupaten Bangka lebih banyak diproduksi oleh usaha-usaha rumahan atau industri non formal karena pada umumnya kerajinan ataupun makanan khas tersebut belum di produksi secara massal kecuali kerupuk kemplang. Untuk industri kecil formal pada umumnya adalah usaha yang sudah menggunakan modal yang relatif besar karena mampu mendaftarkan perusahaannya dan dikenakan pajak, lebih memproduksi produk-produk yang lebih bersifat umum (kurang menonjolkan ciri khas Bangka). Akan tetapi dari tahun ke tahun industri kecil baik formal maupun informal mengalami kenaikan baik dari sisi unit usaha, tenaga kerja dan investasi. Meskipun nilai investasi dari unit usaha industri kecil non formal lebih kecil dari pada industri formal, namun industri tersebut memberikan

kontribusi yang besar terhadap penyerapan dan penciptaan tenaga kerja.

Grafik V.1

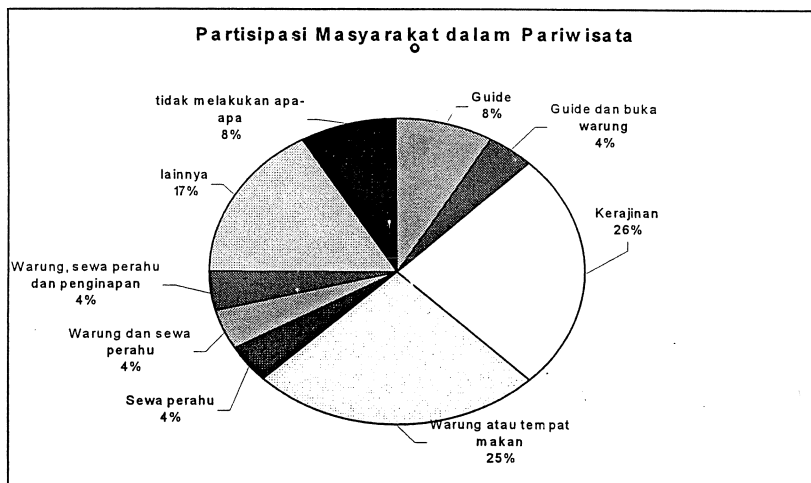
Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Bangka Tahun 2006



Masyarakat Kabupaten Bangka pada umumnya memiliki keahlian turun temurun yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan 83,3 persen responden masyarakat disekitar lokasi pariwisata memiliki keahlian khusus. Mereka tidak terbentur dengan kekakuan akan adat istiadat dan budaya dalam merespon wisatawan yang datang ke sana. Upaya-upaya mereka untuk mengimbangi rendahnya tingkat ketersediaan lapangan kerja formal telah membuat mereka mendirikan usaha-usaha yang bersifat nonformal.

GrafikV.2

Partisipasi Masyarakat dalam Pariwisata



Adapun upaya-upaya mereka dalam merespon perkembangan pariwisata tersebut dengan membuat usaha-usaha yang khas yang dapat ditawarkan kepada wisatawan adalah dengan membuka usaha-usaha seperti kerajinan, warung makan, sewa perahu, penginapan dll. Berdasarkan Gambar 4, sebagian besar masyarakat membuka usaha kerajinan yang lebih bersifat khas Kabupaten Bangka dan warung atau tempat makan dengan proporsi masing-masing 26 persen dan 25 persen. Sekitar 8 persen dari masyarakat tersebut menjadi pemandu wisata bagi wisatawan yang datang ke daerahnya tersebut, terutama dalam menunjukkan tempat-tempat wisata serta bagaimana mengaksesnya. Sedangkan bagi nelayan yang tinggal di sekitar pantai sehubungan dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang menarik minat wisatawan untuk kesana sekitar 4 persen direspon oleh masyarakat disekitar pantai

dengan menyewakan perahu. Tarif yang dikenakan juga masih bervariasi tergantung bagaimana wisatawan tersebut melakukan negosiasi. Selebihnya ada juga masyarakat yang melakukan hal-hal tersebut secara bersamaan.

Dalam memulai dan menjalankan usahanya masyarakat tersebut menerima bantuan yang berupa modal lunak dari beberapa institusi seperti dinas perdagangan dan perindustrian meskipun bagi masyarakat itu sendiri bantuan tersebut tidak terlalu memberikan kontribusi yang besar. Bantuan-bantuan seperti modal lunak dirasakan oleh 33,3 persen dari responden, penyuluhan 12,5 persen, transfer teknologi sebesar 4,2 persen, bantuan lainnya 25 persen sedangkan yang tidak menggunakan bantuan tersebut sebesar 25 persen.

Dengan masih sedikitnya penyuluhan dan bantuan dari dinas-dinas yang berkompeten meskipun secara kuantitas produk-produk dari usaha kecil (terutama non formal) tersebut banyak tetapi secara kualitas masih belum terlalu baik. Hal ini disebabkan tidak tahunya para usahawan tersebut tentang standar baku produk-produknya. Jadi orientasi dari para usahawan tersebut masih bersifat subsisten ataupun melayani permintaan lokal yang tidak terlalu besar. Tentu saja hal ini akan menjadi hambatan bagi mereka apabila ingin mengembangkan usaha mereka lebih lanjut terutama untuk tujuan ekspor.

V.4. Peluang dan Tantangan Pariwisata di Kabupaten Bangka

V.4.1. Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata.

Secara umum infrastruktur pariwisata di Provinsi Bangka Belitung masih kurang memadai. Gucci dkk (2006) menemukan

bahwa masih relatif sedikitnya agen perjalanan untuk mempromosikan pariwisata di provinsi tersebut selain itu meskipun terjadi peningkatan arus masuk dan keluar dari berbagai jalur (udara, laut dan darat) belum bisa dimanfaatkan secara baik untuk pengembangan pariwisata. Selanjutnya, sarana komunikasi meskipun beragam tetapi masih relatif terbatas meskipun di tempat wisatanya, tentunya hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat rasa tidak nyaman bagi para wisatawan.

Penelitian sebelumnya juga telah menyebutkan walau Kabupaten Bangka merupakan daerah yang kontribusi PDRB tanpa timah adalah yang tertinggi, infrastruktur merupakan yang terbaik dibandingkan dengan kabupaten lainnya, jumlah penduduk yang lebih banyak dan kualitasnya yang lebih baik, serta kedekatan dengan pusat administrasi di ibukota provinsi. Selanjutnya, dari hasil penelitian sebelumnya apabila dilihat dari sisi infrastruktur dan tenaga kerja kecamatan Sungailiat di Kabupaten Bangka adalah yang paling siap untuk mengembangkan pariwisata hal ini dapat dilihat dengan ketersediaan hotel, sekolah perhotelan, obyek wisata pantai dan budaya. Hal ini berarti pula Kabupaten Bangka merupakan daerah yang paling siap untuk pengembangan pariwisata. Meskipun demikian secara umum infrastruktur pendukung pariwisata di Kabupaten Bangka masih perlu peningkatan dan perbaikan.

Namun berdasarkan hasil survey pada responden infrastruktur penting pendukung pariwisata dibagi ke dalam beberapa kategori seperti bandara udara, kendaraan umum, hotel/ tempat penginapan, pengelolaan tempat wisata, restoran, tempat berbelanja, agen perjalanan, dan pelayanan masyarakat/pengelola wisata relatif masih terbatas. Dengan kata lain berdasarkan penilaian wisatawan ketersediaan dan kualitas infrastruktur tersebut masih kurang memadai.

V.4.1.1. Bandar Udara

Bandara udara yang merupakan wajah dari Provinsi Bangka Belitung meskipun masih kecil dan terbatas, tetapi telah mendapatkan penilaian yang relatif baik. Hal ini ditunjukkan oleh mulai berkembangnya bandara tersebut sejak dikelola oleh PT. Angkasa Pura II. Dengan dikelolanya secara profesional bandara udara tersebut telah menunjukkan ketertiban dan keteraturan ditambah semakin banyaknya jadwal penerbangan dari dan ke Bangka. Perbaikan dan penambahan mulai diperlihatkan seiring wacana akan dijadikannya bandara udara tersebut sebagai bandara udara internasional.

Meskipun sebagian besar memberikan penilaian baik (48,1 persen) tetapi yang memberikan penilaian kurang juga banyak sekitar 40,7 persen. Hal ini berarti batas antara baik dan kurang tersebut sangat tipis yang menunjukkan penilaian wisatawan di luar Bangka (misalnya Jakarta dan atau Palembang) yang membandingkan bandara udara di Bangka dengan bandara udara di daerahnya. Sementara itu yang menyatakan sangat kurang sekitar 11,1 persen.

V.4.1.2. Kendaraan Umum dan Hotel/Tempat Penginapan

Masalah kendaraan umum sangat pelik terutama bila sudah ke daerah-daerah yang berada diluar kota karena masalah kendaraan umum relatif baik di kota seperti Pangkal Pinang dan Sungai Liat. Sebagian besar responden menyatakan kurang baiknya fasilitas tersebut sekitar 40,7 persen. Hal ini disebabkan oleh susahnya wisatawan ataupun masyarakat yang hendak berpergian ke objek-objek wisata yang terletak di luar kota, apabila hendak berpergian

ke objek-objek tersebut wisatawan harus menyewa mobil yang *nota bene* menelan biaya yang lebih mahal.

Meskipun tidak terlalu banyak hotel di Kabupaten Bangka terutama di luar Sungai Liat, fasilitas tersebut mendapat respon yang moderat dari para wisatawan atau sekitar 37 persen yang menyatakan baik, 33,3 persen menyatakan kurang dan 29,6 persen menyatakan sangat kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penilaian yang subjektif dari responden tentang fasilitas tersebut yang berarti perlunya menegaskan bahwa fasilitas tersebut perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa menafsirkan fasilitas tersebut secara lebih objektif. Sejauh ini dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tidak terlalu banyak terutama di luar Sungai Liat fasilitas hotel masih cukup memadai. Selain itu wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka adalah kerabat dari warga di sana yang biasanya menginap di rumah kerabatnya tersebut (sesuai dengan sumber informasi mengenai Bangka Belitung yang sebagian besar berasal dari saudara ataupun teman yang tinggal di sana).

V.4.1.3 Restoran dan Tempat Perbelanjaan

Restoran di Kabupaten Bangka dalam artian kuantitas dan diversifikasi dirasakan kurang bagi wisatawan. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar responden merasakan kekurangan tersebut sekitar atau sebesar 51,9 persen. Di sisi lain sekitar 37 persen dari total responden menyatakan bahwa fasilitas restoran telah baik di Kabupaten Bangka. Kurangnya kuantitas dan diversifikasi jenis makanan yang ditawarkan oleh restoran-restoran di Kabupaten Bangka tersebut lebih disebabkan oleh sedikitnya investor-investor terutama yang bergerak dalam bidang *food and beverages* yang menyajikan lebih banyak jenis makanan. Dengan sumber daya laut

yang melimpah konsep makananan yang dipasarkan di kabupaten tersebut cenderung sama. Selain itu responden juga mengeluhkan kurangnya tempat berbelanja terutama supermarket. Sekitar 63 persen responden menyatakan kekurangan tersebut, hal ini menunjukkan kemutlakan bahwa tempat berbelanja di Kabupaten Bangka secara keseluruhan masih kurang.

V.4.1.4 Biro Perjalanan/wisata

Gambaran umum mengenai agen perjalanan dan biro wisata di Provinsi Bangka Belitung pada umumnya telah diidentifikasi pada penelitian sebelumnya. Hasil yang didapat adalah Pangkal Pinang sebagai ibukota memiliki jumlah biro wisata terbesar dengan memiliki empat dari sepuluh yang tersedia di seluruh Provinsi Bangka Belitung. Namun biro-biro wisata tersebut tidak tersebar dengan merata, apabila penduduk yang membutuhkan pelayanan, akan pergi ke Pangkal Pinang terlebih dahulu. Namun menurut narasumber jumlah biro wisata yang ada yang ada masih mencukupi untuk saat ini (Gucci dkk, 2006).

Sementara itu, biro perjalanan/wisata di Kabupaten Bangka masih sangat kurang hal ini disesuaikan dengan penilaian responden sekitar 55,6 persen yang menyatakan demikian. Dampak kurangnya biro perjalanan yang bertindak secara tidak langsung sebagai agen promosi adalah kurang diketahuinya kabupaten tersebut oleh masyarakat Indonesia terlebih lagi internasional. Dengan demikian biro perjalanan memiliki peranan yang penting dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Bangka. Kurangnya biro perjalanan di Kabupaten Bangka disebabkan oleh tidak terlalu banyaknya wisatawan yang ingin mengunjungi kabupaten tersebut. Namun dengan tidak terdapatnya biro perjalanan tersebut maka calon

wisatawan akan semakin miskin referensi tentang Kabupaten Bangka.

V.4.2 Profil Wisatawan yang Datang ke Kabupaten Bangka

Berdasarkan penelitian sebelumnya di tentang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di temukan bahwa animo masyarakat wisatawan nusantara jauh lebih besar jika dibandingkan dengan wisatawan asing. Hal yang menyebabkan hal tersebut adalah informasi yang pariwisata di Bangka Belitung belum sepenuhnya diketahui masyarakat dunia dan belum siapnya provinsi ini memberikan pelayanan wisata kelas dunia yang menyebabkan keinginan wisatawan mancanegara tersebut kecil (Gucci dkk, 2006:64).

Dari gambaran tersebut perkembangan wisatawan di Kabupaten Bangka pun demikian dengan masih sangat sedikitnya wisatawan mancanegara yang datang ke kabupaten tersebut. hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan melalui kuesioner, mayoritas wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka adalah wisatawan domestik bahkan kebanyakan berasal dari kabupaten-kabupaten di Provinsi Bangka. Terdapat tiga orang yang berasal dari luar negeri, dua orang dari Belanda dan satu orang dari Amerika Serikat. Berdasarkan wawancara singkat dengan para wisatawan manca negara tersebut tentang hubungan mereka dengan Bangka adalah latar belakang sejarah mereka dari zaman Belanda yang berhubungan dengan pertambangan timah.

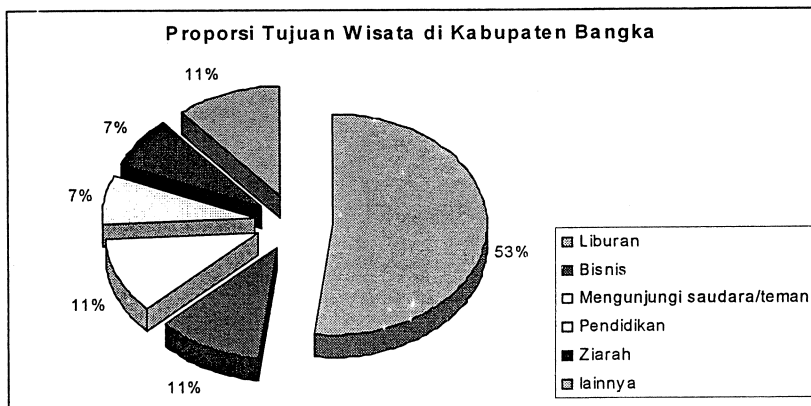
Menurut para wisatawan yang datang mengungkapkan pendapat mereka tentang Pulau Bangka secara umum yang indah. Di Kabupaten Bangka dari total wisatawan yang diwawancara 37

persen berpendapat sangat indah, 51,9 persen indah serta 11,1 persen mengungkapkan biasa saja. Hal ini menunjukkan pendapat mereka tentang potensi alam yang menjadi anugerah bagi Kabupaten Bangka.

Pendapat ini didukung dengan frekuensi mereka yang datang ke Kabupaten Bangka dengan 70,4 persen dari total wisatawan tersebut telah datang ke Bangka lebih dari dua kali. Meskipun para wisatawan yang datang tersebut masih merupakan wisata massal yang dikategorikan ke dalam kelas menengah bawah. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar wisatawan tersebut berpenghasilan 500 ribu sampai satu juta (44,4 persen) dan 1 juta sampai 5 juta (25,9 persen). Saat ini Bangka memang menjadi tempat tujuan untuk berlibur meskipun sebagian besar pantai sebagai daya tarik utama belum terkelola dengan baik.

Grafik V.3

Proporsi Tujuan Wisata di Kabupaten Bangka

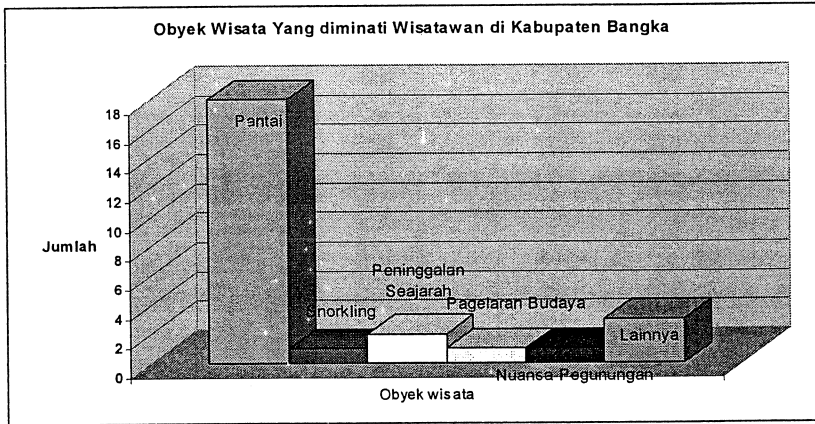


Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan (53 persen) yang datang ke Kabupaten Bangka adalah untuk berlibur, tentu saja hal ini berkaitan dengan indahnya pantai-pantai yang menjadi atraksi utama di Kabupaten tersebut. Selanjutnya ziarah dan mengunjungi kerabat adalah tujuan terpopuler kedua dengan ketiga (sekitar 11 persen untuk keduanya). Kaitan Pulau Bangka secara umum dan Kabupaten Bangka secara khusus dengan ziarah dan kegiatan kerohanian sangat kental mengingat banyaknya atraksi-atraksi budaya yang kental dengan etnis Cina seperti adanya Kuil Dewi Kuan yin, dan pekuburan-pekuburan Cina dan lainnya. Untuk tujuan bisnis, Kabupaten Bangka masih relatif sedikit mengingat belum tumbuh dengan baiknya infrastruktur di sana.

Wisata bahari memang menjadi andalan Pulau Bangka dan Belitung. Di Kabupaten Bangka saja terdapat kurang lebih 10 pantai indah yang menawarkan pemandangan alam. Meskipun belum banyak terdapatnya diversifikasi atraksi di pantai-pantai tersebut namun telah terdapat beberapa pantai yang menyediakan kegiatan laut seperti menyelam. Pantai-pantai memang menjadi primadona dan telah menjadi buah bibir bagi wisatawan yang datang ke sana memang saat ini hanya dapat dinikmati pemandangannya.

Grafik V.4

Obyek Wisata yang Diminati Wisatawan di Kabupaten Bangka



Meskipun pantai menjadi tujuan utama dari para wisatawan (66,7 persen) terdapat obyek wisata lain yang menjadi tujuan wisatawan tersebut. Objek wisata budaya yang kental dengan kebudayaan Cina Melayu memberikan warna tersendiri bagi kabupaten tersebut (lihat gambar 2) yang menunjukkan alternatif tujuan bagi wisatawan. Peninggalan sejarah dan pagelaran budaya lokal serta nuansa pegunungan yang merupakan tujuan alternatif tersebut. Atraksi sejarah yang menarik bagi wisatawan untuk dikunjungi (7,4 persen) misalnya situs kota kapur di kecamatan Mendo Barat, Tugu Otto Toorop, kuburan Belanda Serimenanti makam Depati Bahrin dll. Selain itu alternatif lain adalah atraksi wisata budaya (3,7 persen) yang juga menarik terutama bagi orang Tiong hoa seperti Pha Kak Liang, pemandian Dewi Kwan Yin, Padepokan Barongsai, lempar ketupat, Buang Joeang, Rebo Kasan, Sepintu Sedulang dll. Selain itu wisata lainnya memberikan

kontribusi sebesar 11,1 persen katakanlah seperti pemandian air panas Pemali.

V.4.3 Analisis Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangka

Berdasarkan kondisi sulitnya pembentukan modal di Kabupaten Bangka sebagai asumsi awal maka diperlukan identifikasi peluang dan tantangan yang dimiliki kabupaten tersebut untuk merangsang investasi dari internal maupun external. Berdasarkan penelitian sebelumnya telah didapat kesimpulan bahwa kontribusi sektor perdagangan dan hotel cukup menonjol di Kabupaten Bangka setelah pertanian dan pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut telah menjadi sebuah awal yang baik untuk mengembangkan pariwisata di kabupaten tersebut.

Kabupaten Bangka memiliki potensi alam yang besar untuk pengembangan pariwisata namun hal tersebut masih dirasakan perlu untuk didukung oleh pemerintah dan pemodal untuk pengembangannya. Selain itu berbagai kemudahan birokrasi telah dilakukan untuk merangsang pemodal untuk masuk, selain itu di situs Kabupaten Bangka juga telah dipublikasikan peluang-peluang dan hasil studi kelayakan investasi untuk semakin menggairahkan pemodal. Tentu saja investasi tidak hanya sebatas pada industri manufaktur, perkebunan, perikanan dan pertambangan tetapi juga pariwisata.

Dari sisi industri kecil yang menjadi potensi yang dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan pariwisata juga telah berkembang dengan baik. Masyarakat sekitar objek wisata terutama telah menyadari arti pentingnya pengembangan pariwisata tidak hanya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan tetapi juga

pengembangan daerah. Dengan tingginya sektor nonformal yang biasanya menjajakan produk-produk unik khas Bangka dapat pula memacu wisatawan untuk lebih banyak melakukan pengeluaran.

Dengan demikian kekuatan Kabupaten Bangka yang menjadi modal awal untuk pengembangan pariwisata telah ada tinggal menunggu respon serius dari pemerintah untuk lebih menggalakkan investasi untuk mendongkrak perekonomian besar yang diharapkan bersinergi dengan perkembangan dengan perekonomian kecil dan mikro yang selanjutnya menghasilkan kondisi makro ekonomi yang lebih kondusif.

Meskipun demikian dengan memiliki kekuatan tersebut pada kenyataannya sangatlah sulit untuk mewujudkannya. Mendatangkan pemodal sangatlah susah terutama apabila berkaitan dengan masalah infrastruktur. Meskipun peraturan telah dilunakkan keterbenturan dengan infrastruktur menjadi masalah vital bagi seseorang pemodal yang akan menanamkan modalnya disana. Infrastruktur pendukung yang belum memadai masih menjadi masalah yang pelik untuk pengembangan lebih lanjut, terutama listrik menjadi salah satu masalah vital bagi kabupaten tersebut. Contohnya adalah Kecamatan Belinyu yang sebagian listriknya bergantung pada listrik timah dengan waktu penggunaan yang terbatas. Hal yang menyebabkan kurang terariknya investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bangka lebih disebabkan karena kurangnya energi listrik (meskipun Bangka Power telah di upayakan tetapi masih belum terasa dampaknya bagi masyarakat apalagi untuk keperluan skala besar).

Dari sisi pengembangan pariwisata itu sendiri, infrastruktur pendukungnya juga belum dikatakan memadai. Ketersediaan angkutan yang bersifat massal menuju tempat atau obyek wisata

masih sedikit, keberadaan hotel dan atau tempat penginapan juga menjadi kelemahan mengingat masih sedikitnya kuantitas hotel dan kualitas hotel kelas bintang yang benar-benar profesional. Selain itu faktor-faktor pendukung akomodasi yang membuat wisatawan nyaman berada di sana ataupun lokasi wisata juga masih kurang baik dalam kuantitas maupun kualitas, misalnya restoran, tempat belanja, rumah sakit dll.

Dengan terbatasnya keberadaan biro perjalanan dan wisata (hanya ada satu) menyebabkan promosi yang pariwisata di Kabupaten Bangka kurang diketahui oleh wisatawan terutama wisatawan asing. Selanjutnya, belum terkelolanya secara profesional pantai-pantai di Kabupaten Bangka kecuali (Parai) membuat wisatawan masih enggan untuk berkunjung ke pantai-pantai di Kabupaten Bangka. Hal ini terlihat dari rusaknya fasilitas di Pantai Romodong yang dulu sempat terkenal dan tertata dengan rapi serta susahny mengakses Pantai Tanjung Penyusuk. Terlebih lagi kalau hari sudah memasuki malam suasana di pantai-pantai ini seperti hutan rimba yang gelap karena tidak terfasilitasi dengan listrik sama sekali.

Jumlah wisatan baik mancanegara maupun nusantara menunjukkan adanya perbaikan yang menunjukkan kenaikan meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2003. meskipun di dominasi oleh wisatawan nusantara dan lokal namun hal tersebut menunjukkan potensi wisatawan yang datang ke Provinsi Bangka Belitung secara umum dan Kabupaten Bangka khususnya. Selain itu berdasarkan pendapat wisatawan terutama wisatawan nusantara yang menjadi responden yang pernah datang ke Kabupaten Bangka 92,6 persen menyatakan ingin kembali. Terlebih lagi 70,4 persen dari responden datang ke tempat-tempat wisata lebih dari dua kali,

18,5 persen datang yang kedua kali dan 11,1 persen adalah kedatangan pertama kalinya. Kesempatan ini akan tetap terpelihara bila kualitas pengelolaan tempat wisata ditingkatkan dan keindahannya dilestarikan.

Selain itu sedang dilakukan pembangunan untuk membangun infrastruktur di tempat wisata yang multiguna. Artinya infrastruktur tersebut selain untuk mendukung satu sektor juga dapat digunakan untuk pembangunan sektor lain. Misalnya di daerah tanjung penyusuk, galangan kapal nelayan atau bisa juga dikatakan jembatan yang sedang dibuat yang menghubungkan daratan utama dengan pulau putri dapat memberikan akses kepada wisatawan yang datang ke sana.

Saat ini promosi pariwisata dari setiap daerah yang memiliki konsep keunikan daerah tersebut masing-masing sudah mulai digalakkan. Apabila Provinsi Bangka Belitung umumnya dan Kabupaten khususnya tidak segera merespon hal tersebut maka akan tertinggal jauh ke belakang. Kekuatan promosi pun sangat vital untuk mensukseskan program-program tersebut. Misalnya Sumatera Selatan yang meluncurkan program pariwisata berkonsep wisata air (sungai musi), wisata sejarah, wisata kuliner dll. yang bertema *Visit Musi 2008*.

Adapun atraksi-atraksi yang ditawarkan tersebut hampir serupa dengan apa yang dimiliki Provinsi Bangka Belitung. Namun, dengan lebih beraninya provinsi Sumatera Selatan mengungkap konsep tersebut akan menjadikan daerah tersebut lebih dikenal baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Belum lagi Provinsi Sumatera Barat yang juga giat mempromosikan pariwisatanya, hal ini terbukti dari diadakannya kerjasama provinsi

tersebut dengan Singapura dalam hal pengembangan industri dan promosi pariwisata³⁴.

Selain itu dengan masih banyaknya kapal keruk dari Timah yang beroperasi telah mengganggu kehidupan nelayan dalam menangkap ikan yang selanjutnya merusak daya tarik yang ada di laut dan juga mengganggu mata pencaharian nelayan. Mengingat adanya hubungan yang erat antara perikanan dengan pariwisata seperti menurut Budiman Ginting³⁵ bahwa pariwisata akan mengikuti jika perikanan telah berkembang. Selain itu habitat yang tidak dijaga lagi jadi kurang menarik bagi wisatawan. Meskipun sebagian dari masyarakat telah menyadari arti pentingnya pariwisata untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tetapi karakteristik masyarakat di daerah tersebut pada umumnya masih menjadi penghambat perkembangan pariwisata. Hal ini disebabkan manjanya mental masyarakat Bangka pada umumnya sehingga mereka kurang kreatif dalam memanfaatkan potensi yang tersedia di sekitar mereka.

V.5. Analisis TOWS (Threat-Opportunity-Weakness-Strength)

Berdasarkan deskripsi di atas di dapat bahwa meskipun Kabupaten Bangka memiliki potensi alam dan budaya yang luar biasa untuk pengembangan pariwisata namun hal tersebut tidak cukup untuk mendukung perkembangan pariwisata. Hal yang paling penting untuk pengembangan lebih lanjut adalah dengan mengundang pemodal-pemodal untuk berinvestasi pada sektor-sektor strategis salah satunya pariwisata. Meskipun demikian

³⁴ Wawancara dengan Duta Besar Indonesia di Singapura pada bulan Mei 2007.

³⁵ Wawancara dengan Budiman Ginting (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka) pada bulan Juni 2007.

fasilitas infrastruktur haruslah tersedia untuk semakin merangsang pemodal-pemodal tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus segera menyiapkan segala sarana prasarananya tersebut. Namun hal ini merupakan masalah yang pelik di mana di satu sisi pemerintah tidak terlalu memiliki anggaran yang cukup untuk membangun sarana prasarana tersebut dan di sisi lain pemodal jadi kurang tertarik apabila infrastruktur tersebut belum layak karena akan meningkatkan biaya tetap dari perusahaan tersebut.

Untuk mengatasi masalah secara umum pemerintah hendaknya melakukan langkah-langkah yang mendukung pembentukan modal tidak hanya berasal dari luar namun juga berasal dari dalam. Artinya pemerintah dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa memanfaatkan potensi masyarakat untuk pembentukan modal tersebut yang selanjutnya dapat di investasikan pada infrastruktur penting pendukung sektor-sektor unggulan daerah termasuk pariwisata. Hasil identifikasi dari peluang dan tantangan didapatkan bahwa meskipun Kabupaten Bangka memiliki potensi alam yang indah dan budaya yang beragam tetapi infrastruktur pendukung secara keseluruhan tidak hanya pada pariwisata masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan oleh masih sedikitnya pembentukan modal di daerah tersebut yang dicerminkan oleh masih rendahnya tingkat investasi di daerah tersebut. Untuk mengundang pemodal ke Kabupaten Bangka diperlukan perbaikan dan penambahan infrastruktur.

Berangkat dari masalah umum tersebut maka dilakukan evaluasi lingkungan untuk pengembangan pariwisata secara khusus melalui analisis TOWS dengan matrik IFE (*Internal Factor Evaluation*) dan EFE (*External Factor Evaluation*) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan Purwanto

(2007) yang menyatakan perlunya mendiagnosa lingkungan untuk perkembangan suatu proyek dengan tolok ukur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut. Selanjutnya pada tingkat satuan bisnis (dalam laporan ini masalah yang dihadapi adalah masalah publik) terdapat beraneka ragam faktor yang harus diperhitungkan dalam melakukan analisis yang bersifat strategik sehingga terpilihnya satu alternatif tertentu yang diyakini merupakan keputusan yang paling tepat (Siagian, 1998:172). Selanjutnya dia menambahkan bahwa analisis SWOT (di laporan ini TOWS), pendekatan matrik dan penyusunan model kelompok strategi dasar yang merupakan pendekatan untuk menilai berbagai faktor/alternatif yang layak diperhitungkan itu (Siagian, 1998:172)

V.5.1. Matrik IFE (*Internal Factor Evaluation*)

Pengukuran faktor-faktor internal yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan untuk mengembangkan pariwisata dan potensi masyarakat di Kabupaten Bangka. Matrik evaluasi faktor internal adalah sebagai berikut:

Kelemahan:

1. Infrastruktur secara keseluruhan kurang memadai.
Keadaan infrastruktur secara umum di kabupaten Bangka masih kurang memadai seperti fasilitas untuk kesehatan, jalan, serta pernak-pernik lainnya.
2. Fasilitas listrik tidak memadai.
Fasilitas listrik masih sangat minim hal ini terbukti dari tidak semuanya teraliri listrik PLN, walaupun ada masih terbatas skala kecil. Sebahagian masih mengandalkan listrik timah yang pemakaiannya masih dijatahi.

3. Kurangnya kendaraan umum sehingga mempersulit akses. Kurangnya kendaraan umum untuk ke tempat pariwisata menyebabkan susah akses dan mahal biaya untuk perjalanan kesana, misalkan harus mencarter mobil.
4. Kurang tersedianya biro perjalanan. Kurangnya biro perjalanan membuat perjalanan dari dan ke Kabupaten Bangka masih sedikit. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengenalan pada dunia luar.
5. Rendahnya promosi. Meskipun telah di tampilkan ke dalam *website*, namun promosi tersebut masih kurang mengingat provinsi tetangga telah membuat konsep pariwisata dengan promosi yang jauh lebih agresif.
6. Atraksi pariwisata yang tidak terkelola secara maksimal. Tidak terkelolanya pantai-pantai seperti Pantai Romodong yang telah terbengkalai, Tanjung Penyusuk yang masih sangat susah untuk ditempuh serta yang patai-pantai lainnya yang masih belum terkelola secara profesional.
7. Kurang tersedianya tempat berbelanja, restoran, dan hotel. Kekurangan ini dirasakan oleh wisatawan yang susah mencari hotel yang dikelola secara profesional kecuali Hotel di Pantai Parai, tempat berbelanja yang besar dan menawarkan produk-produk yang lebih beragam, serta restoran yang kurang terdiversifikasi baik dari jenis makanannya maupun kuantitasnya.
8. Produk usaha kecil yang kurang memenuhi standar mutu. Meskipun memiliki produk-produk industri yang berciri khas, dan cukup baik namun belum memenuhi standar mutu. Hal ini terlihat dari produk-produk industri kecil nonformal seperti kerupuk kemplang yang bentuk dan kualitasnya yang tidak beraturan.

9. Inflasi yang tinggi.
Inflasi tinggi sekitar 11 persen membuat semua biaya menjadi tinggi.
10. Masyarakat yang belum sepenuhnya berpartisipasi aktif.
Meskipun telah menyadari arti penting pariwisata untuk menjaga kelestarian lingkungan, namun masyarakat masih tertarik untuk melakukan penambangan yang lebih cepat menghasilkan.

Kekuatan:

1. Memiliki atraksi alam dan budaya yang indah dan beragam.
Kabupaten Bangka memiliki pantai-pantai yang indah misalkan Kecamatan Sungai Liat yang memiliki sepuluh pantai, Kecamatan Belinyu memiliki empat pantai dll serta atraksi budaya seperti upacara keagamaan, kuil-kuil serta tempat-tempat bersejarah.
2. Animo positif masyarakat terhadap pariwisata.
Masyarakat dapat menerima wisatawan dan program pariwisata dengan senang hati.
3. Memiliki partisipasi masyarakat yang dapat dikembangkan.
Memiliki usaha-usaha kecil yang unik dan dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan pariwisata.
4. Dekat dengan ibukota provinsi.
Kabupaten Bangka berjarak sangat dekat dari ibukota provinsi dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang kurang lebih setengah jam.
5. SDM pariwisata adalah yang terbaik dibandingkan dengan kabupaten lain.
Memiliki sumber daya manusia dan pengelolaan wisata yang terbaik di Provinsi Bangka Belitung.
6. Bandara telah dikelola secara profesional oleh PT. Angkasa Pura II.

Bandara udara mulai berkembang seiring dengan telah dikelolanya bandara tersebut oleh PT. Angkasa Pura II, badan usaha milik negara yang memiliki spesialisasi dalam pengolahan Bandara udara.

7. Kemudahan birokrasi untuk berinvestasi.

Tabel V.6
Internal Factor Evaluation (IFE)

	Bobot	Rating	Nilai
Weakness (Kelemahan)			
Infrastruktur secara keseluruhan kurang memadai	0.1	2	0.2
Fasilitas listrik tidak memadai	0.11	2	0.22
Kurangnya kendaraan umum sehingga mempersulit akses	0.05	1	0.05
Kurang tersedianya biro perjalanan	0.04	1	0.04
Rendahnya promosi	0.1	1	0.1
Atraksi wisata tidak terkelola secara maksimal	0.06	2	0.12
Kurangnya ketersediaan tempat berbelanja, restoran, dan hotel	0.03	2	0.06
Produk usaha kecil yang kurang memenuhi standar mutu	0.035	2	0.07
Inflasi yang tinggi	0.045	2	0.09
Masyarakat yang belum sepenuhnya berpartisipasi aktif	0.05	1	0.05
Strength (Kekuatan)			
Memiliki atraksi alam dan budaya yang indah dan beragam	0.1	4	0.4
Animo positif Masyarakat terhadap Pariwisata	0.04	2	0.08
Memiliki potensi masyarakat yang dapat dikembangkan	0.015	1	0.02
Dekat dengan Ibukota propinsi	0.03	3	0.09
SDM pariwisata adalah yang terbaik di bandingkan Kabupaten lain	0.05	2	0.1
Bandara telah dikelola secara profesional oleh PT. Angkasa Pura II	0.025	2	0.05
Kemudahan birokrasi untuk berinvestasi	0.02	3	0.06
Memiliki sekolah pariwisata	0.1	4	0.4
Total	1		2.2

Nilai tertinggi dari matrik IFE adalah 4 dan yang paling terendah adalah 1, sedangkan nilai dari matrik IFE adalah 2,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bangka berada pada posisi rata-rata di dalam.

V.5.2. Matrik EFE (*External Factor Evaluation*)

Pengukuran faktor-faktor eksternal yang dilihat dari peluang dan ancaman dilihat dari Matrik evaluasi faktor eksternal sebagai berikut:

Ancaman

- 1). Visit Musi 2008 dari Sumatera Selatan.
Provinsi tetangga Sumatera Selatan memiliki konsep pariwisata yang telah dipromosikan secara lebih agresif.
- 2). Kapal Keruk timah yang mengganggu perikanan dan pantai.
Keberadaan kapal keruk yang dirasakan oleh para nelayan sangat mengganggu tangkapan ikan yang selanjutnya juga mendegradasi laut dan pantai di kabupaten tersebut.
- 3). Maraknya penambangan inkonvensional oleh masyarakat dan orang luar.
Masih lekat dengan kentalnya paradigma tambang di benak masyarakat Kabupaten Bangka sehingga yang membuat lingkungan semakin memburuk.

Kesempatan

- 1). Wisatawan memuji keindahan.
Ungkapan pujian dari wisatawan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka memiliki peluang untuk menarik mereka untuk datang kembali.
- 2). Wisatawan datang lebih dari dua kali.
Banyak wisatawan terutama domestik telah datang lebih dari dua kali untuk menikmati atraksi-atraksi pariwisata di Kabupaten Bangka. Selain itu kunjungan mereka juga sebagian besar untuk liburan.

- 3). Wisata bahari yang menjadi fokus perhatian pemerintah.
Wisata bahari saat ini telah menjadi fokus perhatian pemerintah untuk menjadi salah satu sektor prioritas untuk dikembangkan.
- 4). Transportasi padat pada bulan-bulan tertentu.
Pada bulan-bulan tertentu jalur transportasi menjadi padat yang mencerminkan banyaknya pengunjung pada bulan-bulan tersebut.

Tabe IV.7
External Factor Evaluation (EFE)

	Bobot	Rating	Nilai
Threat			
Visit musi 2008 dari Sumatera Selatan	0.075	1	0.1
Kapal keruk timah yang mengganggu perikanan dan pantai	0.25	2	0.5
Masih maraknya penambangan ilegal oleh masyarakat dan orang luar	0.25	3	0.8
Opportunity			
Wisatawan memuji keindahan	0.25	2	0.5
Datang lebih dari dua kali	0.05	2	0.1
wisata bahari yang menjadi fokus perhatian	0.055	3	0.2
transportasi padat pada bulan-bulan tertentu	0.07	1	0.1
Total	1		2.2

Nilai tertinggi dari matrik EFE adalah 3 dan yang terendah adalah 1, sedangkan nilai dari matrik EFE adalah 2,2. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bangka berada pada posisi rata-rata di luar.

V.5.3. Matrik TOWS

Tabel V.8
Matrik Internal External

Nilai internal

	4.0	Kuat (3.0)	Rata-rata (2.0)	Lemah (1.0)
Tinggi (3.0-4.0)	3.0	Grow	and	Build
Rata-rata (2.0-2,99)	2.0	Hold	and	Maintain
Rendah (1.0-1.99)	1.0	Harvest	and	Divest

Dari nilai IFE (2.2) dan EFE (2.2) matrik maka Kabupaten Bangka harus berada pada kolom pertahankan dan pelihara. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah dicapai sekarang terus dipertahankan dan dipelihara sembari membangun dengan perlahan-lahan (tidak agresif).

Tabel V.9
Matrik TOWS

	Kekuatan (K)	Kelemahan (L)
	<ul style="list-style-type: none"> • Atraksi wisata alam dan budaya • Animo masyarakat • Potensi ekonomi masyarakat • Dekat dengan ibukota • SDM pariwisata • Pengelolaan bandara secara profesional • Kemudahan berinvestasi • Sekolah pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur • Fasilitas listrik • Biro perjalanan • Promosi • Pengelolaan tempat wisata. • Tempat belanja, restoran, hotel. • Standar mutu produk usaha kecil lokal. • Inflasi • Partisipasi masyarakat
Peluang (P) <ul style="list-style-type: none"> • Kekaguman wisatawan • Kunjungan padat pada bulan-bulan tertentu • Perhatian pemerintah • Kedatangan lebih dari 2 kali 	Strategi Kekuatan-Peluang: <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan atraksi alam dan budaya yang lebih baik (K1.P1). • Kerjasama dengan maskapai penerbangan (K6.P2). • Alokasi anggaran pemerintah yang lebih besar (K7.P3). 	Strategi Kelemahan-Peluang: <ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi infrastruktur (L1.P1). • Pemeliharaan tempat wisata (L5.P1). • Pembuatan/penerbangan supermarket terkenal (L6.P2). • Memelihara stabilitas ekonomi makro (L8.P3).
Ancaman (A) <ul style="list-style-type: none"> • Visit Musi Year 2008 • Tambang ilegal • Kapal keruk 	Strategi Kekuatan-Ancaman: <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan konsep pariwisata (K5.A1). 	Strategi Kelemahan-Ancaman: <ul style="list-style-type: none"> • Promosi pariwisata (L3.A1). • Penyuluhan pada masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan (L9.A2).

Dari matrik tersebut di atas terdapat dua strategi untuk tetap mempertahankan dan memelihara apa yang telah dilakukan. Adapun strategi untuk mempertahankan dan memelihara tersebut adalah dengan melakukan pengelolaan atraksi wisata alam dan budaya dengan lebih baik, melengkapi infrastruktur, memelihara tempat wisata yang sudah ada, dan melakukan promosi.

V.5.4. Langkah-langkah yang Perlu Ditempuh untuk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangka

Berdasarkan analisis TOWS di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata dapat dikembangkan lebih lanjut secara perlahan-lahan dengan mempertahankan dan memelihara apa yang telah di capai selama ini. Hal ini juga didukung oleh berbagai keterbatasan seperti infrastruktur, listrik, pengelolaan dan pemeliharaan tempat wisata dan promosi pariwisata yang memakan waktu yang cukup lama (jangka menengah-panjang).

Terdapat banyak langkah yang dapat dilakukan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka terdapat langkah-langkah strategis yang menjadi langkah-langkah utama dan dapat dijalankan terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah strategis tersebut (lihat tabel 7) adalah sebagai berikut:

- 1). Melengkapi infrastruktur. Dengan kondisi infrastruktur yang sekarang yang kurang memadai maka sangat perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Perkembangan infrastruktur serta fasilitas terutama listrik mutlak diperlukan untuk peningkatan image Kabupaten Bangka sebagai kabupaten tujuan wisata. Kerjasama dengan pihak luar negeri serta melakukan penerbitan surat utang pemerintah daerah apabila telah selesai digodok (sekarang masih digodok di DPR).
- 2). Pengelolaan tempat wisata yang lebih baik. Dengan melakukan hal ini diharapkan ketertarikan konsumen yang pada awalnya sebatas kagum dan memuji keindahan atraksi-atraksi pariwisata menjadi lebih bersifat partisipatif. Hal ini berarti dengan keadaan tempat wisata yang terkelola dengan baik, lengkap dengan segala fasilitasnya akan membuat wisatawan untuk

tinggal lebih lama dan tentunya memberikan efek multiplier lebih lanjut. Pengelolaan ini dapat melibatkan badan-badan yang telah berpengalaman dibidangnya yang dapat dicari di dalam dan luar Kabupaten Bangka.

- 3). Pemeliharaan adalah hal yang mesti benar-benar diperhatikan, jangan sampai terjadi keterbengkalaian yang berujung pada kerusakan. Pembangunan fasilitas-fasilitas di tempat wisata harus berorientasi jangka panjang dan bermanfaat. Untuk kasus yang disesalkan adalah keadaan Pantai Romodong yang pernah memiliki fasilitas yang lumayan baik tetapi keadaannya sekarang terbengkalai.

BAB VI

SOLUSI ALTERNATIF PENDUKUNG PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA Di TELUK KLABAT KECAMATAN BELINYU

VI.1. Pendahuluan

Prospek industri pariwisata Indonesia diprediksikan WTO akan semakin cemerlang, dengan perkiraan pada tahun 2010 akan mengalami pertumbuhan hingga 4,2% per tahun. Selain itu sektor industri pariwisata nasional memberikan kontribusi nasional bagi program pembangunan. Sebagai contoh, pada tahun 1999 sektor pariwisata menghasilkan devisa langsung sebesar US\$ 4,7 juta, serta menyumbang 9,61% pada PDB dan menyerap 8% angkatan kerja nasional (6,6 juta orang) pada tahun yang sama. Selain faktor-faktor di atas, industri pariwisata juga memiliki karakter unik, bahwa sektor pariwisata memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap distribusi pendapatan penduduk di kawasan sekitar pariwisata, elastis terhadap krisis nasional yang terjadi dalam arti tidak terlalu terpengaruh oleh krisis keuangan dalam negeri, ramah lingkungan serta kenyataan bahwa industri pariwisata merupakan industri yang nir konflik.

Dengan melihat potensi pariwisata yang begitu menjanjikan, namun pula sarat dengan risiko ketidakpastian, pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Bangka-Belitung membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Sinergitas ini bisa dijalin mengingat masing-masing aktor memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap lingkungan sekitarnya.

Dengan berjalannya komunikasi yang baik, sinergitas antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat dapat terjalin harmonis, akan dapat dipastikan bahwa percepatan pembangunan Provinsi Bangka-Belitung pada umumnya, dan Kecamatan Belinyu pada khususnya melalui stimulasi pembangunan sektor pariwisata dapat terealisasikan secepatnya.

Selanjutnya, dalam pembangunan daerah Provinsi Bangka-Belitung yang karakteristik perekonomiannya lebih didominasi oleh keberadaan komoditas timah, menyisakan sederet persoalan yang saling kait mengkait antara sektor bisnis, masyarakat dan pemerintah. Kasus pengrusakan kantor gubernur Provinsi Bangka Belitung misalnya, berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat atas penghentian tambang inkonvensional. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten menimbulkan ketidakpastian regulasi dan mendorong konflik antar instansi pemerintah (Zulkarnaen et.al., 2006). Kebijakan yang menetapkan pasir timah sebagai komoditi bebas menyebabkan pesatnya pertumbuhan tambang rakyat dan ekspor pasir timah berskala menengah dan kecil tanpa reklamasi lingkungan.

Namun dengan model penambangan ini masyarakat dan pemerintah lokal memperoleh pendapatan cukup besar dibandingkan jika hanya dikelola perusahaan besar seperti Kobatin dan PT. Timah, dan bahkan perusahaan besar mendapat pasokan pasir timah dari tambang kecil dan menengah ini. Saat harga timah membaik dan ada peningkatan ekspor saat itu pula datang kebijakan pelarangan tambang timah sehingga terjadi gerakan protes. Pengrusakana kantor gubernur oleh sejumlah orang lokal hanya merupakan ungkapan dan simbol resistensi masyarakat dan pemerintah lokal terhadap pemerintah pusat atas ketimpangan pendapatan antara Pusat dengan Daerah dari hasil tambang timah (Prayogo, 2006).

Pembangunan ekonomi suatu kawasan disadari atau tidak telah memberikan keunikan dan kemanfaatan tersendiri baik secara langsung maupun tidak bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini dikarenakan keterkaitan pembangunan antar sektor memberikan dampak positif maupun negatif pada sektor lainnya. Provinsi Bangka Belitung misalnya yang dari sejak zaman penjajahan Belanda merupakan kawasan basis pertambangan timah dan lada, setelah *boom* timah dan lada mulai memudar, ternyata menyisakan banyak potensi pariwisata yang belum tergarap secara profesional.

Kenyataan ini baru disadari oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, di Kabupaten Bangka Induk misalnya, kontribusi sektor pariwisata menempati urutan nomor dua dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), setelah pertambangan³⁶. Sayangnya, kehadiran sektor ini belum bisa dikatakan sebagai sebuah industri pariwisata yang mandiri, mengingat masih lemahnya infrastruktur pendukung bagi berkembangnya industri ini. Apabila diperbandingkan dengan Provinsi Bali yang *notabene* sektor pariwisatanya merupakan sektor unggulan, ketersediaan pelayanan infrastruktur dan sektor pendukung pariwisata lainnya telah berkembang dengan baik.

Dalam konteks ini menjadi jelas bahwa secara ekonomi dampak dari keberadaan obyek wisata dapat menjadi stimulan bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Terlebih dari itu, penciptaan *multiplier effect* dapat pula dihitung dan dikembangkan bukan hanya dari peningkatan pendapatan masyarakat maupun pembukaan lapangan kerja baru, tetapi juga peningkatan nilai tambah sosial lainnya seperti membaiknya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

³⁶ Hasil wawancara dengan dinas pariwisata Kabupaten Bangka Induk.

Meskipun demikian sektor pariwisata sebagai sektor jasa memiliki kerentanan yang sama seperti sektor jasa lainnya (misalnya keuangan dan perbankan) yaitu rentan terhadap isu-isu negatif dan gejolak politik. Terutama pada kondisi krisis yang menurunkan daya beli masyarakat, sektor pariwisata menjadi sangat tidak menarik, meskipun dampak yang ditimbulkan krisis terhadap pariwisata tidaklah sama dengan dampak krisis terhadap ekonomi secara umum, seperti yang dikemukakan Dwyer and Forsyth (1993):

Economic impacts, such as the change in GDP resulting from the world crisis in tourism, are not the same as changes in economic benefits or welfare. The impact on GDP is a gross measure of the change in value of output as the result of an event. This addition to output normally requires additional inputs – of land, labour and capital – to enable it to be produced. These inputs have a cost and this cost must be deducted from the change in the value of gross output if a measure of the net economic gain is to be made.

Dengan melihat potensi pariwisata yang begitu menjanjikan, namun pula sarat dengan risiko ketidakpastian, pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Bangka-Belitung membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Sinergitas ini bisa dijalin mengingat masing-masing aktor memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap lingkungan sekitarnya.

VI.2. Pembangunan Maritim: Kesiapan Pengembangan Pariwisata di Kab. Bangka

Sebagai negara kepulauan dengan luas 4 juta km² dan panjang pantai 81.000 km Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara lain. Terdapat banyak sekali potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pemasukan negara, seperti perikanan, sumber mineral laut maupun pariwisata. Akan tetapi orientasi pembangunan Indonesia yang lebih menitikberatkan pada pembangunan darat menyebabkan potensi ini belum digarap sepenuhnya sehingga pembangunan maritim di Indonesia tertinggal dengan negara lain. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan sektor maritim Indonesia tertinggal yakni, pertama, kebijakan maritim belum menyentuh aspek-aspek strategis yang mampu mengikat dan memayungi instrumen ekonomi maritim, seperti sektor perikanan, pertambangan dan energi lepas pantai, pariwisata bahari, transportasi laut dan pelabuhan, serta sumber daya manusia di sektor maritim. Kelima sektor ini tidak diwadahi dengan baik oleh sebuah kebijakan maritim yang terpadu, lintas sektoral, saling menunjang, serta didukung oleh sektor keuangan yang berpihak pada pengembangan maritim (Kamaluddin: 2005). Pada dasarnya terdapat 5 pilar utama dalam pembangunan maritim, (1) Membangun kembali wawasan kebaharian; (2) Penegakan kedaulatan dan hukum laut; (3) Pembangunan industri maritim; (4) Pengelolaan kawasan maritim; dan (5) Pembangunan hukum maritime (Heri, 2005). Akan tetapi kelima pilar tersebut belum sepenuhnya menjadi target pembangunan pemerintah Indonesia.

Permasalahan dalam titik berat orientasi pembangunan ini tentu saja berdampak pada daerah atau provinsi yang mempunyai basis maritim dan pulau-pulaunya. Permasalahan ini belum

ditambah dengan adanya otonomi daerah yang menyebabkan setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dengan menggenjot sektor-sektor ekonomi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan keunggulan-keunggulan komparatif daerahnya. Hal ini sangat terlihat sekali di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Sebagai Provinsi Kepulauan, Bangka dan Belitung justru dikenal sebagai daerah penghasil timah saja padahal potensi maritimnya tidak kalah menjanjikan untuk dikembangkan. Terlihat sekali pada struktur perekonomian daerah Bangka, industri pengolahan menjadi target penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan sektor perikanan maupun pariwisatanya justru tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan daerah padahal potensi alam daerah ini sangat melimpah. Terdapat kurang lebih 16 pantai dan beberapa pulau kecil yang semuanya belum dikembangkan secara maksimal.

VI.2.1. *Existing Condition* Lokasi Wisata Tanjung Penyusuk di Kecamatan Belinyu

Lokasi wisata Tanjung Penyusuk merupakan lokasi wisata terpilih. Secara geografis lokasi ini terletak di kawasan Teluk Klabat Kecamatan Belinyu yang termasuk dalam Kabupaten Bangka. Perairan sekitar Teluk Klabat, memiliki ekosistem muara sungai (estuari), ekosistem mangrove dan ekosistem karang. Bentuk Teluk Klabat cukup unik seolah-olah terdiri dari dua bagian yaitu bagian luar melebar di tengah menyempit di mana terletak Pelabuhan Belinyu dan bagian dalamnya melebar lagi. Bagian dalam teluk memiliki dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Layang dan Sungai Antan. Kedua muara sungai tersebut ditumbuhi hutan mangrove cukup lebat (Djamali, 2006).

Hasil penelitian dari P2O-LIPI tentang potensi sumber daya kelautan di kawasan teluk klabat dapat disarikan sebagai berikut (Djamali, 2006):

1. Potensi jumlah jenis ikan karang yang ditemukan di Perairan Teluk Klabat sebelah luar adalah sebanyak 81 jenis. Pada perairan teluk luar sisi bagian timur tingkat keanekaragaman jenisnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bagian sisi barat. Beberapa jenis ikan hias yang mempunyai nilai ekonomi terdapat di perairan ini seperti enjiel biru (*Pomacnathus annularis*) sehingga perlu dijaga kelestariannya.
2. Dari hasil transek karang sebanyak 214 jenis yang mewakili 18 famili berada di perairan luar Teluk Klabat. Perairan Teluk Klabat bagian timur luar persentase tutupan karang *Acropora* antara 10,37 – 44,70 % dan 6,57 – 23,57 % sedangkan non *Acropora* 30,20 – 36,23 % dan 55,63 – 69,17 % kondisi yang demikian dapat dikategorikan sangat baik.
3. Hasil uji toksikologi kualitas sedimen dari perairan Teluk Klabat masih dalam kondisi relatif baik, meskipun membutuhkan pengujian kualitas sedimen lebih lanjut.
4. Kadar logam berat (Pb, Cd, Cu, Cr, Zn, Mn, Ni dan Fe) di Perairan Teluk Klabat baik permukaan dan dasar masih dalam ambang batas diperbolehkan untuk budidaya perikanan dan konservasi menurut Peraturan Pemerintah No. Kep-02/Men. KLH/I/1998.
5. Dari hasil analisis kualitas air perairan Teluk Klabat beberapa parameter kimia zat hara mengindikasikan perairan ini relatif belum tercemar dan masih baik untuk peruntukan budidaya perikanan dan pariwisata.
6. Perairan Teluk Klabat secara umum masih bersih dan layak bagi budidaya maupun aktivitas wisata bahari.

7. Kondisi perairan Teluk Klabat ditinjau dari kandungan klorofil fitoplankton dan seston yaitu: kandungan klorofil fitoplankton relatif tinggi ($> 2,0 \text{ mg/m}^3$) ditemui di perairan luar teluk, diduga akibat pengaruh suplai nutrisi dari Sungai Musi.

Djamali (2006) juga mencatat adanya berbagai ancaman yang kiranya akan mengancam kelestarian alam di kawasan teluk klabat, di antaranya yaitu:

1. Wilayah terumbu karang dan mangrove sebagai tempat tumbuh dan berkembang biak berbagai jenis ikan, perlu dijaga kelestariannya karena akhir-akhir ini perusakan hutan bakau dan penambangan terumbu karang semakin meningkat.
2. Cemar minyak diduga merupakan salah satu bahan pencemar yang mengancam perairan Teluk Klabat, khususnya di perairan pantai timur Teluk Klabat bagian luar. Perairan yang kaya bahan organik ditemukan di perairan bagian dalam Teluk Klabat. Aliran Sungai Musi diduga turut mempengaruhi kualitas air laut di Teluk Klabat, khususnya di mulut teluk dan Teluk Klabat bagian luar.
3. Nilai kandungan klorofil fitoplankton dan seston yang relatif rendah $< 0,5 \text{ mg/m}^3$ menempati hampir seluruh perairan teluk, kondisi yang demikian menggambarkan perairan teluk kurang berpotensi untuk perikanan. Diduga kondisi yang demikian diakibatkan oleh kegiatan penambangan di perairan teluk. Sebagian besar Teluk Klabat memiliki kadar seston berkisar antara 15 – 35 mg/l. Kandungan seston yang tinggi di perairan teluk, selain akibat suplai berbagai material yang terbawa aliran sungai yang bermuara di teluk, diduga juga akibat kegiatan penambangan yang terjadi di perairan teluk.

Dari data dan informasi sumber daya laut, lingkungan dan oseanografi menunjukkan bahwa Perairan Teluk Klabat dan sekitarnya tergolong masih cukup baik untuk peruntukan budidaya perikanan dan pariwisata namun perlu diwaspadai akibat kegiatan tambang timah serta adanya indikasi cemaran minyak.

Lokasi wisata Pantai Tanjung Penyusuk secara eksplisit memiliki keeksotisan tersendiri, meskipun daya tariknya masih hanya sebatas panorama alam yang masih natural. Pantai Tanjung Penyusuk yang memiliki karakteristik pantai landai dengan pasir putih dan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang-surut air laut (Gusnelly, 2006). Selain itu, di pantai ini juga dapat ditemui batuan granit yang besar-besar, yang tumbuh secara alami. Meskipun sepanjang Pantai Tanjung Penyusuk relatif aman digunakan sebagai tempat berenang dan berekreasi, namun perlu dijaga areal batas bahaya untuk para wisatawan, mengingat lokasi ini berbatasan langsung dengan laut lepas. Selain untuk berenang, aktivitas rekreasi yang dapat dilakukan di Pantai Tanjung Penyusuk sangat beragam seperti berlabuh dengan *pompong*³⁷ ke Pulau Lampu dan Pulau Putri, voli pantai, menikmati alam bebas sekitar pantai, memancing, membakar ikan, *snorkling* melihat indahnya karang-karang didasar laut, dan lain sebagainya. Hanya sayangnya, karena debur ombak di lokasi ini cenderung rendah, sehingga aktivitas *surfing* dan *diving* yang biasanya menjadi aktivitas favorit wisatawan mancanegara tidak dapat dilakukan di sini. Meskipun, berwisata di lokasi ini relatif murah, dimana wisatawan diharuskan membayar retribusi sebesar Rp.1000 untuk masuk lokasi ini, dan dengan membayar Rp.10.000,- mereka sudah dapat berperahu menikmati keindahan pulau-pulau di sekitar lokasi pantai.

³⁷ Sejenis perahu tradisional milik nelayan.

Untuk dapat membuat lokasi ini menjadi atraktif bagi pengunjung ada beberapa aspirasi dari masyarakat maupun wisatawan yang kami sarikan sebagai berikut³⁸:

1. Perlunya penataan warung-warung permanen di sekitar pantai. Hingga saat ini, warung-warung hanya berupa lapak-lapak sederhana yang hanya ada setiap hari libur dan hari besar saja. Ada sekitar 10 lapak yang tersedia, biasanya penjual berasal dari masyarakat sekitar pantai, barang dagangannya pun bermacam-macam seperti makanan khas bangka pempek, otak-otak, *snack*, *soft drink*, dan sebagainya.
2. Tetapi belum ada warung yang khusus untuk ikan bakar segar ataupun penjual souvenir-souvenir yang menunjukkan identitas Bangka. Dari hasil kuesioner dan wawancara langsung dengan masyarakat, sebenarnya ada keinginan dari masyarakat untuk memanfaatkan rumah siput, ataupun rumah rajungan untuk cenderamata. Keinginan ini belum terlaksana optimal mengingat masih rendahnya pendidikan dan keahlian mereka, sehingga perlu didukung oleh pelatihan dan suntikan dana dari pihak-pihak yang terkait.
3. Pentingnya pembangunan fasilitas umum seperti MCK dan Musholla yang memadai. Swadaya masyarakat yang dipelopori oleh bapak Surjadi (penjaga pantai) cukup bagus, dengan modal sendiri mereka membangun MCK yang sederhana demi kenyamanan wisatawan. Seharusnya ini juga menjadi *point* penting bagi dinas terkait, dan tidak perlu menunggu dari investor jika hanya untuk pembangunan MCK dan musholla.

³⁸ Hasil *focus group discussion* bersama masyarakat nelayan dan penjaga pantai tanjung penyusuk, serta beberapa hasil kuesioner yang disebarikan kepada masyarakat dan wisatawan baik lokal maupun asing.

4. Kebersihan pantai harus tetap dijaga, beberapa keluhan dari wisatawan yang menyatakan banyaknya agas (sejenis nyamuk) yang mengganggu ketika mereka berjemur di pantai.
5. Pembangunan fasilitas penginapan, khususnya di Pulau Lampu bisa menjadi teobosan awal yang dapat dilakukan, mengingat daya tempuh wisatawan yang cukup jauh untuk mencapai lokasi ini, disayangkan jika hanya digunakan untuk menikmati indahnya panorama hanya untuk 2-3 jam saja. Keinginan untuk memanfaatkan rumah-rumah penduduk sudah menjadi tawaran yang menarik, namun demikian kondisi rumah penduduk yang kurang layak juga bisa menjadi kendala, selain itu rumah nelayan di kawasan pantai sifatnya hanya sementara jika disewakan kepada wisatawan dimana nelayan akan tinggal?. Solusi untuk ini perlu dipikirkan kembali.
6. Penerangan juga menjadi kendala, bukan hanya di lokasi pantai, tetapi di Kabupaten Bangka secara umum. Perlunya listrik untuk penerangan di sekitar pantai juga menjadi aspirasi dari wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai di malam hari.

VI.3. Kecamatan Belinyu

Secara statistik Kecamatan Belinyu memiliki luas wilayah 546,50 Km² yang terbagi dalam 3 kelurahan dan 5 desa definitif. Jumlah penduduk mencapai 38.681 jiwa pada tahun 2006 dengan kepadatan 70,78 jiwa/Km².

Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bangka-Belitung yang menetapkan enam sektor wilayah pembangunan ekonomi seharusnya perlu dikaji ulang. Selain mengingat semangat pada saat penyusunan RTRW dilakukan pada

tahun 1999, sebelum terbentuknya Provinsi Bangka Belitung, RTRW ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan potensi wilayah Bangka Belitung pada saat ini. Dalam kajian tersebut di antaranya disebutkan bahwa³⁹:

1. Satuan Wilayah pembangunan Sungailiat yang meliputi Kecamatan Sungailiat, Merawang dan Pangkalan Baru, potensi yang akan dikembangkan sebagai daerah industri pariwisata dan pertambangan.
2. Satuan Wilayah Pembangunan Bangka Utara yang meliputi Kecamatan Belinyu, Jebus dan Riau Silip potensi yang akan dikembangkan adalah pertambangan, dan industri bahan galian tambang.

Lebih lanjut data dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bangka, di Kecamatan Belinyu pada tahun 2006 terjadi peningkatan untuk industri rumah tangga (industri kecil nonformal) mencapai 1000 unit usaha dengan menyerap kurang lebih 2.888 tenaga kerja. Investasi yang ditanamkan untuk usaha ini hampir 2 miliar. Meskipun secara nominal nilai investasi yang ditanamkan hanya 64% dari total investasi yang ditanamkan oleh industri menengah, kemampuan industri rumah tangga dalam menyerap tenaga kerja 8 kali lipat daripada yang diserap oleh industri menengah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2006).

Kecamatan Belinyu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bangka yang memiliki potensi cukup potensial bagi pengembangan industri perikanan dan industri pariwisata.

³⁹ Lihat laporan akhir “Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Teluk Klabat di Belinyu Kabupaten Bangka”, tahun anggaran 2006. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kecamatan Belinyu memiliki luas wilayah sebesar 546,50 Km² dengan batasan wilayah seperti bagian utara berbatasan dengan Laut Natuna, bagian selatan dan timur berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip, dan bagian barat berbatasan dengan Teluk Kelabat.

Kecamatan Belinyu dapat disebut sebagai kota yang majemuk. Banyak terdapat suku dan etnis yang hidup di kota ini. Suku asli yang ada di Belinyu adalah suku Laut. Berdasarkan analisis wilayah dan potensi daerah serta pengembangan wilayah yang bertujuan untuk merangsang tumbuh dan berkembangnya sebuah wilayah sesuai dengan karakteristik wilayah yang akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Kecamatan Belinyu diharapkan sebagai wilayah industri perikanan dan pariwisata di Pulau Bangka. Sebagai wilayah pariwisata di samping Kecamatan Belinyu adalah Kota Sungailiat yang juga sebagai kota pendidikan.

Kecamatan Belinyu memiliki 3 kelurahan, 5 desa, dan 31 dusun dengan jumlah penduduk pada tahun 2003 adalah sebesar 38.681 jiwa. Jumlah penduduk pria yang ada pada tahun tersebut adalah sebesar 19.678 jiwa dan penduduk wanita 19.003 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 70,78 jiwa / km². Fasilitas yang saat ini tersedia di wilayah kecamatan ini hanya fasilitas kesehatan dan pendidikan. Untuk fasilitas kesehatan, Belinyu cukup terbatas di mana Kecamatan Belinyu memiliki 2 Balai Pengobatan Swasta, 2 Puskesmas, 5 Puskesmas Pembantu dengan 1 Dokter Umum, 6 Dokter Praktek Swasta, 7 Bidan Praktek Swasta, 2 Tukang Gigi Swasta.

Untuk fasilitas pendidikan, Kecamatan Belinyu tersedia sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak,

sekolah dasar hingga menengah atas, dan sekolah khusus agama untuk tingkat dasar (Madrasah Ibtidaiyah). Ketersediaan jumlah guru di Kecamatan Belinyu masih dipandang cukup berimbang. Datanya seperti terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel VI.1

Sarana & Prasarana Pendidikan Kecamatan Belinyu 2003

Uraian	Sekolah			Siswa			Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
TK	-	7	7	-	303	303	-	19	19
SD	28	1	29	4.113	398	4.511	216	16	232
MI	-	1	1	-	15	15	-	5	5
SMP	3	4	7	987	578	1.565	46	49	95
MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA	1	3	4	505	496	1.001	26	31	57
MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMEA	-	2	2	-	606	606	-	33	33
STM	-	1	1	-	127	127	-	14	14
PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: *Data Kondisi dan Potensi, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka*, http://www.bangka.go.id/kec_belinyu.htm

Dilihat dari data pendidikan di atas, maka terlihat bahwa sebagian besar siswa berasal dari sekolah negeri. Jumlah siswa yang cukup besar pada pendidikan dasar, dapat memberikan gambaran bahwa sebagian besar angkatan sekolah di Kecamatan Belinyu adalah pada tingkat sekolah dasar. Untuk penyediaan sarana ruang pendidikan, Kecamatan Belinyu memiliki jumlah sekolah menengah pertama dan atas yang cukup terbatas.

Namun demikian, Kecamatan Belinyu masih dihadapkan oleh persoalan-persoalan dalam memfasilitasi pengembangan sektor wisata dan industri kecil. Fasilitas untuk nelayan, penginapan, rumah makan, transportasi, tenaga listrik, dan biaya

pengembangan obyek-obyek wisata juga masih belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Kecamatan Belinyu juga diharapkan dapat mengembangkan agro wisata pada dua atau tiga tahun kedepan.

Persoalan pertambangan timah ilegal cukup meresahkan masyarakat Beliyu, terutama pertambangan yang dilakukan di laut lepas, karena hal ini mengancam usaha perikanan nelayan kecil. Menurut warga setempat, penambang-penambang nakal di lautan datang bukan dari kota Belinyu, melainkan dari luar, seperti dari masyarakat Bugis. Masalah sumber energi listrik juga menjadi problema tersendiri bagi pengembangan usaha-usaha dan industri kecil di Belinyu.⁴⁰ Persoalan biaya hidup yang cukup tinggi di Belinyu juga menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat Kota ini.

VI. 3. Kecamatan Belinyu

VI.3.1. Karakteristik Perekonomian Kecamatan Belinyu

Meskipun berkontribusi positif terhadap perekonomian Babel secara umum, keberadaan timah juga memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat Babel. Nafsu untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang cukup singkat, dan modal dan tenaga yang relatif murah (*Dak kawak nyusah*) ternyata telah mengakibatkan kerusakan hutan, sungai, kebun, jalan, dan pantai. Lebih dari itu keberadaan tambang illegal dan *small smelter* juga ditengarai merusak akhlak, silaturahmi, budaya berkebun, wajib belajar pendidikan dasar, dan masih banyak kerusakan-kerusakan lainnya yang terjadi, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata (Republika, 2005).

⁴⁰ Hasil wawancara dengan kaum muda Kecamatan Belinyu (Sdr. M. Fauzi), 21 Juli 2007

Karakteristik masyarakat yang seperti ini telah terbentuk berpuluh-puluh tahun lamanya, sehingga dapat menjadi kendala tersendiri bagi masuknya inovasi baru yang bertujuan untuk mengalihkan aktivitas masyarakat dari penambangan timah ke aktivitas ekonomi produktif lainnya. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab PT. Timah semata, ada puluhan perusahaan *small smelter*, PT. Kobatin (PMA Malaysia), dan Eksportir-eksportir timah lainnya yang juga telah mengeruk keuntungan dari bumi Babel ini harus pula memikul tanggung jawab pemulihan ekonomi masyarakat Babel pasca *boom* timah.

Secara statistik kecamatan Belinyu memiliki luas wilayah 546,50 Km² yang terbagi dalam 3 kelurahan dan 5 desa definitif. Jumlah penduduk mencapai 38.681 jiwa pada tahun 2006 dengan kepadatan 70,78 jiwa/Km².

Tabel VI.2

**Jumlah Perusahaan/Usaha Industri Menurut Kelurahan/
Desa di Kecamatan Belinyu Tahun 2005**

No	Kelurahan/Desa	Industri Besar/Sedang	Industri Kecil	Industri Tangga	Rumah
1	Lumut	-	1	5	
2	Riding Panjang	-	2	15	
3	Gunung Muda	-	5	95	
4	Kuto Panji	-	8	275	
5	Air Jukung	-	50	50	
6	Bukit Ketok	2	10	54	
7	Bintet	-	-	4	
8	Gunung Pelawan	2	-	2	
	Jumlah	4	76	500	

Sumber: Belinyu dalam Angka, BPS (2005)

Berdasarkan data statistik yang diperoleh, sektor industri di Kecamatan Belinyu lebih didominasi oleh industri rumah tangga (lihat tabel 6.2). Lebih lanjut data dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bangka, di Kecamatan Belinyu pada tahun 2006 terjadi peningkatan untuk industri rumah tangga (industri kecil nonformal) mencapai 1000 unit usaha dengan menyerap kurang lebih 2.888 tenaga kerja. Investasi yang ditanamkan untuk usaha ini hampir 2 miliar. Meskipun secara nominal nilai investasi yang ditanamkan hanya 64% dari total investasi yang ditanamkan oleh industri menengah, kemampuan industri rumah tangga dalam menyerap tenaga kerja 8 kali lipat daripada yang diserap oleh industri menengah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2006).

Sementara itu cabang industri yang banyak diusahakan oleh industri rumah tangga meliputi industri pangan, agro non pangan dan hasil hutan, logam dan mineral, sandang dan kerajinan umum. Khusus untuk Kecamatan Belinyu cabang industri yang banyak diusahakan adalah sandang dan kerajinan umum. Terdapat 89 unit usaha di cabang industri ini dengan daya serap tenaga kerja 308 orang dan meraup nilai investasi sebesar Rp. 169.900.000. Selain sandang dan kerajinan umum, masyarakat Kecamatan Belinyu juga banyak yang berusaha di cabang industri industri logam dan mineral dan industri agro nonpangan dan hasil hutan. Unit usaha yang bergerak di cabang agro nonpangan dan hasil hutan pada tahun 2006 mencapai 221 unit, tenaga kerja yang terserap sekitar 640 orang, dengan nilai investasi Rp. 400.020.000. sedangkan untuk cabang industri industri logam dan mineral terdapat 107 unit usaha dengan 258 tenaga kerja dan nilai investasi sebesar Rp. 192.200.000.

Tabel VI.3**Data Industri Nonformal Cabang Industri Sandang dan Kerajinan Umum**

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Rp 000)
1	Tukang Jahit/konveksi	36	72	144.000
2	Kain Tenun	-	-	-
3	Renda	25	175	12.500
4	Anyaman Resam	3	6	600
5	Anyaman Pandan	5	12	1.000
6	Anyaman Bambu	3	6	600
7	Anyaman Rotan	1	3	1.000
8	Atap Rumbia	6	12	1.200
9	Ukiran dari Kayu	2	4	4.000
10	Sikat/Sapu sabut kelapa	5	10	2.500
11	Sikat/sapu ijuk	2	6	1.000
12	Kerajinan dari ban bekas	1	2	1.500
	Jumlah	89	308	169.900

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, 2006. "Industri Kabupaten Bangka dalam Angka", Sungailiat

Tabel 6.4**Data Industri Nonformal Cabang Industri Agro Nonpangan dan Hasil Hutan**

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Rp 000)
1	Mebel dari Kayu	39	117	71.100
2	Arang Kayu	6	24	11.475
3	Pertukangan Kayu/kusen	59	117	106.250
4	Mebel dari rotan	7	20	13.090
5	Perahu/Kapal dari kayu	11	27	19.600
6	Peti mati	2	6	3.135
7	Galangan kapal	17	41	32.370
8	Alat rumah tangga dari kayu	78	224	136.500
9	Bak mobil	2	4	6.500
	Jumlah	221	308	400.020

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, 2006. "Industri Kabupaten Bangka dalam Angka", Sungailiat.

Tabel VI.5.

Data industri Nonformal Cabang Industri Industri Logam dan Mineral

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Rp 000)
1	Sablon	4	10	4.900
2	Barang dari Semen	19	56	10.400
3	Batu pecahan	4	12	1.000
4	Tukang kaleng	3	5	2.000
5	Pandai Besi	3	6	3.250
6	Reparasi alat elektronik	8	16	2.400
7	Pandai emas	2	4	1.500
8	Bengkel sepeda	6	12	4.500
9	Bengkel motor	15	37	37.500
10	Tambal ban	9	18	13.500
11	Photo copy	11	22	43.000
12	Photo studio	2	4	7.000
13	Bengkel mobil	2	6	10.000
14	Galangan kapal/perahu	3	10	9.000
15	Bak mobil	2	6	7.000
16	Reparasi jam	3	3	2.250
17	Salon	9	27	27.000
18	Tukang las	2	4	6.000
	Jumlah	107	258	192.200

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, 2006. "Industri Kabupaten Bangka dalam Angka", Sungailiat

Dari pengamatan tim peneliti pembangunan di Kecamatan Belinyu hendaknya diperuntukan bagi pengembangan sektor pariwisata dan industri kecil dan rumah tangga yang mendukung sektor pariwisata. Ada beberapa alasan yang dapat kami sampaikan yaitu:

1. Kecamatan Belinyu memiliki potensi wisata yang cukup beragam baik untuk wisata bahari, wisata sejarah, maupun

wisata massa dan wisata eksklusif. Setidaknya 3S (*sea, sand and sun*) yang masih natural di kawasan pesisir kecamatan Belinyu, khususnya Pantai Tanjung Penyusuk dan pantai rumodong dapat dinikmati baik pada saat sunset maupun sunrise⁴¹.

2. Industri kecil dan rumah tangga yang berkembang di kecamatan Belinyu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan kawasan lainnya khususnya untuk cabang industri kerajinan umum dan makanan khas Bangka. Hampir sebagian besar pelaku usaha kecil yang memproduksi makanan tradisional seperti kemplang, krupuk ikan, otak-otak, empek-empek, serta kue khas bangka tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Selain dikarenakan keterbatasan modal, juga dikarenakan tergiur untuk bertambang timah yang tentunya secara nominal memberikan pendapatan yang lebih dan dikerjakan dalam kurun waktu yang relatif singkat dibandingkan berusaha di industri ini.
3. Budaya lokal yang masih terinspirasi dari budaya khas China, baik yang berupa upacara ritual, pakaian, kerajinan, tarian dan nyanyian seharusnya dapat dijadikan potensi obyek wisata yang layak jual.
4. Terdapat suku terasing di Kecamatan Belinyu yang memiliki keunikan tradisi yang berbeda dengan masyarakat Belinyu pada umumnya yang merupakan masyarakat majemuk, merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan

⁴¹ Lihat laporan tahun pertama tentang identifikasi lokasi pariwisata yang potensial di provinsi Bangka Belitung dalam “Wisata Bahari, Tenaga Kerja, dan Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan di Propinsi Bangka Belitung”, PSDR – LIPI, 2006.

5. Pemanfaatan hasil sumber daya alam, khususnya sumberdaya perikanan yang melimpah, menjanjikan ketersediaan bahan baku yang mencukupi bagi keberlangsungan industri kecil dan menengah yang berbasis SDA.

Berdasarkan data empiris yang tim peroleh dari responden menunjukkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat belinyu cenderung untuk memilih menjadi seorang wira usahawan daripada sektor usaha lainnya terutama pegawai negeri sipil. Kondisi yang bertolak belakang untuk masyarakat yang berpendidikan rendah yang masih menggantungkan penghidupannya dari sektor pertanian baik sebagai petani maupun nelayan.

Tabel VI.6

Data Cross-Tabulation Pekerjaan dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Belinyu Tahun 2007

Pekerjaan * Pendidikan Crosstabulation							
		Pendidikan					Total
		sd	smp	sma	s0	s1	
Pekerjaan dagang	Count	1	0	0	0	0	1
	% of Total	4.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	4.2%
dagang roti	Count	0	0	0	0	1	1
	% of Total	.0%	.0%	.0%	.0%	4.2%	4.2%
ibu RT	Count	0	1	0	0	0	1
	% of Total	.0%	4.2%	.0%	.0%	.0%	4.2%
Jasa angkutan ta	Count	0	0	1	0	0	1
	% of Total	.0%	.0%	4.2%	.0%	.0%	4.2%
karyawan	Count	0	0	2	1	0	3
	% of Total	.0%	.0%	8.3%	4.2%	.0%	12.5%
karyawan BUMD	Count	0	0	1	0	0	1
	% of Total	.0%	.0%	4.2%	.0%	.0%	4.2%
nelayan	Count	4	0	0	0	0	4
	% of Total	16.7%	.0%	.0%	.0%	.0%	16.7%
pedagang empek	Count	1	0	0	0	0	1
	% of Total	4.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	4.2%
pns	Count	0	0	1	0	1	2
	% of Total	.0%	.0%	4.2%	.0%	4.2%	8.3%
swasta	Count	0	0	0	1	0	1
	% of Total	.0%	.0%	.0%	4.2%	.0%	4.2%
wiraswasta	Count	0	1	3	1	3	8
	% of Total	.0%	4.2%	12.5%	4.2%	12.5%	33.3%
Total	Count	6	2	8	3	5	24
	% of Total	25.0%	8.3%	33.3%	12.5%	20.8%	100.0%

Sumber : data primer, diolah 2007

Karakteristik seperti ini dapat pula ditinjau dari sisi etnisitas. Penulis menemukan bahwa orang *Hoklo* ada yang membuka rumah makan atau restoran, mendirikan pabrik kecap dan tauco, membuka toko obat Cina dan menjadi tabib obat-obatan Cina, atau menjadi tukang gigi. Pada umumnya *Hoklo*

berkecimpung di bidang usaha, sedangkan peranakan lebih beraneka ragam bidang pekerjaannya mulai dari petani, pengrajin, nelayan, pedagang, tukang batu, sopir bus, guru sekolah swasta, dan pengusaha. Kaum perempuan peranakan banyak yang menjadi penjahit, pengusaha salon dan pembuat makanan seperti kue-kue dan lain sebagainya. Baik *Hoklo* maupun peranakan pada umumnya tidak tertarik untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Kaum peranakan yang menjadi petani umumnya bertanam sayuran, seperti sawi, bayam, kangkung, mentimun, kucai, bengkoang, dan lain-lain. Pemasok sayuran lokal di pasar-pasar di Sungailiat adalah orang *Khe*'. Baik *Hoklo* maupun peranakan, jarang di antara mereka yang menjadi petani lada yang merupakan tanaman andalan masyarakat Pulau Bangka. Walaupun demikian, mereka merupakan pedagang perantara, tengkulak atau eksportir lada yang terkenal. *Hoklo* terkenal sangat menghargai kekayaan dan hemat, sedangkan peranakan lebih menikmati hidup, kedudukan sosial, dan lebih egaliter. Secara umum, dalam pergaulan sosial orang *Hokkian*, *Teociu*, dan *Kongfu* dengan peranakan tidak banyak berhubungan. Kontak sosial yang terjadi biasanya hanya bersifat bisnis dan jarang yang merupakan pertemanan biasa.

Tanaman keras yang banyak ditanam orang *Khe*' adalah tanaman buah-buahan dan kelapa yang juga biasanya ditanam oleh etnis Melayu. Orang *Khe*' merupakan pengrajin sapu dan sikat yang terbuat dari sabut kelapa. Sebagian lagi menjadi pengrajin bakul, keranjang, dan meja kursi yang terbuat dari rotan. Orang *Khe*' juga terkenal sebagai pembuat makanan dari kedelai seperti tahu (*theufu*), susu kedelai (*theufusui*), dan kembang tahu (*theufufa*). Selain itu, mereka pintar membuat bermacam kue basah dan kue kering.

Sejak dulu sudah terdapat beberapa pabrik kecap dan taoco yang didirikan oleh orang *Kongfu* tetapi pemasarannya terbatas untuk masyarakat lokal saja. Orang Bangka yang merantau biasanya kalau pulang kampung sering membeli untuk dibawa ke perantauan, bersama-sama dengan produk makanan khas Bangka lainnya seperti kemplang, kerupuk, terasi, keletek, dan lain-lain. Hanya saja sejak pabrik serupa didirikan oleh perusahaan besar seperti ABC dan Indofood yang menguasai pasaran kecap di Indonesia, pabrik kecap dan taoco lokal mulai bangkrut, dan walaupun tetap bertahan seperti pepatah mengatakan “hidup segan, mati tak mau”. Orang *Khe* banyak yang memproduksi makanan khas Bangka seperti kerupuk, kemplang, keletek, otak-otak, empek-empek, lakso, *pantiauw* (sejenis *kweetiaw* yang banyak dijual di supermarket). Peranakan dan *Hoklo* juga banyak yang membuat kue *hoklopan* khas Bangka (Etnis Melayu lebih sering menyebut kue “*pannekuk*”). Kue *Hoklopan* (di daerah lain disebut “*martabak manis*” atau kue “*terang bulan*”, tapi *hoklopan* lebih gurih, enak dan legit karena terbuat dari banyak susu dan mentega) yang banyak dijual di Jakarta umumnya dibuat oleh etnis Cina dari Pulau Bangka.

Tabel 6-6 di bawah ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara pekerjaan dengan tingkat pendapatan. Hampir 50 persen dari total responden memiliki pendapatan yang berkisar antara Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 5.000.000,- perbulannya. Karakteristik pekerjaan yang berkontribusi pada pendapatan tertinggi adalah wiraswasta. Pengertian wiraswasta disini dapat diartikan sebagai usaha di penambangan timah ataupun bentuk usaha mandiri lainnya yang tidak tergantung pada orang lain seperti usaha mandiri pembuatan makanan khas bangka. Sementara profesi pedagang kecil dan nelayan secara umum memberikan kontribusi yang paling rendah terhadap pendapatan yang diterima oleh

masyarakat. Hal ini dapat dikarenakan karakteristik pekerjaannya itu sendiri yang bersifat musiman dan tergantung pada keberkahan sumber daya alam.

Tabel VI.7

Data Cross-Tabulation Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Kecamatan Belinyu Tahun 2007

Pekerjaan * Pendapatan Rata-rata Sebulan Crosstabulation							
		Pendapatan Rata-rata Sebulan					Total
		.00	<500.000	501.000 - 1.000.000	1.000.001 - 5.000.000	>5.000.000	
Pekerjaan dagang	Count	0	1	0	0	0	1
	% of Tota	.0%	4.2%	.0%	.0%	.0%	4.2%
dagang roti	Count	0	0	0	0	1	1
	% of Tota	.0%	.0%	.0%	.0%	4.2%	4.2%
ibu RT	Count	1	0	0	0	0	1
	% of Tota	4.2%	.0%	.0%	.0%	.0%	4.2%
Jasa angkutan tar	Count	0	0	0	1	0	1
	% of Tota	.0%	.0%	.0%	4.2%	.0%	4.2%
karyawan	Count	0	0	2	1	0	3
	% of Tota	.0%	.0%	8.3%	4.2%	.0%	12.5%
karyawan BUMD	Count	0	0	0	1	0	1
	% of Tota	.0%	.0%	.0%	4.2%	.0%	4.2%
nelayan	Count	0	2	0	2	0	4
	% of Tota	.0%	8.3%	.0%	8.3%	.0%	16.7%
pedagang empek	Count	0	0	0	1	0	1
	% of Tota	.0%	.0%	.0%	4.2%	.0%	4.2%
pns	Count	0	0	1	1	0	2
	% of Tota	.0%	.0%	4.2%	4.2%	.0%	8.3%
swasta	Count	0	0	1	0	0	1
	% of Tota	.0%	.0%	4.2%	.0%	.0%	4.2%
wiraswasta	Count	0	1	2	5	0	8
	% of Tota	.0%	4.2%	8.3%	20.8%	.0%	33.3%
Total	Count	1	4	6	12	1	24
	% of Tota	4.2%	16.7%	25.0%	50.0%	4.2%	100.0%

Sumber: Data Primer diolah, 2007

Namun demikian, masih terdapat beberapa keluhan dari kalangan pemerintah daerah untuk membangkitkan semangat wirausaha dan membuat masyarakat di Belinyu kembali untuk bertani daripada menambang timah. Budaya *dak kawak nyusah* seringkali dianggap sebagai sandungan bagi tolok ukur efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Meskipun hal ini disanggah oleh pemuka dan tokoh pemuda di Belinyu bahwasanya budaya tersebut tidak ada itu hanyalah jargon suatu daerah yang digunakan untuk sekedar membedakan dengan ciri khas daerah lainnya.

Pemerintah merasa pesimis bahwasanya apa yang telah diberikan kepada masyarakat baik berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan dana bergulir telah cukup banyak, namun belum menghasilkan secara optimal. Beberapa analisis menyebutkan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut tidak berhasil optimal dikarenakan yang diikutsertakan dalam program-program tersebut bukanlah orang yang berkompentensi untuk peningkatan hasil produksi, atau orang yang memiliki minat ataupun dasar keahlian di bidang pelatihan maupun penyuluhan. Dengan kata lain program tersebut terlaksana kurang tepat sasaran sehingga hasilnya tidak optimal

Perhitungan ekonomis mungkin dapat menjelaskannya, Kabupaten Bangka pada umumnya dan Kecamatan Belinyu pada khususnya merupakan daerah dengan biaya hidup yang tinggi (*high living cost*). Hal ini dikarenakan kemampuan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*) yang cukup tinggi bahkan dibandingkan dengan wilayah jabodetabek. Berkah timah menyebabkan masyarakat cenderung untuk mengekspor kebutuhan primernya untuk hidup secara subsisten sekalipun. Hanya sebagian kecil masyarakat Belinyu yang bercocok tanam sayur maupun berternak yang biasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri bukan untuk dijual.

Sehingga bukan menjadi hal yang aneh jika hukum permintaan dan penawaran berlaku, di mana tingginya permintaan akan barang-barang primer tidak disuplai mencukupi, hasilnya harga barang tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Oleh karena itu masyarakat Belinyu akan memperhitungkan keuntungan ekonomis cenderung dari jangka pendek apabila mereka harus mengikuti berbagai aktivitas penyuluhan. Berapa nilai ekonomi yang hilang jika mereka harus mengikuti penyuluhan selama 3 hari di kabupaten. Meskipun hasil dari penyuluhan dan pelatihan tersebut merupakan modal yang bisa ditanamkan dalam jangka panjang.

Argumentasi lainnya dari kalangan masyarakat adalah pesimisme masyarakat terhadap janji-janji pemerintah yang ditawarkan melalui program-program yang dicanangkan di wilayahnya. Sebenarnya terdapat banyak kalangan intelektual di Belinyu yang merasa kecewa dengan pemerintah. Pada saat muda mereka merantau ke Jawa untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan kembali ke Belinyu untuk membangun daerahnya. Namun apalah daya ternyata angan mereka tidak juga berhasil, alasan mereka sering terjadinya pergantian kebijakan yang mengiringi pergantian kekuasaan yang tentunya mempengaruhi iklim usaha dan bisnis yang mereka jalankan.

Kenyataan yang dikemukakan di atas merupakan bentuk pemberdayaan yang kurang berhasil. Tidak adanya hubungan yang sinergis antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Mungkin pada level perencanaan sudah relatif baik, namun tidak adanya upayaantisipasi terhadap kemungkinan perubahan jika kondisi sosial, ekonomi dan politik berubah menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat menentukan bagi efektivitas dan keberhasilan program.

VI.4. Usaha-Usaha Produktif Yang Dapat Dikembangkan di Kecamatan Belinyu Dalam Mendukung Sektor Pariwisata

Keanekaragaman budaya dan keharmonisan kehidupan antara etnis Tionghoa dan Melayu di wilayah ini merupakan satu kekuatan tersendiri baik dari sisi perekonomian maupun ketahanan budaya. Meskipun disadari nantinya sedikit banyak akan terjadi pergeseran budaya dan tatanan sosial di masyarakat sekitar kawasan wisata, tetapi keunikan budaya yang sudah terpelihara di Belinyu masih akan lestari.⁴² Oleh karena itu dalam mendukung usaha pariwisata yang tidak hanya berdampak langsung pada perekonomian, namun juga pelestarian cagar budaya, perlu adanya dukungan-dukungan baik yang sifatnya moril maupun material.

Untuk peningkatan usaha ekonomi produktif, meskipun tidak tercatat secara statistik, bantuan dana bergulir dari pemerintah telah disalurkan kepada usaha-usaha kecil yang memang membutuhkan modal. Bantuan tersebut bukan dalam bentuk *cash money* melainkan kebutuhan akan alat produksi yang ditaksir sebesar Rp. 500.000,-. Meskipun nilai nominalnya relatif kecil, tetapi ternyata cukup membantu pengusaha-pengusaha kecil. Hal ini dikarenakan prosedurnya yang relatif mudah dibandingkan dengan bantuan dari perusahaan atau pemerintah yang dalam bentuk *cash money* dengan jumlah yang lebih besar.

Bantuan teknis lainnya seperti penyuluhan, pelatihan dan pengembangan usaha juga telah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah di antaranya; Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

⁴² Artinya budaya-budaya lama itu mengalami proses adaptasi yang diakibatkan oleh adanya interaksi dengan para pelancong tersebut. Hal itu dimungkinkan juga karena sifat dari budaya itu sendiri yang dinamis terhadap perubahan yang terjadi.

Dinas Tenaga kerja, bahkan oleh pihak aparat kecamatan. Berikut ini akan dibahas tentang jenis usaha ekonomi produktif yang dapat dikembangkan untuk mendukung pariwisata di Kecamatan Belinyu. Dasar pemilihan jenis usaha ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat, minat dan keahlian yang dimiliki serta ketersediaan bahan baku.

VI.4.1. Makanan Hasil Olahan Laut

Kesamaan lain antara etnis Cina dengan etnis lokal adalah kesukaan akan makanan dari hasil laut (*sea food*). Jenis masakan yang digemari oleh kedua etnis ini juga hampir sama (kecuali makanan mengandung babi yang tidak dimakan oleh orang Melayu yang muslim). Selain untuk lauk sehari-hari, hasil laut juga dibuat makanan camilan, seperti empek-empek, otak-otak, kemplang, kerupuk, kletek, bakmi, *pantiauw* (sejenis *kwe tiauw*) lakso, terasi, rusip, kecalo, dan lain-lain. Melihat keharmonisan hubungan antar etnis ini, menurut Koentjaraningrat (1999), dapat dikatakan bahwa tampaknya loyalitas etnis dan loyalitas nasional mendominasi dua bidang lain dari kehidupan mereka, yaitu bidang kehidupan pribadi dan bidang kehidupan umum sehingga kedua loyalitas itu lebih saling melengkapi daripada saling bersaing atau saling terlibat dalam konflik. Mengacu pada Harold R. Isaacs (1993), pertalian antar etnis yang semacam ini merupakan penghargaan dan rasa harga diri: bagaimana individu dapat terlihat oleh orang lain dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri.

Hampir sebagian besar masyarakat Belinyu memiliki keahlian dalam mengolah hasil laut menjadi makanan khas Belinyu. Keahlian ini diperoleh secara turun temurun maupun melalui proses transfer teknologi dari majikan pemilik usaha kepada karyawannya.

Satu contoh usaha kecil pembuatan kemplang bakar yang dimiliki oleh warga keturunan Melayu. Pada awalnya sang ibu bekerja pada perusahaan krupuk kemplang milik warga etnis Cina, dikarenakan kecelakaan pada tangannya, sang ibu memutuskan untuk berhenti dari perusahaan itu, dan memulai usaha barunya. Meskipun relatif kecil dan hanya melayani beberapa pesanan dari mitra usaha yang dikenalnya melalui perantara keluarga maupun tetangganya, usaha ini cukup memberikan penghidupan yang lebih baik daripada sewaktu dia menjadi karyawan. Penghasilan rata-rata sebulan yang diperolehnya bisa mencapai lebih dari Rp. 1.000.000,-. Harga produk kemplang ini relatif lebih murah dibandingkan kita membelinya di toko di pasar Belinyu.

Selain usaha kemplang panggang, masyarakat Belinyu juga banyak yang memproduksi empek-empek, otak-otak, makanan kue kering khas Bangka, yang kesemuanya itu memiliki cita rasa tersendiri. Namun demikian, usaha ini biasanya hanya berupa *home industri* atau sebagai usaha sampingan keluarga, sehingga pengelolaannyapun dirasakan kurang profesional. Dalam artian bahwa pengusaha tidak terlalu mementingkan pada kemasan, maupun standar gizi yang harus dipenuhi menurut HACCNya. Oleh karena itu, kecenderungan usaha seperti ini banyak memiliki kendala untuk pemasaran yang lebih luas, terutama untuk dipasarkan di luar daerahnya.

VI.4.2. Kerajinan Khas Bangka

Sungguh sangat disayangkan, kepulauan Bangka-Belitung pada umumnya, dan Kecamatan Belinyu pada khususnya yang memiliki eksotisme panorama alam dan kelimpahan sumber daya alam, tidak diiringi oleh peningkatan produk kerajinan yang khas

sebagai souvenir atau buah tangan wisatawan ketika berkunjung ke daerah ini.

Dari pengamatan tim, model pemberdayaan yang cukup berhasil di Belinyu ternyata lebih didorong oleh aspirasi dari bawah. Sebagai contoh keberhasilan dari Mar bersaudara dalam usaha renda yang ternyata telah memberikan kontribusi terhadap transfer keahlian kepada hampir ratusan wanita di wilayah Belinyu. Keikutsertaan mereka dalam usaha yang dirintis oleh bu Martinah ternyata dapat membuka lapangan kerja baru dan tambahan penghasilan bagi ibu-ibu di Belinyu, terutama pada saat penambangan timah mulai tidak diijinkan.

Usaha ibu martinah ini dimulai dari usaha kecil dengan melibatkan bantuan pemerintah daerah setempat. Menurutnya renda hasil buaatannya sedikit berbeda dengan renda-renda buatan dari Padang, Medan maupun Bali. Keikutsertannya secara aktif pada berbagai even-even ekhibusi di luar daerahnya, telah membuka wawasannya untuk dapat menciptakan kreasi-kreasi baru dalam usahanya. Tingkat kreativitas inilah yang menjadikan produk buaatannya relatif lebih mahal dibandingkan produk yang dibuat di daerah lain.

Melalui pameran-pameran pula, ibu Martinah dapat memasarkan produknya hingga ke manca negara, seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, dia juga menjalin kerjasama dengan berbagai pusat pertokoan ternama di Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia untuk memasarkan hasil produksinya. Kualitas mutu yang dia pertahankan merupakan salah satu kunci sukses tersendiri bagi ibu Martinah untuk dapat berkompetisi dengan pengusaha renda lainnya yang mulai marak di Belinyu.

Berdasarkan data primer yang kami peroleh, tidak banyak masyarakat Belinyu yang berminat untuk membuat kerajinan khas Bangka dengan memanfaatkan bahan baku yang melimpah di Belinyu. Sebut saja hasil laut seperti siput gonggong atau rajungan yang ternyata jika diolah menjadi souvenir memiliki nilai tambah ekonomi yang cukup tinggi. Sementara ini, dinas perindustrian dan perdagangan masih memfokuskan pada pembuatan produk kerajinan dengan bahan dasar timah. Padahal jika ditilik dari sisi teknologi yang digunakan, dan ketersediaan alat serta bahan baku relatif mahal untuk dijangkau masyarakat. Sedangkan dari sisi marketing juga sulit untuk dipasarkan. Kendala semacam ini hendaknya menjadi pekerjaan rumah yang cukup serius bagi pemerintah untuk dapat menjembatani kebutuhan, keahlian dan minat masyarakat terhadap pemanfaatan hasil alam untuk diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

VI.4.3. Sektor Jasa

Usaha lainnya yang juga diminati oleh masyarakat Belinyu dalam mendukung keberadaan pariwisata di daerahnya adalah usaha di sektor jasa. Usaha ini meliputi penyediaan jasa transportasi umum, jasa pendamping wisatawan (*guide*), jasa penyelamat pantai dan lain sebagainya.

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan obyek wisata di Belinyu masih sulit dijangkau dengan transportasi umum. Meskipun jenis pariwisatanya termasuk pariwisata massal, yang dapat menikmati obyek wisata ini justru berasal dari kalangan *the have*. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal; (1) minimnya ketersediaan angkutan umum yang menuju ke lokasi wisata; (2) fasilitas jalan yang kurang memadai untuk dilalui oleh angkutan

umum. Kondisi ini juga berdampak pada masuknya wisatawan asing, sehingga obyek wisata ini cenderung lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal. Oleh karena itu, usaha *guide* atau jasa pemandu wisata juga belum bisa berkembang selama fasilitas penunjang seperti ketersediaan hotel, *cottage*, rumah penginapan, listrik dan air bersih serta fasilitas pendukung lainnya belum terpenuhi di kawasan wisata Tanjung Penyusuk.

VI.4.4. Budidaya Biota Laut

Berbagai biota laut yang bernilai ekonomi tinggi dapat dijumpai dalam ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah struktur struktur dasar laut berupa deposit kalsium karbonat di laut yang dihasilkan terutama oleh hewan karang. Karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Coelenterata atau Cnidaria, ordo Scleractinia dan kelas Anthozoa (NYBAKEN, 1992).

Sayangnya, ekosistem terumbu karang sangat peka terhadap berbagai perubahan kondisi lingkungan, sementara di wilayah pesisir tempat di mana ekosistem terumbu karang berada, merupakan obyek berbagai kepentingan tujuan pembangunan untuk menghidupi hajat hidup orang banyak. Demikian juga halnya dengan wilayah pesisir di Provinsi Bangka Belitung yang suatu saat akan dimanfaatkan sebagai obyek pembangunan.

Kondisi terumbu karang di kawasan tanjung penyusuk masih tergolong alami. Untuk mendukung sektor pariwisata budidaya biota laut yang tumbuh dalam ekosistem terumbu karang bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, belum banyak masyarakat di sekitar kawasan ini tahu dan mengerti bagaimana

membudidayakan biota laut tersebut dan juga sisi pemasarannya. Masih banyak yang harus dibenahi untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari produk ini. Sejalan dengan berbagai development planning di kawasan ini, setidaknya pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan wilayah tetap memperhatikan kelestarian biota laut.

VI.5. Kontribusi PT. Timah terhadap Peningkatan Usaha Kecil

Dalam bidang ekonomi, PT Timah (Persero) Tbk. memiliki kepedulian bagi peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat melalui Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Program yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal ini telah menyalurkan dana pinjaman modal dalam jumlah milyaran rupiah kepada mereka yang membutuhkan untuk mengembangkan usaha. Tidak sedikit masyarakat Provinsi Bangka-Belitung (Babel) yang telah menikmati manfaat digulirkannya program PUKK. Tujuan utama dari program ini adalah membantu usaha kecil dan mikro (UKM) termasuk koperasi yang sudah berjalan agar dapat semakin berkembang dan mandiri. Termasuk, terdorongnya kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam rangka pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Konsep yang selalu menjadi tolok ukur dalam pemberian bantuan adalah membantu, bukan melahirkan ketergantungan kepada perusahaan. Karenanya bantuan yang disalurkan perusahaan tidak dalam bentuk *charity* (derma), tetapi sebagai pinjaman yang pada saatnya akan dikembalikan oleh penggunanya. Dengan demikian konsep tersebut juga mengandung pengertian bahwa perusahaan dan mitra binaannya sama-sama memikul tanggung jawab bagi kesinambungan program ini.

Pada semester 1 tahun 2007 ini PT.Timah Tbk. kembali mengucurkan dana bantuan untuk para UKM yang ada di wilayah operasionalnya. Dana yang direncanakan sebesar 3,7 milyar lebih ini akan disalurkan kepada sejumlah calon mitra binaan yang ada diberbagai wilayah operasional PT.Timah Tbk. Menurut Direktur Utama PT. Timah (Persero) Tbk. Wachid Usman, total dana yang sudah disalurkan untuk para UKM sampai saat ini sudah mencapai sekitar 20 milyar. Program ini, merupakan titipan pemerintah melalui PT.Timah dan sudah digulirkan sejak tahun 1995.

Mulai tahun 2007 bagi calon mitra binaan yang dinyatakan layak menerima dana pinjaman, pihak PT.Timah Tbk. juga telah memberikan asuransi kepada mitra binaan tersebut, di mana jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka mitra binaan tersebut sudah diproteksi oleh asuransi.

Selain mengucurkan bantuan pinjaman sebesar Rp 800 juta di wilayah Bangka Selatan pihak PT.Timah juga memberikan bantuan berupa mesin bordir sebanyak 6 unit kepada masyarakat yang ada diwilayah tersebut. Selain itu juga pihak PT.Timah juga menyalurkan bantuan untuk para UKM diwilayah Bangka Induk sebanyak 44 calon mitra binaan, wilayah Bangka Barat sebanyak 11 calon mitra binaan, serta wilayah Pangkalpinang dan sekitarnya sebanyak 112 calon mitra binaan. Kepada calon mitra binaan sebelum diadakan penandatanganan surat perjanjian terlebih dahulu mereka diberikan pembekalan pelatihan kewirausahaan dari beberapa lembaga yang sangat berkompeten dibidangnya. (Berita PT. Timah, 2007).

Dari apa yang telah diupayakan oleh PT. Timah di atas dalam pengelolaan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat Bangka-Belitung, sebenarnya relatif sangat kecil jika dibandingkan

dengan eksploitasi yang telah dilakukan oleh PT. Timah sebagai kepanjangan negara selama bertahun-tahun di Babel. Hampir 75% dari produksi timah di Indonesia berasal dari kepulauan ini, dan seharusnya kepulauan ini menjadi provinsi terkaya di Indonesia dengan potensi sumber daya alamnya. Pada tahun 2005, ketika TI diijinkan beroperasi tak kurang dari 100.000 ton pasir timah telah berkontribusi menghidupi lebih dari 15.000 jiwa dengan total kontribusi PDRB sekitar Rp 30 miliar.

Kalau dihitung dari keseluruhan harga pasir timah tentu komulasi nominal uangnya luar biasa (sekitar Rp 300 miliar), jauh di atas PAD provinsi dan PAD semua kabupaten/kota se-Babel digabung menjadi satu. Tapi uang sebanyak itu tentu saja tidak ditanam dan beredar di Babel, tetapi diangkut oleh para pemilik modal yang umumnya berasal dari luar Babel. Bahkan, tak sedikit yang ditransfer ke luar negeri seperti Singapura, Hongkong, dan Malaysia karena pemodalnya memang dari sana (Republika, 2005).

Meskipun berkontribusi positif terhadap perekonomian Babel secara umum, keberadaan timah juga memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat Babel. Nafsu untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang cukup singkat, dan modal dan tenaga yang relatif murah (*Dak kawak nyusah*) ternyata telah mengakibatkan kerusakan hutan, sungai, kebun, jalan, dan pantai. Lebih dari itu keberadaan tambang *illegal* dan *small smelter* juga ditengarai merusak akhlak, silaturahmi, budaya berkebun, wajib belajar pendidikan dasar, dan masih banyak kerusakan-kerusakan lainnya yang terjadi, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata (Republika, 2005).

Karakteristik masyarakat yang seperti ini telah terbentuk berpuluh-puluh tahun lamanya, sehingga dapat menjadi kendala

tersendiri bagi masuknya inovasi baru yang bertujuan untuk mengalihkan aktivitas masyarakat dari penambangan timah ke aktivitas ekonomi produktif lainnya. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab PT. Timah semata, ada puluhan perusahaan *small smelter*, PT. Kobatin (PMA Malaysia), dan Eksportir-eksportir timah lainnya yang juga telah mengeruk keuntungan dari bumi Babel ini harus pula memikul tanggung jawab pemulihan ekonomi masyarakat Babel pasca *boom* timah.

VI.6. Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*)

Secara konseptual *community development* menurut Ferguson and Dickens (1999) adalah: “*asset building that improves the quality of life among residents of low- to moderate-income communities*”. Komunitas secara fisik dapat didefinisikan sebagai tetangga, sedangkan aset dapat berupa bermacam jenis baik yang berupa fisik, ekonomi, sosial, politik dan humaniora.

Community development pada umumnya ditemui dalam bentuk gotong royong antar warga masyarakat terutama dalam pembangunan rumah, kebersihan lingkungan setempat ataupun hajatan-hajatan yang diselenggarakan di sekitar lokasi setempat baik untuk kepentingan individu maupun bersama. Lebih mendalam lagi, seharusnya *community development* juga diterapkan dalam upaya-upaya pembangunan daerah setempat seperti pengadaan *on job training* untuk menyiapkan masyarakat menjadi lebih produktif.

Di Indonesia yang budaya gotong royong masih dianggunkan sebagai produk asli budaya lokal, *community development* menjadi salah satu aktivitas yang sudah mengakar.

Oleh karena itu pemerintah seringkali menggunakan pendekatan ini untuk mempercepat proses pembangunan. Alasan yang mendasarinya adalah; (1) dalam setiap kelompok masyarakat, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pengaruh dan dapat mempengaruhi serta menggerakkan masyarakat setempat. (2) aspirasi masyarakat biasanya disampaikan dalam kelompok-kelompok tersebut, sehingga memudahkan pemerintah untuk menampung dan mensosialisasikan program-program pembangunan dengan menggunakan jalur ini. Sebagai contoh dalam sektor ekonomi misalnya, menurut Nowak (1989) dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut terhadap pemberdayaan keuangan masyarakat dapat dilakukan dengan membentuk "*Credit Union*", atau di Indonesia biasa disebut dengan 'arisan'. Pemerintah juga sering memanfaatkan pola ini untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan bantuan dana bergulir yang biasanya dikoordinasikan oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Untuk mencapai efektivitas program pemberdayaan masyarakat ini, Vidal (2001) memberikan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh masing-masing kelompok pemberdayaan yaitu:

- ❖ Perencanaan yang efektif; mencakup pemahaman tentang aset yang dimiliki oleh komunitas setempat, kebutuhan dan keinginan mereka yang dapat diinformasikan dari visi strategis untuk menghadapi berbagai perubahan serta perencanaan internal yang matang agar terjalin kesesuaian antara sumber dana, program dan tujuan dari pemberdayaan itu sendiri
- ❖ Sumber-sumber daya yang aman; termasuk didalamnya pendataan tentang bagaimana mendapatkan bantuan, pinjaman, kontrak yang dibuat dengan pihak ketiga, *fee*, penghasilan bagi pengurus dan tentunya asistensi teknis.

- ❖ Membangun kekuatan internal yang kuat antara manajemen dengan pemerintah; dalam konteks ini membangun hubungan kerja yang baik antara pengurus dengan staf yang mewakili pemerintah serta anggotanya.
- ❖ Menyampaikan program-program dengan baik kepada anggotanya melalui transparansi.
- ❖ Memiliki jaringan yang kuat dan luas dengan membangun hubungan yang baik dengan institusi lainnya baik publik maupun swasta di dalam maupun di luar komunitas.

Pendapat yang sedikit berbeda tentang efektivitas CD dikemukakan oleh Glickman dan Servon (1998) yang menekankan bahwa kelompok pemberdayaan masyarakat seharusnya memiliki kapasitas sebagai berikut; (1) *resource*, (2) *organizational*, (3) *networking*, (4) *programmatic*, and (5) *political*. Sementara itu, Walker dan Weinheimer (1998) mereviewnya dengan tiga alasan;

First, the usefulness of distinguishing between the ability to relate to the public sector and to community constituents, on the one hand (political capacity), and to others involved in the CDCs work and organizational success, on the other hand (networking capacity), is not clear; many similar skills are involved. Second, the Glickman and Servon framework does not leave out planning capacity, as Walker and Weinheimer implicitly suggest; at least some elements of planning are included within other types of capacity (e.g., to plan for organizational growth, to project revenues and revenue needs, to do strategic and project planning). However, focusing directly on the importance of various types of planning is important in the current context since, as discussed below, congregations as a group are commonly believed to have limited capacity in this area.

Finally, Walker and Weinheimer do a better job of embedding their discussion of needed CDC organizational capacity into a larger discussion of what the community development support can/should provide to individual neighborhood organizations.

Masyarakat Kecamatan Belinyu pada umumnya telah memanfaatkan berbagai bantuan dana bergulir baik yang disalurkan langsung melalui pemerintah daerah maupun yang berasal dari program-program pemberdayaan dari perusahaan. Pada dasarnya secara umum kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Belinyu relatif lebih baik dibandingkan kondisi kecamatan di daerah-daerah pesisir bagian timur Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakatnya. Tercatat 2 desa yang telah berswasembada dan 6 desa lainnya masih berstatus swakarya. Dari kondisi rumah pun hampir seluruh rumah penduduk telah permanen, mereka menyebutnya sebagi berkah timah. Selain itu berdasarkan tingkat kesejahteraan masih terdapat 205 penduduk dari 10.818 orang yang hidup dalam kondisi prasejahtera di tahun 2005, atau hanya sekitar 0.009% (BPS, 2005).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pariwisata, dinas kelautan dan perikanan serta pejabat kecamatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini partisipasi masyarakat Belinyu cukup baik terutama yang berkaitan dengan program-program pemberdayaan pemerintah. Data statistik menunjukkan bahwa selama tahun 2005, dana swadaya masyarakat untuk pembangunan di wilayah kecamatan belinyu melebihi jumlah bantuan yang digulirkan dari pemerintah pusat (tabel 3). Meskipun hasil dari pemanfaatan dana ini lebih ditujukan untuk pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana jalan serta bangunan-bangunan fasilitas umum

Tabel VI.8

**Jumlah Penerimaan Bantuan Pembangunan Desa/
Kelurahan dan Swadaya Masyarakat Menurut Kelurahan/
Desa, Tahun 2005 (Juta Rupiah)**

No	Kelurahan/Desa	Sumber dana		Jumlah
		Bantuan Pusat	Swadaya Masyarakat	
1	Lumut	5	-	5
2	Riding panjang	5	40	45
3	Gunung Muda	10	50	60
4	Kuto Panji	10	5,65	15,65
5	Air Jukung	10	-	10
6	Bukit Ketok	10	-	10
7	Bintet	5	-	5
8	Gunung pelawan	10	-	10
		65	95,65	160,65

Sumber: Belinyu Dalam Angka, BPS (2005)

Tabel VI.9

**Hasil Pelaksanaan Inpres Bantuan Desa dan Swadaya Serta
Tenaga Kerja yang Terserap Menurut Kelurahan/Desa,
Tahun 2005**

No	Kelurahan/Desa	Prasarana dan sarana yang dihasilkan			Tenaga Kerja yang Terserap
		Prasarana	Bangunan	Rehab Bangunan	
1	Lumut	2	2	-	25
2	Riding panjang	3	20	-	50
3	Gunung Muda	2	1	1	20
4	Kuto Panji	3	2	1	25
5	Air Jukung	4	4	-	50
6	Bukit Ketok	1	1	-	20
7	Bintet	1	1	-	10
8	Gunung pelawan	2	2	-	15
	Jumlah	18	33	2	215

Sumber: Belinyu dalam Angka, BPS (2005)

Sedangkan untuk peningkatan usaha ekonomi produktif, meskipun tidak tercatat secara statistik, bantuan dana bergulir dari pemerintah telah disalurkan kepada usaha-usaha kecil yang memang membutuhkan modal. Bantuan tersebut bukan dalam bentuk *cash money* melainkan kebutuhan akan alat produksi yang ditaksir sebesar Rp. 500.000,-. Meskipun nilai nominalnya relatif kecil, tetapi ternyata cukup membantu pengusaha-pengusaha kecil. Hal ini dikarenakan prosedurnya yang relatif mudah dibandingkan dengan bantuan dari perusahaan atau pemerintah yang dalam bentuk *cash money* dengan jumlah yang lebih besar.

Dari pengamatan tim, model pemberdayaan yang cukup berhasil di Belinyu ternyata lebih didorong oleh aspirasi dari bawah. Sebagai contoh keberhasilan dari Mar bersaudara dalam usaha renda yang ternyata telah memberikan kontribusi terhadap transfer keahlian kepada hampir ratusan wanita di wilayah Belinyu. Keikutsertaan mereka dalam usaha yang dirintis oleh bu Martinah ternyata dapat membuka lapangan kerja baru dan tambahan penghasilan bagi ibu-ibu di Belinyu, terutama pada saat penambangan timah mulai tidak diijinkan. Bentuk contoh lainnya adalah pengusaha kecil kerupuk, getas maupun kemplang yang pada dasarnya mereka adalah karyawan dari perusahaan krupuk milik *Chinese*. Model-model seperti ini memang menurunkan keahlian yang sifatnya turun temurun dan bukan dalam bentuk yang instan, sehingga melahirkan pula semangat *entrepreneurship* dibandingkan model-model yang ditawarkan oleh balai latihan kerja ataupun dinas-dinas lainnya.

Perhitungan ekonomis mungkin dapat menjelaskannya, Kabupaten Bangka pada umumnya dan Kecamatan Belinyu pada khususnya merupakan daerah dengan biaya hidup yang tinggi (*high living cost*). Hal ini dikarenakan kemampuan daya beli masyarakat

(*purchasing power parity*) yang cukup tinggi bahkan dibandingkan dengan wilayah jabodetabek. Berkah timah menyebabkan masyarakat cenderung untuk mengeksport kebutuhan primernya untuk hidup secara subsisten sekalipun. Hanya sebagian kecil masyarakat Belinyu yang bercocok tanam sayur maupun berternak yang biasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri bukan untuk dijual. Sehingga bukan menjadi hal yang aneh jika hukum permintaan dan penawaran berlaku, di mana tingginya permintaan akan barang-barang primer tidak disuplai mencukupi, hasilnya harga barang tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Oleh karena itu masyarakat Belinyu akan memperhitungkan keuntungan ekonomis cenderung dari jangka pendek apabila mereka harus mengikuti berbagai aktivitas penyuluhan. Berapa nilai ekonomi yang hilang jika mereka harus mengikuti penyuluhan selama 3 hari di kabupaten. Meskipun hasil dari penyuluhan dan pelatihan tersebut merupakan modal yang bisa ditanamkan dalam jangka panjang.

Argumentasi lainnya dari kalangan masyarakat adalah pesimisme masyarakat terhadap janji-janji pemerintah yang ditawarkan melalui program-program yang dicanangkan di wilayahnya. Sebenarnya terdapat banyak kalangan intelektual di Belinyu yang merasa kecewa dengan pemerintah. Pada saat muda mereka merantau ke Jawa untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan kembali ke Belinyu untuk membangun daerahnya. Namun apalah daya ternyata angan mereka tidak juga berhasil, alasan mereka sering terjadinya pergantian kebijakan yang mengiringi pergantian kekuasaan yang tentunya mempengaruhi iklim usaha dan bisnis yang mereka jalankan.

Kenyataan yang dikemukakan di atas merupakan bentuk pemberdayaan yang kurang berhasil. Tidak adanya hubungan yang

sinergis antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Mungkin pada level perencanaan sudah relatif baik, namun tidak adanya upaya antisipasi terhadap kemungkinan perubahan jika kondisi sosial, ekonomi dan politik berubah menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat menentukan bagi efektivitas dan keberhasilan program.

VI.7. Model Sinergi Pengusaha Besar, Pengusaha Kecil, Pemerintah dan Masyarakat

Pembangunan sektor pariwisata tidak dapat hanya diusahakan oleh investor yang memiliki modal besar saja, melainkan harus ada dukungan dari segenap elemen-elemen pembangunan. Uraian tentang fungsi CSR perusahaan besar, dinamika usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Belinyu memberikan kesan bahwa masing-masing elemen masih belum dalam satu kesatuan. Meskipun tujuan utama dari setiap aktivitas mereka adalah sama yaitu mempercepat pembangunan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis, ada keterkaitan antara CSR dengan UMKM, studi yang dilakukan oleh CERFE group (2001) di Eropa menemukan bahwa:

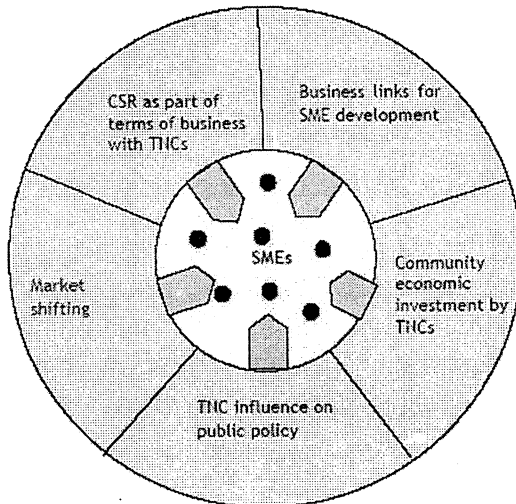
1. Praktek dan kebijakan UMKM secara umum lebih banyak ditujukan untuk mengatasi dampak lingkungan daripada soaial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan derajat kebijakan publik, *public awarness* dan internasional standard dari proses sertifikasi dan *auditing*.
2. UMKM cenderung memprioritaskan isu-isu yang dibawa melalui program CSR dan berkonsentrasi pada satu atau dua

isu kunci daripada menjalankan semua isu yang mungkin hanya sanggup dijalankan oleh perusahaan besar.

3. UMKM lebih memprioritaskan program dan isu lokal.
4. UMKM cenderung lebih aktif dalam CSR yang mana mereka dapat memiliki jaringan yang lebih luas, peningkatan kualitas serta adanya links dengan luar negeri yang cenderung menekankan pada dampak lingkungan atau penggunaan modal intelektual yang relatif tinggi.

Model keterkaitan antara UMKM dengan CSR dapat pula digambarkan dalam diagram 1. Untuk menerapkan pola ini dalam konteks pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Bangka Belitung harus dilakukan modifikasi, mengingat konsep ini hanya sesuai untuk UMKM yang memiliki mitra langsung dengan perusahaan multinasional terutama yang berkaitan dengan proses *supply chain* dan standarisasi.

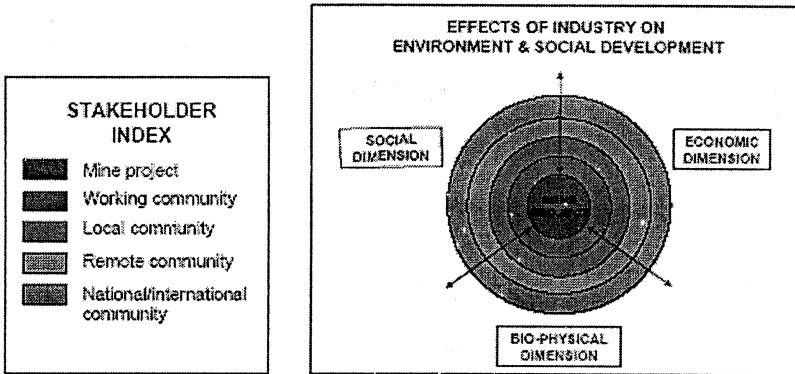
Gambar 6.1.
Dampak CSR terhadap UMKM.



Dimensi CSR bukan hanya memiliki dampak terhadap UKM, melainkan juga *stakeholder* lainnya seperti yang tercermin dari gambar di atas. Dalam diagram ini *local community* dan *remote community* merupakan *stakeholder* yang harus menjadi tanggung jawab perusahaan yang mengambil keuntungan dari hasil tambang di suatu daerah. Kegagalan untuk mengatasi setiap permasalahan yang mungkin timbul antara pengusaha pertambangan dengan *stakeholdernya* akan berakibat pada kelangsungan usaha yang dinilai sendiri oleh publik (Warhust, 1998).

Gambar 6.2.

Efek Keberadaan Proyek Pertambangan terhadap Stakeholder



Dalam kaitannya dengan pembangunan sektor pariwisata di Bangka, khususnya di Kecamatan Belinyu, peran korporasi dalam hal ini PT.Timah cukup besar sebelum diambil alih oleh konglomerat pariwisata Eljohn group. Seperti yang diungkapkan di atas bahwasanya ada ratusan kolong akibat penambangan yang belum dimanfaatkan secara ekonomis. Beberapa di antaranya

belum direklamasi dan akhirnya menjadi danau penampung air hujan dengan airnya yang jernih membentang.. Namun PT. Timah telah memanfaatkan satu kolong yang dapat digunakan sebagai tempat tujuan wisata sejak tahun 1995 yaitu kolong di Phak Kak Liang (87 km dari Pangkalpinang ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke arah Belinyu).

Pha Kak Liang, nama itu memang terkesan berbau etnis Cina yang memang salah satu etnis yang menjadi penduduk Pulau Bangka. Phak Kak Liang adalah salah satu kolong yang terdapat di Kecamatan Belinyu yang sudah disulap menjadi sebuah kawasan kuil atau kelenteng sekaligus tempat wisata. Di dalam kompleks kelenteng ini terdapat kolong bekas tambang yang diubah menjadi kolam ikan. Di tengahnya atau di atas air yang berwarna hijau kekuning-kuningan berdiri sebuah gazebo yang dapat dijangkau melewati jalan atau jembatan berliku.

Phak Kak Liang letaknya 2 km dari jalan utama Pangkalpinang - Belinyu. Suasananya amat tenang, angin semilir dan ribuan ekor ikan yang berada di dalam kolong akan menjadi teman "bercanda" yang mengasyikkan saat beristirahat di atas gazebo. Menurut penjaganya, kompleks Phak Kak Liang dibangun sejak tahun 1995. Ikan yang berada di dalam kolong ada yang besarnya hampir mencapai satu meter, yang terdiri dari ikan mas, ikan nila dan juga ada ikan bawal darat.

Meskipun sangat menarik, di lokasi wisata ini tidak didapati warung-warung makan sehingga pengunjung harus membawa bekalnya sendiri. Hanya ada penjual makanan ikan berupa dedak (kulit gabah padi yang telah digiling) dijual Rp 2.000 satu kantong plastik kecil.

Keadaan ini menunjukkan bahwa penanganan sektor pariwisata di Belinyu meskipun potensial masih terkesan setengah-

setengah. Keterkaitan antara pemerintah, pengusaha baik besar maupun kecil dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Kecamatan Belinyu. Adapun masing-masing elemen dapat dijabarkan fungsinya sebagai berikut:

- A. Partisipasi masyarakat dapat berupa menampilkan keramahan dan keterbukaan terhadap orang asing yang berkunjung. Serta menjamu mereka dengan menampilkan berbagai atraksi dan keunikan budaya setempat. Dukungan masyarakat dalam bentuk keikutsertaan mereka dalam setiap program pariwisata yang dicanangkan pemerintah termasuk menjadi pemandu wisata dan turut menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, merupakan wujud partisipasi yang paling sederhana.
- B. Pemberdayaan ekonomi produktif melalui pengembangan usaha kecil dan menengah perlu diupayakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan juga untuk dimanfaatkan secara meluas. Termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar perlu terus digalakkan. Namun demikian pemberian iklim usaha yang kondusif dan jaminan keberlangsungan usaha juga harus diperhitungkan. Oleh karena itu pemerintah bekerjasama dengan pengusaha besar harus memberikan andil yang cukup besar agar UMKM dapat survive.
- C. Perusahaan besar seperti PT. Timah seharusnya lebih memfokuskan pada aspirasi masyarakat lokal dan *remote community* dalam menyalurkan dana CSR, bukan berdasarkan proposal yang masuk. Dalam mendukung pariwisata, perusahaan besar seharusnya ikut pula terjun ke bawah untuk memantau apakah aktivitas pertambangan yang dilakukan telah memiliki kontribusi bagi pembangunan daerah atau malah merusak kekayaan pariwisata daerah.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Tim Penulis

VII.1. Kesimpulan

Pariwisata, selain mampu mendatangkan devisa, industri ini juga mampu mempertahankan kebudayaan masyarakatnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan kerjasama dan dialog intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat tentang manfaat jangka panjang dari industri pariwisata. Melalui dialog tersebut, masyarakat diharapkan mampu menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam pembentukan pola-pola industri pariwisata yang akan dikembangkan bersama sehingga tercipta kesepahaman bersama. Sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat baik melalui pelestarian kebudayaan dan aktivitas yang menunjang pariwisata adalah langkah awal yang harus dilaksanakan demi merealisasikan niat pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan mereka sebagai tujuan wisata.

Namun *brand image* sebagai daerah kaya tambang timah menjadikan sebagian besar penduduk provinsi ini berlomba-lomba memperkaya diri dan kurang memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlihat jelas pada sebagian besar penduduk provinsi ini tidak mengenyam pendidikan atau hanya mempunyai modal dasar pendidikan tingkat dasar. Sehingga sebagian besar penduduk masih bekerja pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Oleh karena itu keberlangsungan potensi sumberdaya alam di Pulau Bangka dan Belitung untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

perlu dicermati. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan dan cenderung berlebihan segera diakhiri dengan solusi yang dapat diterima oleh semua lapisan. Kerusakan lingkungan tidak hanya akan berdampak pada pengembangan pariwisata, tetapi akan berdampak pada semua sektor pembangunan.

Keberlangsungannya pariwisata tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pariwisata tetapi juga merupakan tanggung jawab wisatawan. Sehingga pengunjung pariwisata juga perlu mendapat pendidikan agar ikut menjaga kelestarian lokasi maupun infrastruktur yang dibangun. Dari observasi di beberapa lokasi wisata didapati pengunjung masih melakukan kegiatan yang akan menjadi kendala bagi wisata yang berkelanjutan seperti membuang sampah terutama sampah-sampah plastik tidak pada tempatnya sehingga menjadi kotor dan akan mencemari biota laut. Selain itu, wisatawan juga masih melakukan coretan-coretan pada batu-batu yang merusak keunikan dan keaslian panorama alam.

Arah pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih memberikan orientasi pada pembangunan darat memberikan implikasi pada kurang berkembangnya sektor-sektor maritim yang merupakan keunggulan komparatif daerah ini dibandingkan daerah lain. Selain itu sebagai provinsi yang relatif baru, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi target dari pembuat kebijakan di pemerintahan provinsi maupun kabupaten. Hal ini berakibat pada pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan yang berakibat pada kerusakan lingkungan.

Pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya memberikan keuntungan kepada pelaku wisata dalam skala besar tetapi juga menguntungkan masyarakat. Pariwisata yang berkembang saat ini masih terfokus pada pariwisata dengan skala besar. Keterlibatan

masyarakat pariwisata di kawasan Pantai Tanjung Penyusuk, kecamatan Belinyu yang tersembunyi memang belum terjamah arus pembangunan yang pesat, perlu terobosan-terobosan yang sifatnya bukan sporadis melainkan bertahap dan terprogram. Elemen-elemen pembangunan yang meliputi pemerintah, masyarakat dan perusahaan masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tumpang tindihnya program dan kurang tepat sasaran program yang disosialisasikan kepada masyarakat.

Keanekaragaman budaya yang unik yang dimiliki Bangka dan Belitung, ditunjang dengan keindahan baharinya merupakan modal dasar yang memadai untuk memulai sebuah industri pariwisata. Namun demikian, industri pariwisata bukan hanya terkait pada keindahan dan budaya, namun juga sikap dan perilaku masyarakat lokal dalam menyambut kedatangan para pengunjung dan mendukung kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, mengubah karakteristik suatu masyarakat bukanlah satu hal yang mudah. Namun demikian, melihat kondisi daya dukung lingkungan Bangka yang terbatas, maka akan sangat bijaksana jika pengembangan pariwisata dijadikan prioritas dalam alternatif solusi perekonomian masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya membantu masyarakat dan anggotanya untuk selangkah lebih maju dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Jalinan harmonisasi hubungan antara ketiga elemen tersebut perlu dibina, kesamaan visi misi dan tujuan akhir yang ingin dicapai untuk memajukan sektor pariwisata di Kecamatan Belinyu perlu ditata ulang kembali. Komunikasi yang intens dan terarah antara ketiga elemen tersebut dengan mendudukan fungsi dan tanggung jawab masing-masing secara professional mungkin sulit untuk diwujudkan, tetapi usaha kearah tersebut perlu

diupayakan. Potensi yang dimiliki kawasan Tanjung Penyusuk seharusnya dapat memberikan nilai tambah baik secara ekonomis maupun sosial kemasyarakatan. Dengan percepatan pembangunan ekonomi melalui keterpaduan pembangunan antar sektor, Provinsi Bangka Belitung dapat menapak hari esok lebih baik dengan semangat kewirausahaan yang tinggi, namun tetap memegang nilai-nilai luhur kedaerahan yang menjadi modal bagi pelestarian warisan budaya bangsa.

Pariwisata di kawasan Pantai Tanjung Penyusuk, kecamatan Belinyu yang tersembunyi memang belum terjamah arus pembangunan yang pesat, perlu terobosan-terobosan yang sifatnya bukan sporadis melainkan bertahap dan terprogram. Elemen-elemen pembangunan yang meliputi pemerintah, masyarakat dan perusahaan masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tumpang tindihnya program dan kurang tepat sasaran program yang disosialisasikan kepada masyarakat.

Ada beberapa keluhan dari kalangan pemerintah daerah untuk membangkitkan semangat wirausaha dan membuat masyarakat di Belinyu kembali untuk bertani daripada menambang timah. Budaya *dak kawak nyusah* seringkali dianggap sebagai sandungan bagi tolok ukur efektifitas program pemberdayaan masyarakat. Meskipun hal ini disanggah oleh pemuka dan tokoh pemuda di Belinyu bahwasanya budaya tersebut tidak ada itu hanyalah jargon suatu daerah yang digunakan untuk sekedar membedakan dengan ciri khas daerah lainnya. Pemerintah merasa pesimis bahwasanya apa yang telah diberikan kepada masyarakat baik berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan dana bergulir telah cukup banyak, namun belum menghasilkan secara optimal. Beberapa analisis menyebutkan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut tidak berhasil optimal dikarenakan yang diikutsertakan dalam

program-program tersebut bukanlah orang yang berkompetensi untuk peningkatan hasil produksi, atau orang yang memiliki minat ataupun dasar keahlian di bidang pelatihan maupun penyuluhan. Dengan kata lain program tersebut terlaksana kurang tepat sasaran sehingga hasilnya tidak optimal.

VII.2. Saran

Kabupaten Bangka memiliki potensi baik alam maupun budaya untuk dikembangkan sebagai atraksi pariwisata serta potensi ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan pariwisata. Berdasarkan hasil analisis TOWS maka yang perlu dilakukan adalah mempertahankan dan memelihara apa yang telah dicapai. Untuk melakukan hal tersebut maka langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melengkapi infrastruktur secara umum, mengelola tempat-tempat wisata dengan baik dan profesional, pemeliharaan tempat-tempat wisata yang telah terfasilitasi, dan melakukan promosi.

Mengingat pentingnya pariwisata dalam membantu perekonomian masyarakat ke depan, maka kebijakan pembangunan yang berkelanjutan perlu segera diterapkan. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang diharapkan dapat berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam pembangunan industri pariwisata, antara lain:

1. Pemerintah dengan kekuasaannya diharapkan mampu memfasilitasi pembangunan sektor pariwisata dengan memberikan insentif kepada pengusaha baik yang berupa keringanan pajak maupun kemudahan prosedur perijinan. Selain itu pemerintah juga melakukan terobosan bagi pembangunan yang mendukung pariwisata seperti tersedianya sarana dan prasarana infrastuktur yang memadai. Terobosan

ini tentunya dengan meningkatkan jalinan koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkait sehingga terjalin *match program* dengan program-program pariwisata bukannya malah jadi penghambat.

2. Promosi pariwisata penting dilakukan. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut harus dirangsang melalui kegiatan promosi. Promosi tersebut dapat dilakukan dengan penerbitan di internet, majalah, koran, selebaran serta penyiaran di televisi (tahap awal di TV bandara di Soekarno Hatta). Pembuatan konsep wisata misalnya wisata bahari dengan ragam produknya serta kerjasama dengan biro perjalanan dan wisata untuk membuat paket perjalanan (*tour package*) ke Kabupaten Bangka.
3. Koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat harus lebih ditingkatkan terutama dalam pembangunan infrastruktur, dalam hal ini transportasi darat, baik jalan, maupun armada, terutama ke wilayah pengembangan pariwisata.
4. Jalin kerjasama dengan badan pariwisata daerah-daerah yang industri pariwisatanya sudah berkembang, dengan membuka paket-paket wisata dan informasi bagi wisatawan sebagai langkah promosi.
5. Optimalisasikan pemanfaatan kekayaan laut yang tersedia, seperti rajungan, siput gonggong, fuel cell, dan pemanfaatan kolong yang terkait dengan pengembangan pariwisata dalam rangka menciptakan solusi alternatif pembangunan ekonomi di Bangka Belitung.
6. Adakan sosialisasi intensif Pemda setempat kepada masyarakat bahwa pariwisata merupakan alternatif solusi sebagai pengganti penambangan timah. Dalam hal ini penting kiranya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat baik dalam pelestarian budaya untuk pengembangan pariwisata itu sendiri, maupun dalam pengembangan konsep pariwisata yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

Adi, Wijaya. 2006, "Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Provinsi di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Jakarta: P2E-LIPI.

Aspinal, C. 2001. "Small-Scale Mining in Indonesia", Laporan penelitian untuk World Business Council for Sustainable Development, Geotekindo Sabang Merauke, Jakarta.

Bank Indonesia. 2005. Profil Wilayah: Provinsi Bangka Belitung, <http://www.bi.go.id/web/id/KER01/Profil/Bangbel/Wisata.htm>

BP3 – Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2005, Pariwisata Bangka,

BPS Kepulauan Bangka Belitung, Agriculture,

BPS. 2005. "Kecamatan Belinyu Dalam Angka 2005", Sungailiat Bangka.

Briggs, Xavier de Souza. 1998. "Brown Kids in White Suburbs: Housing Mobility and the Many Faces of Social Capital." *Housing Policy Debate* 9:177-221.

Centre for Social Markets. 2001 *First World Report on Corporate Social Responsibility* (CSR): Internet consultation of Stakeholders

Data BPS Provinsi Bangka-Belitung. 2004. http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bangka

Demografi Kabupaten Bangka, <http://www.bangka.go.id/kependudukan.php>

Dinas Kelautan dan Perikanan. 2006 “Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Teluk Klabat di Belinyu Kabupaten Bangka”, Laporan akhir disusun oleh PT. Suwanda Karya Mandiri, Bandung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka. 2006 “Industri Kabupaten Bangka Dalam Angka”, Sungailiat.

Djamali. 2006 *Potensi Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya di Perairan Kepulauan Bangka Belitung untuk Mendukung Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat*. Jakarta: LIPI-Press.

Djamali, Asikin, Bambang Sumiono, dan Parino. 2006 “Keadaan Umum Perikanan Tangkap Di Perairan Bangka Induk”, Makalah yang disajikan dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) 2003, Balai Samudera, Komplek Bina Samudera Ancol – Jakarta 10 – 11 Desember 2003.

Dwyer, Larry and Peter Forsyth. 1993 “Assessing the benefits and costs of inbound tourism”, *Annals of Tourism Research*, Vol 20, No 4, pp 751–768.

Evan, Peter. 1996 *Government Action, Social Capital and Development: Reviewing the Evidence on Synergy*” World Development.

Fandeli, C. 2002. *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Bulaksumur, Yogyakarta.

Ferguson, Ronald F. and William T. Dickens. 1999. “Introduction.” In Ronald F. Ferguson and William T. Dickens, eds., *Urban Problems and Community Development*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

Glickman, Norman J., and Lisa J. Servon. 1998 "More than Bricks and Sticks: Five Components of Community Development Capacity." *Housing Policy Debate* 9,3.

Gusnelly. 2006 *Kebijakan Terkait dengan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta, LIPI-Press.

http://babel.bps.go.id/content/st_b01_01.htm

<http://pilkada.golkar.or.id/index.php?action=view&pid=kota&idk=229>

http://www.bangka.go.id/jml_pengajar_murid.htm

<http://www.bangka.go.id/kependudukan.htm> diakses tanggal 8 Maret 2006

<http://www.pariwisata-bangkabelitung.com/adatdanbudaya.html>

<http://www.pariwisata-bangkabelitung.com/wisatapantai.html>

Info Bangka. 2007 Pariwisata Bangka, <http://www.infobangka.com/>

Informasi: Info Daerah. 2006 Pulau Bangka Kota Timah, yang Oke untuk Kerapu dan Udang, *Majalah Demersal*, 25 April, Hak Cipta 2003, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, <http://www.dkp.go.id/content.php?c=2778>

Isaacs, Harold R. 1993. *Pemujaan terhadap kelompok Etnis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Iskandar Zulkarnain, et.al. *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*. Jakarta: LIPI Press.

Jamieson, W. and Noble, A. 2000. *A Manual for Community Tourism Destination Management*.

Jhingan, M.L. 1990 *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: CV. Rajawali

Jusmaliani. 2006 "Birokrasi dan Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi, dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol XIV (2), Jakarta: P2E-LIPI

Kabupaten Bangka, 2006. Data Kondisi dan Potensi Kecamatan Belinyu, http://www.bangka.go.id/kec_belinyu.htm

Kabupaten Bangka, 2006. Jumlah Tenaga Pengajar & Murid Kabupaten Bangka,

Kaplan, David & Albert L. Manners. *Teori Budaya*. Terjemahan oleh Landung Simatupang. 1999. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koentjaraningrat. 1999. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI Press.

Kusumaning, Esti, 2006, *Prospek Industri Pariwisata Indonesia*, lihat dalam *Economic Review* No. 204 bulan Juni 2006 .

Laporan Hasil Kajian Direktorat Kewilayahan I, Bappenas Penyusunan Model Perencanaan Lintas Wilayah dan Lintas Sektor tahun 2004.

Lindberg, K. 1996 The Economic Impact of Ecotourism, <http://ecotour.csu.edu.au/ecotour/mar1.htm>

Lindberg, K. 1996. *The Economic Impacts of Ecotourism*. <http://ecotour.csu.edu.au/ecotour/mar1.htm>

Management.

Maunati. 2002 *Pariwisata Etnik/Budaya dan Identitas Komunitas Lokal di Malaysia*. Jakarta: PSDR-LIPI

Nowak, Jeremy, et al. 1989. "Religious Institutions and Community Renewal. Philadelphia: Delaware Valley Community Reinvestment Fund".

Picard, Michel. 2006, Bali: *Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.

PILKADA Online, 2005. Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan

PT. Timah Tbk. 2007. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", di review dari www.timah.co.id , tanggal 23 Juli 2007.

Rachman, R. 2005. "Euforia Tambang Timah Inkonvensional", dimuat di *Harian Republika*, Kamis 26 Mei 2005.

Raynard, P and Maya Fostater. 2002. "Corporate Social Responsibility Implications For Small And Medium Enterprises In Developing Countries", Report was prepared for United Nation Industrial Development Organization and the World Summit on Sustainable Development, Vienna.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Kabupaten Bangka.

Republika. 2004. "Mencari Selain 3S di Bangka", Jakarta.

Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Ronny Chandra, et.al. 2006. *Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkal Pinang: Yayasan Kepulauan Bangka Belitung Membangun.

Setia, Tunggal. 1999, *Peraturan Perundang-Undangan Kepariwisata di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo

Sofyan, Rizal G, dan Mujiyani, Gusnelly, Devi Riskianingrum, BondanWidyatmoko, 2006. "Wisata Bahari, Tenaga Kerja dan Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan di provinsi Bangka Belitung, Laporan penelitian Kompetitif –LIPI, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia, Jakarta.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Lembaga Penerbit FEUI.

The Global Development Research Center. 2002. *Sustainable Tourism Info-Sheets*. <http://gdrc.org/uem/ecotour/whayis-sustour.htm>

Todaro, M.P. 1977, *Economic Development*. London: Longman

Vidal, Avis C. 2001. "Faith Based Organization in Community Development", prepared for U. S. Department of Housing and Community DevelopmentOffice of Policy Development and Research.

Walker, Christopher and Mark Weinheimer. 1998. "Community Development in the 1990s". Washington, DC: The Urban Institute.

Walton, J. 1996. perspektif ekonomi dalam *An Introduction to Southeast Asian Studies*, Edited by Halib, M. and Huxley, T

Warhurst, Alyson. 1998. "Corporate Social Responsibility And The Mining Industry", Presentation To Euromines, International Centre For The Environment Mining And Environment Research Network School Of Management University Of Bath, United Kingdom

Waspada Online <http://www.waspada.co.id> akses 8 Oktober , 2007, 14:34

World Tourism Organization. 2002. *International Tourist Arrivals by (sub) Region*. [http:// www.world-tourism.org/market_research/facts&figures/latest_data/tita_01_07-02.pdf](http://www.world-tourism.org/market_research/facts&figures/latest_data/tita_01_07-02.pdf)

Yoeti, H. O. A. 1997. *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*. PT Pradya Paramita, Jakarta.

Yoeti, H. O. A. 2000. Ecotourism, Pariwisata Berwawasan Lingkungan. Di dalam Yoeti, H.O.A. (Eds). *Ekowisata, Pariwisata Berwawasan Lingkungan*. PT Pertja, Jakarta: 34-

